

# Serba-Serbi PENDIDIKAN DI INDONESIA

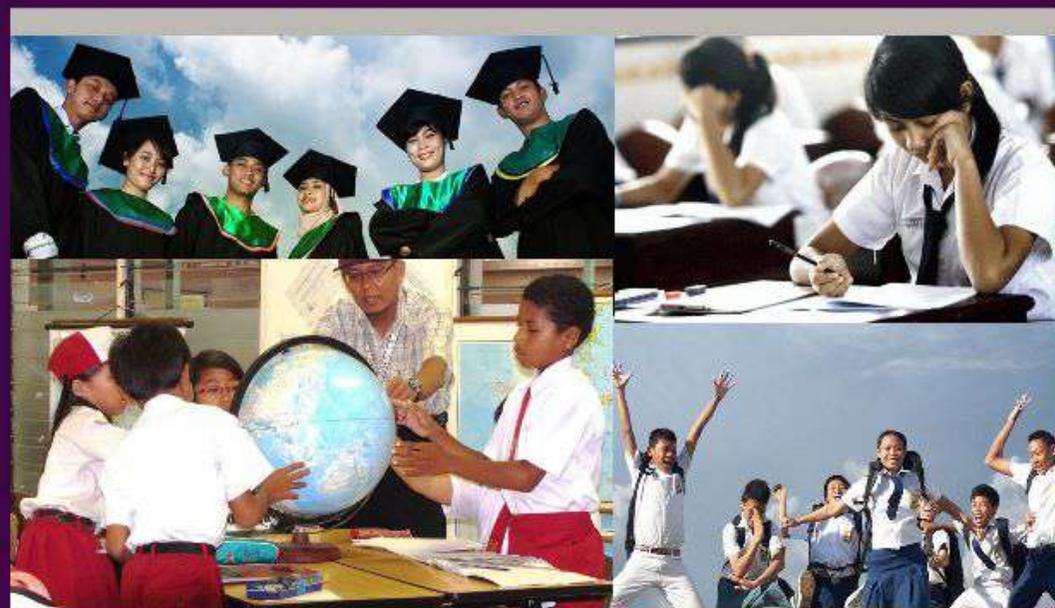


# Serba-Serbi PENDIDIKAN DI INDONESIA

LAIN

Serba-Serbi Pendidikan di Indonesia

Ana Rosilawati



Ana Rosilawati

# SERBA-SERBI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ana Rosilawati



SERBA-SERBI  
PENDIDIKAN DI INDONESIA  
All rights reserved  
© 2015, Indonesia: Pontianak

Ana Rosilawati

Editor:  
M. Tisna Nugraha

Lay Out dan Desain Cover  
Fahmi Ichwan

Diterbitkan oleh IAIN Pontianak Press  
Jalan Letjend. Suprpto No. 19 Telp./Fax. 0561-734170  
Pontianak, Kalimantan Barat

Cetakan Pertama, Desember 2015

SERBA-SERBI  
PENDIDIKAN DI INDONESIA  
vi+ 189 page 16 x 24 cm

# **PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sampai saat ini, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat dan salam semoga selalu mengiringi baginda Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman..

Kehadiran buku yang berjudul Serba-Serbi Pendidikan di Indonesia memberikan gambaran tentang perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, salah satu yang perlu diterbitkan adalah Buku perkembangan pendidikan di indonesia yang terkini. Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini, kritik saran sangat kami harapkan dalam penyempurnaan buku ini. terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Penulis

# DAFTAR ISI

Pengantar	iii	
Daftar Isi		v
Pendidikan Yang Efektif Dalam Perspektif Internasional Dan Amerika		1
Pendidikan Untuk Anak Bangsa		19
Krisis Pendidikan (Membedah Akar Persoalan Sistem Pendidikan Di Indonesia)		37
Pendidikan Gender Dalam Keluarga: (Antara Peluang Dan Tantangan Dalam Sosialisasi)		48
Pendidikan Pembebasan (Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Athiyah Al-Abrasyi)		68
Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi		92
Guru Sebagai Jabatan Profesional		109
Kebebasan Ekspresif Dalam Pendidikan : Sebuah Keharusan Membangun Paradigma Baru		133
Tauhid Sebagai Paradigma Pendidikan Pembebasan		162

# SERBA-SERBI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ana Rosilawati



**SERBA-SERBI  
PENDIDIKAN DI INDONESIA**

All rights reserved  
@ 2016, Indonesia: Pontianak

Penulis:  
ANA ROSILAWATI

Editor:  
M. TISNA NUGRAHA

Lay Out dan Desain Cover  
FAHMI ICHWAN

Diterbitkan oleh IAIN Pontianak Press  
Jalan Letjend. Suprpto No. 19 Telp./Fax. 0561-734170  
Pontianak, Kalimantan Barat

Cetakan Pertama, Desember 2015

SERBA-SERBI  
PENDIDIKAN DI INDONESIA

vi+ 189 page 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-0868-46-2

# **PENGANTAR**

Dengan segenap rasa syukur yang dipersembahkan kehadirat illahi rabbi Allah SWT. dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman Rasul Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat tabiit tabiin serta umatnya sampai akhir zaman.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan makalah penulis yang disusun dalam suatu bunga rampai Pendidikan. adapun kumpulan tulisan dalam buku ini antara lain Pendidikan Yang Efektif Dalam Perspektif Internasional Dan Amerika, Pendidikan Untuk Anak Bangsa, Krisis Pendidikan (Membedah Akar Persoalan Sistem Pendidikan Di Indonesia), Pendidikan Gender Dalam Keluarga: (Antara Peluang Dan Tantangan Dalam Sosialisasi), Pendidikan Pembebasan (Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Athiyah Al-Abrasyi), Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi, Guru Sebagai Jabatan Profesional, Kebebasan Ekspresif Dalam Pendidikan : Sebuah Keharusan Membangun Paradigma Baru, Tauhid Sebagai Paradigma Pendidikan Pembebasan

Segala masukan sangat kami harapkan dalam penyempurnaan buku ini. Selamat membaca.

Pontianak, Oktober 2015

Penulis

# DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendidikan Yang Efektif Dalam Perspektif Internasional Dan Amerika	1
Pendidikan Untuk Anak Bangsa	19
Krisis Pendidikan (Membedah Akar Persoalan Sistem Pendidikan Di Indonesia)	37
Pendidikan Gender Dalam Keluarga: (Antara Peluang Dan Tantangan Dalam Sosialisasi)	48
Pendidikan Pembebasan (Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Athiyah Al-Abrasyi)	68
Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi	92
Guru Sebagai Jabatan Profesional	109

Kebebasan Ekspresif Dalam Pendidikan : Sebuah Keharusan Membangun Paradigma Baru	133
Tauhid Sebagai Paradigma Pendidikan Pembebasan	162

# **PENDIDIKAN YANG EFEKTIF DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL DAN AMERIKA<sup>1\*</sup>**

## **A. PENDAHULUAN**

Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan Negara lain.

Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan Negara lain. Pendidikan

---

<sup>1</sup> \* Makalah ini dipresentasikan dalam kegiatan diskusi intern dosen Prodi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 19 Mei 2011.

memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Setelah diamati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Ada banyak penyebab mengapa mutu pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dinilai rendah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan yang akan dipaparkan di sini ini adalah masalah efektifitas pendidikan di Indonesia, kemudian akan dibandingkan dengan pendidikan yang efektif menurut perspektif pendidikan Internasional dan Amerika.

## **B.EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tt obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran

keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Kata efektif adalah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan namun butuh usaha maksimum dan kontinyu untuk memperolehnya. Kata ini dapat bergabung dengan kata pendidikan menjadi “pendidikan yang efektif”. Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan yang efektif itu? Menurut Kusuma dewi (<http://sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia>) pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.

Keefektifan sebuah sekolah sangat dipengaruhi oleh latar belakang rumah tangga tempat asal anak-anak didik dan keadaan masyarakat sekeliling sekolah. Rumah tangga dan masyarakat yang memiliki SDM yang sangat memadai dan kondisi keuangan yang cukup mapan akan membantu terselenggaranya suatu sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif tentu akan menjadi sekolah idola dan akan diserbu oleh banyak calon anak didik setiap awal tahun pelajaran dimulai. Anak yang efektif sangat ditentukan oleh faktor rumah dan faktor sekolah yaitu rumah yang efektif dan sekolah yang efektif pula.

Kualitas seorang anak didik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya dan suasana belajar di rumah dan di sekolah. Menurut Marjohan (<http://re-searchengines>).

[com/1107marjohan.html](http://com/1107marjohan.html)) beberapa faktor pendukung kualitas anak di rumah adalah seperti tingkat sosial ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) orang tua serta pengaruh teman bermain dan hiburan. Sedangkan faktor pendukung di lingkungan sekolah adalah seperti tingkat SDM dan kehangatan pribadi guru, fasilitas penunjang, sarana belajar dan pengaruh budaya dan iklim belajar di sekolah itu sendiri. Lebih dari separoh waktu kehidupan anak dihabiskan di rumah. Famili dan orang tua mempunyai peranan sangat besar dalam menentukan pribadi anak. Kualitas mereka sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan (SDM) orang tua dalam mendidik dan menumbuhkembangkan konsep belajar dalam keluarga. Kemampuan ekonomi orang tua punya peran dalam menyediakan fasilitas belajar. Ada anak dengan tingkat pendidikan orang tua rendah, biasa berhasil dalam belajar karena orang tua cukup tebal isi kantongnya untuk membiayai saran belajar. Ada lagi sebagian anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu, tetapi juga berhasil dalam belajar, karena orang tuanya sendiri kaya dengan wawasan SDM. Yang sangat beruntung adalah anak yang memiliki orang tua dengan SDM tinggi, kantong tebal dan teman-teman bermain memberikan pengaruh positif dalam belajar.

Selanjutnya Marjohan juga mengatakan bahwa Pendidikan yang efektif tentu akan didukung oleh komponen-komponen yang juga efektif. Mereka adalah seperti sekolah efektif, kepala sekolah efektif, guru efektif dan murid yang efektif. Sekolah yang efektif tentu mempunyai standar indikator seperti yang digambarkan oleh Sergio Vanio (<http://edu-articles.com/lama/pilih=lihat&id=175>). Ia mengatakan bahwa kalau sekolah efektif murid-muridnya dinilai setiap tahun oleh pihak

yang independen maka skor penilaiannya selalu meningkat. Murid-murid di sekolah itu sangat antusias dalam belajar dan ini tercermin dalam peningkatan prosentase kehadirannya. Guru sangat konsekwen dalam memberikan pekerjaan rumah (PR) dan menilai PR itu dengan konsisten. Sekolah memiliki program dan jadwal ekstrakurikuler di sekolah itu terdapat partisipasi orang tua dan masyarakat untuk peduli terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah tersebut

Menurut Poniman dalam tulisannya Pendidikan yang Efektif ([http://smpn3jember.com/v4/index.php?option=com\\_content&view=article&id=179%3Apendidikan-yang-efektif&catid=1%3Alatest-news&Itemid=181](http://smpn3jember.com/v4/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3Apendidikan-yang-efektif&catid=1%3Alatest-news&Itemid=181)) Sekolah efektif sangat menghargai waktu dan akan memanfaatkannya ibarat memanfaatkan uang. Tentu saja sebagian besar waktu itu digunakan untuk belajar. Guru-guru di sekolah yang efektif mampu melaksanakan proses belajar mengajar yang bebas dari gangguan dan memberikan pekerjaan rumah dengan cara bertanggung jawab. Sekolah ini mulai dan mengakhiri kegiatan belajar betul-betul tepat waktu. Sementara itu dalam sekolah yang tidak efektif, guru-guru cenderung tidak mendukung pemahaman tujuan sekolah.

Sekolah dapat dikatakan efektif apabila terdapat kesesuaian dan ketepatan antara tujuan dan pencapaiannya. Efektivitas tidak berarti menggambarkan keseluruhan aspek yang ada, tetapi sebuah sekolah, mungkin “efektif sebagian” artinya sekolah efektif dalam mencapai satu atau lebih aspek tertentu, tetapi tidak efektif dalam pencapaian bidang yang lain. Bagi sekolah, pengelolaan sekolah dengan menggunakan manajemen partisipasi dan transparansi perlu menjadi landasan kerja bagi semua warga sekolah.

Di negara kita, model sekolah efektif secara

kebijakan maupun praktiknya terwadahi dalam program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS (Depdiknas, 2002:14). Pada sekolah efektif, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan inisiatif / prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.

Kepala sekolah yang efektif sangat sadar bahwa keberadaan siswa adalah titik pokok dalam dunia pendidikan (di sekolah), maka ia sangat memonitor perkembangan siswa yang tercermin dalam peningkatan kualitas nilai tes yang bersih dari rekayasa dan manipulasi data. Ia melowongkan waktu (punya jadwal) untuk mengamati guru dalam kelas dan senantiasa berdialog tentang problem dan perbaikan pengajaran/kelas. Kepala sekolah menjadi efektif karena ia mampu menjadi pemimpin yang efektif.

Me Clure (dalam Salfen Hasri, 2004) mengatakan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu dalam berbagi tugas bersama siapa yang memiliki kompetensi untuk pekerjaan khusus. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu untuk melaksanakan "*problem solving*" dan "*decision making*", memiliki bakat memimpin serta mampu untuk bersosial yaitu untuk bekerja sama. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah sedikit sekali yang menghabiskan waktu untuk urusan

kurikulum dan pengajaran. ([http://smpn3jember.com/v4/index.php?option=com\\_content&view=article&id=179%3Apendidikan-yang-efektif&catid=1%3Alatest-news&Itemid=181](http://smpn3jember.com/v4/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3Apendidikan-yang-efektif&catid=1%3Alatest-news&Itemid=181))

### C. PENDIDIKAN INTERNASIONAL<sup>2</sup>

Belakangan ini muncul tren di beberapa sekolah yang mengklaim dirinya menerapkan pendidikan internasional. Dengan mengadopsi kurikulum asing dan mendatangkan para pengajar dari negara asal kurikulum, sekolah-sekolah ini berani menyebutkan bahwa kurikulum mereka berkualitas pendidikan internasional. Sebenarnya standar pendidikan internasional bukan sekedar pendidikan yang menggunakan bahasa internasional. Bukan hanya pada kulitnya. Harusnya pendidikan internasional bukan melulu mempromosikan penggunaan bahasa asing.

The International Baccalaureate® (IB), sebuah lembaga yang memberikan sertifikasi kepada sekolah-sekolah bertaraf internasional mendefinisikan Pendidikan Internasional sebagai berikut:

- *Developing citizens of the world in relation to culture, language and learning to live together* (Mengembangkan warga dunia untuk saling mengenal budaya, bahasa, dan belajar untuk hidup berdampingan).
- *Building and reinforcing students' sense of identity and cultural awareness* (Membangun dan mempertahankan identitas dan kesadaran siswa akan budaya lokalnya sendiri).
- *Fostering students' recognition and development of universal*

---

2 Nama lain untuk pendidikan internasional adalah pendidikan holistik. Holistik berasal dari kata whole atau menyeluruh. Pendidikan holistik dimaksudkan agar orang berkembang secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, motorik, emosional, maupun spiritual. Pendidikan holistik mulai disadari pada tahun 2000 dan menjadi tren pendidikan internasional hingga saat ini. Di Singapura, pendidikan holistik dimulai pada tahun 2006, sedangkan di Jepang sudah dimulai sejak tahun 2000 dengan prinsip *body, mind and soul*.

*human values* (Menumbuhkan kesadaran siswa akan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan pengembangannya).

- *Stimulating curiosity and inquiry in order to foster a spirit of discovery and enjoyment of learning* (Merangsang rasa ingin tahu dan kemampuan bertanya supaya bisa menumbuhkan semangat penemuan dan kesenangan belajar).
- *Equipping students with the skills to learn and acquire knowledge, individually or collaboratively, and to apply these skills and knowledge accordingly across a broad range of areas* (Membekali siswa dengan kemampuan belajar dan memperoleh pengetahuan baik secara individu maupun berkelompok, dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan tersebut dengan tepat di berbagai bidang).
- *Providing international content while responding to local requirements and interests* (Menyediakan konten internasional sembari tetap tanggap akan kebutuhan dan kepentingan lokal).
- *Encouraging diversity and flexibility in teaching methods* (Mendorong keanekaragaman dan fleksibilitas metode pengajaran).

*Providing appropriate forms of assessment and international benchmarking* (Menyediakan bentuk penilaian yang sesuai atau tepat dan pembandingan internasional). (<http://ngerumpi.com/baca/2011/02/16/menyiapkan-pendidikan-internasional-dari-rumah>)

Menurut Frida (<http://re-searchengines.com/art05-67.html>) Pendidikan internasional harus dimaknai dengan pendidikan yang menjadikan anak didiknya berpikir secara terbuka dan internasional, *open and international*

*minded. International minded* dimana di dalamnya para anak didiknya kelak akan menjadi manusia yang ‘berwarga negara internasional’ atau istilahnya sebagai *global citizen*. Jadi pendidikan internasional bukan sekedar kulit belaka, namun lebih pada esensi yang terletak di dalamnya, dalam pembelajarannya.

Lebih lanjut Frida mengatakan bahwa dalam pendidikan internasional, kurikulum yang diterapkan boleh-boleh saja kurikulum nasional, tetapi di dalamnya disisipkan pendidikan untuk ber-internasional. Artinya, anak didik dijejali dengan pendidikan akan hidup dalam suasana damai di dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diberikan makna perdamaian internasional, dan arah kehidupan yang lebih baik.<sup>3</sup> Bentuk pendidikan semacam ini bukan dalam tingkat pendidikan teori, namun harus diterapkan secara nyata.

Dalam *four pillars of education in UNESCO*, ada empat dasar pendidikan, yakni: *Learning to Know* (Belajar untuk mengetahui); *Learning to Do* (Belajar untuk bertindak); *Learning to Be* (Belajar untuk menjadi (seseorang)); dan *Learning to Live Together* (Belajar untuk hidup bersama). Empat dasar ini adalah pegangan kita dalam penerapan semua kurikulum pendidikan di negara kita. Pertanyaannya sekarang adalah apakah sistem pendidikan kita sudah mengacu ke sana? Apakah dengan dicanangkannya sistem baru, Kurikulum Berbasis Kompetensi, kelak

---

3 Pendidikan internasional seperti ini jika dilihat penerapannya di Indonesia, hampir sama dengan pendidikan pluralisme. Di tengah konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, salah satu tugas utama sekolah yang strategis dan penting adalah menanamkan sikap toleran dan inklusif sehingga relasi antarkelompok yang majemuk dapat terjalin secara harmonis dan damai. Sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi pluralistik harus dipandang sebagai salah satu indikator integral dari akhlak atau budi pekerti luhur. Salah satu prasyarat bagi terwujudnya hubungan antarkelompok yang lebih harmonis adalah menghilangkan stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok lain (Stephan and Stephan, 1996). Sekolah dapat membantu mengurangi prasangka antarkelompok ini dengan menerapkan pendidikan yang menyantuni pluralisme.

akan muncul manusia Indonesia yang berbudi luhur dan berpikiran internasional? Semua ini pekerjaan rumah kita bersama.

Beberapa hal yang menjadi ukuran efektifitas pendidikan internasional adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Frida yaitu apabila pendidikan tersebut menerapkan prinsip sebagai berikut :

1. Pendidikan itu harus seimbang, dalam arti kata, tidak akademik terus menerus, tetapi yang bersifat menyeluruh dari aspek-aspek yang ada: emosional, spiritual, kognitif, motorik, dan sosialnya.
2. Pendidikan itu harus sesuai dengan karakter anak<sup>4</sup>
3. Pendidikan itu melahirkan profil siswa yang berpengetahuan (*knowledgeable*), punya rasa ingin tahu (*inquirer*) yang berani mengambil resiko (*a risk-taker*), yang peduli (*caring*) namun tetap berprinsip (*principle*), pemikir sejati (*thinker*) yang berpikiran terbuka (*open minded*), seimbang secara fisik-mental-rohani (*well-balanced*), mampu berkomunikasi (*communicator*), juga bisa berefleksi (*reflective*).
4. Pembelajaran berdasarkan inquiry, dimana peserta didik diajak untuk mempunyai rasa penasaran akan hal-hal yang belum diketahui. Peserta didik diajak untuk berpikir dan mengalami sendiri.

<http://re-searchengines.com/art05-67.html>

---

4 Pernyataan ini mengandung makna bahwa pendidikan seyogianya memperhatikan tahap-tahap perkembangan siswa, irama perkembangan dan bioritme (ritme kehidupan secara utuh). Pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa seyogianya diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik, berpegang pada prinsip-prinsip *individualized instruction*, sekalipun dilaksanakan secara klasikal. Pendidikan yang berorientasi pada siswa seyogianya mengutamakan belajar cara-cara belajar (*learning how to learn*), dan bukan sekedar mempelajari materi ajar. Menyiapkan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa mengandung makna menyiapkan siswa untuk menjadi pelajar yang mampu belajar secara sempurna.

#### **D. PENDIDIKAN AMERIKA**

Pada umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu bisa berupa justifikasi (abash atau diakui/tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabqatan). Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi) yang ada, umumnya negara lebih memilih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda.

Hampir tidak ada negara yang menaruh perhatian cukup besar pada pendidikan untuk orang-orang dewasa. Pertanyaannya adalah; Mengapa negara lebih memilih memusatkan perhatiannya kepada pendidikan anak-anak (muda) dibandingkan dengan pendidikan orang dewasa? Heidenheimer (dalam Ulul Albab, 1990: 23) memberikan ilustrasi jawaban sebagai berikut: Bahwa sebagian negara memilih lebih mengkonsentrasikan intervensinya pada pendidikan untuk anak-anak dan remaja adalah disebabkan alasan karena negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kader-kader bangsa.

Sebagian negara yang lain memiliki alasan bahwa sekolah cukup menarik untuk dikuasai, dimana di dalamnya terdapat generasi yang sangat mudah untuk dipengaruhi. Ada juga sebagian negara beralasan karena hak suara untuk pemilihan politik di masa yang akan datang perlu proses sosialisasi, dan itu cocok dilakukan untuk anak-anak melalui sekolah-sekolahnya. Sementara

itu pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu para orang tua berbondong-bondong memasukkan anaknya di berbagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh negara.

Campur tangan dan intervensi negara pada pendidikan sekolah formal tampaknya sering diabaikan oleh para orang tua. Karena itu perlu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa (masyarakat) setempat terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah-sekolah formal agar intervensi (kebijakan) negara dalam sector pendidikan bermakna positif bagi generasi berikutnya yang lebih handal, sekaligus untuk mengurangi terjadinya peluang penyimpangan yang mungkin dilakukan negara dalam kegiatan intervensinya itu.

Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sector pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sector pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi. Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai system pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional.

Adapun tujuan system pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;
- b. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
- c. Untuk membantu pengembangan individu;<sup>5</sup>

---

5 Kebijakan ini sejalan dengan konsistensi Amerika Serikat menjadikan pendidikan sebagai hak

- d. Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat; dan
- e. Untuk mempercepat kemajuan nasional.

(<http://communicare-santi.blogspot.com/2007/08/pendidikan-di-amerika-sekolah-yang.html>)

Kelima tujuan di atas merupakan tolok ukur keefektifan pendidikan dalam perspektif Amerika, sehingga apabila kelimatujuan tersebut dapat dicapai, maka pendidikan tersebut dapat dikatakan efektif.

Sama halnya dengan Amerika, di Indonesia kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia bukan saja sekedar keinginan dan kemauan, tetapi sudah merupakan suatu keharusan. Pasca gerakan reformasi politik dicanangkan pada tahun 1998, ke depan ini bangsa Indonesia harus bangkit menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat, yang berarti sektor pendidikan harus ditempatkan pada posisi penting dan urgen. Berkaitan dengan urgensi sektor pendidikan itu maka harus dilakukan reformasi dalam pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Menurut Tilaar dalam bukunya *Membenahi Pendidikan Nasional* (<http://www.kaplaninternational.com/ind/resources/education-system/usa-guide.aspx>) ada 3 hal yang dapat menjelaskan urgensi desentralisasi pendidikan di Indonesia, yaitu :

- a. Untuk pembangunan masyarakat demokrasi;
- b. Untuk pembangunan *social capital*; dan
- c. Untuk peningkatan daya saing bangsa;

Selanjutnya uraian tentang politik pendidikan di Indonesia dapat diikuti kutipan ‘propenas diknas’ yang disistimatisasikan sebagai berikut: Pada awal abad XXI,

---

asasi, dimana ‘pembinaan’ siswa-siswi diarahkan pada usaha untuk menerapkan nilai-nilai multikultural dan mutual understanding dengan pendekatan art.

dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar.

Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antarwilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antartingkat pendapatan penduduk ataupun antargender. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi *International Educational Achievement* (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta

studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta. Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistis tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta-didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.

Sementara itu, penyebaran sumber daya manusia penelitian dengan berbagai macam dan tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, masih dirasakan kurangnya budaya berpikir kritis, penghargaan karya cipta (HAKI) yang belum memadai, kurang efektifnya sistem kelembagaan dan perangkat perundang-undangan serta sertifikasi profesi ilmiah. Berbagai permasalahan tersebut akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pendidikan yang telah diamanatkan oleh GBHN 1999-2004.

## **PENUTUP**

Pendidikan memang merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan terletak pada manusia sebagai subjek atau pelaku dari pendidikan itu sendiri. Dengan

demikian peran pendidik dan peserta didik akan sangat menentukan keberhasilan dari proses pendidikan tersebut. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat guna agar pendidikan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, sehingga pendidikan yang mampu mencapai tujuan tersebut dapat dikategorikan pendidikan yang efektif.

Strategi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan adalah strategi yang dapat mewujudkan terjalinnya hubungan yang erat dan sehat antara pendidik dan peserta didik. Pendidik bukanlah orang yang mengetahui segala tentang ilmu pengetahuan, bukan pula orang yang harus ditakuti (namun dihormati), tetapi peran para pendidik adalah sama dengan para anak didik, yakni mereka sama-sama pembelajar. Demikian sebaliknya, anak didik wajib terbuka dan berani bertanya kepada para pendidik tentang apa yang hendak diketahuinya. Para pendidik wajib memberi kesempatan kepada anak didik untuk mengutarakan ide atau pemikirannya.

Tugas para pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan harus diseting sebagai pembelajar yang sama-sama aktif, baik secara individu maupun secara kelompok. Semua proses pembelajaran wajib dimaknai, bukan hanya melihat pada product atau hasil akhirnya saja, namun process over product pun penting untuk direfleksikan. Peranan para pendidik di kelas adalah sebagai pembimbing, fasilitator/ pemandu, motivator dan juga sebagai penilai kemampuan siswa. Di sisi lain, peranan pendidik adalah sebagai pendisain dan pelaksana kurikulum, dan tentu saja sebagai manajer kelas dan anak didik.

Dalam pendidikan internasional, para pendidik harus pandai menyelipkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam semua mata pelajaran dan dalam semua kegiatan secara

berkelanjutan. Kegiatan yang dirancang haruslah sedemikian rupa sehingga anak didik tidak hanya belajar ilmu, namun juga belajar nilai. Tugas ini tentu saja bukan tugas ringan. Apalagi dengan adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita sebagai manusia, namun alangkah baiknya bila kita saling berbagi. Berbagi dalam segala informasi dan pengetahuan, sehingga semua yang kita ajarkan kepada para peserta didik benar-benar yang bermakna.

Untuk bisa mencapai pendidikan yang efektif menurut perspektif internasional, maka sudah barang tentu pendidikan yang membuat siswa memiliki pemikiran terbuka dan internasional, harus diterapkan dalam makna yang sesungguhnya dari pendidikan internasional, sehingga 'pendidikan internasional' bukan sekedar di kulit belaka, namun bisa diterapkan ke dalam semua level sekolah yang ada di seluruh nusantara.

Indonesia sebenarnya sudah memulai untuk melakukan sebuah pendekatan yang efektif terhadap pendidikan yang diharapkan. Apa yang sudah ada dan digali dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia sudah memberikan perspektif tersendiri di mata Internasional dan Amerika. Hal ini dikarenakan konsep yang diterapkan dalam pendidikan sudah sesuai dengan yang diinginkan, baik oleh bangsa Indonesia, maupun di mata dunia. Yang diperlukan selanjutnya hanyalah memberikan polesan terhadap peran pendidik dan pesera didik di dalamnya. Apapun pandangan dunia Internasional terhadap sistem pendidikan di Indonesia, Indonesia sudah melakukannya secara efektif dan terbukti banyak para ilmuawan Indonesia yang turut andil terhadap segala hal di beberapa belahan dunia Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Frida Dwiyanti, 'Pendidikan Internasional', Bagaimanakah Maknanya? (<http://re-searchengines.com/art05-67.html>), diakses tanggal 1 Mei 2011
- Kaplan Internasional Colleges, Sistem Pendidikan Amerika Serikat, (<http://www.kaplaninternational.com/ind/resources/education-system/usa-guide.aspx>), diakses tanggal 30 April 2011
- Kusuma Dewi, Konsep Pendidikan Internasional, (<http://sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia>), diakses tanggal 2 Mei 2011
- Marjohan, Tren Pendidikan Internasional (<http://re-searchengines.com/1107marjohan.html>), diakses tanggal 30 April 2011
- Ngerumpi, Menyiapkan Pendidikan Internasional dari Rumah, (<http://ngerumpi.com/baca/2011/02/16/menyiapkan-pendidikan-internasional-dari-rumah>), diakses tanggal 3 Mei 2011
- Poniman, Pendidikan yang Efektif, ([http://smpn3jember.com/v4/index.php?option=com\\_content&view=article&id=179%3Apendidikan-yang-efektif&catid=1%3Alatest-news&Itemid=181](http://smpn3jember.com/v4/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3Apendidikan-yang-efektif&catid=1%3Alatest-news&Itemid=181))
- Santi Indra Astuti, Pendidikan di Amerika: Sekolah yang Memanusiakan Muridnya, (<http://communicare-santi.blogspot.com/2007/08/pendidikan-di-amerika-sekolah-yang.html>), diakses tanggal 3 Mei 2011

# **PENDIDIKAN UNTUK ANAK BANGSA (Mencari Model Pendidikan yang Membuka Masa Depan)<sup>1</sup>**

*“Jika Anda hanya memprihatinkan keadaan setahun mendatang,  
cukuplah Anda taburkan benih.  
Jika Anda memprihatinkan keadaan sepuluh tahun mendatang,  
tanamlah sebuah pohon.  
Dan, jika Anda memprihatinkan keadaan seratus tahun  
mendatang,  
Berikanlah pendidikan yang benar kepada rakyat”.*  
*(Kata bijak dari filsof Kuan Tsu)*

## **Pendahuluan**

Anak bukanlah orang dewasa, karenanya, mereka tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa. Mereka tidak boleh bekerja dengan kerja berat seperti orang dewasa. Bila mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, mereka tidak boleh dihukum seperti orang dewasa. Anak sebagai anak mempunyai dan membutuhkan pakaian, permainan, buku dan dokter yang khas anak. Demikian pula mereka

membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan mereka secara fisik maupun psikhis.

Menurut Susanne Gaschke *Ende der Kindheit* (dalam Sindhunata (ed), 2000 : 10), anak disebut sebagai "Sebuah penemuan dari zaman pencerahan". Maksudnya, anak atau kanak-kanak "baru" ditemukan ketika manusia menemukan kedewasaan, kerasionalan, kebebasan dari belenggu mitos dan keirasionalannya. Justru karena manusia menjadi dewasa, maka ia dapat menghormati anak-anak yang kedewasaannya tidak dapat dipaksa dan dipercepat semau-maunya. Karena itu, anak sebenarnya adalah sebuah penemuan dari peradaban<sup>2</sup>. Sebuah peradaban dapat dikatakan maju, berhasil dan mulia apabila manusia-manusia yang berada di dalamnya bisa memberikan iklim dan kesempatan, di mana anak bisa berbahagia hidup sebagai anak. Sebaliknya, peradaban mundur dan menjadi biadab bila manusia-manusia di dalamnya suka memaksa anak menjadi dewasa dan besar seketika seperti kemauan mereka.

Apa yang berlaku di kehidupan dunia sekarang ini telah menggambarkan bahwa peradaban manusia telah "terluka". Dalam perkembangan yang katanya menuju ke arah kemajuan, masih dapat dilihat banyaknya anak-anak yang menderita seperti anak-anak gelandangan, anak-anak terlantar dan miskin. Gejala yang lebih menyakitkan dan membahayakan peradaban manusia adalah makin menipisnya perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak.

Kini, anak-anak berpakaian, berdandan dan bergaya seperti orang dewasa. Orang-orang dewasa tak segan-segan mengiklankan mereka dan memaksa mereka menarik simpati seperti yang dikerjakan orang dewasa. Akibatnya, banyak anak-anak lain yang menonton iklan mereka juga

terimbas untuk bergaya dan berlagak seperti mereka, beramai-ramai hendak menjadi dewasa sebelum waktunya. Jika sudah seperti ini kondisinya, maka menjadi benarliah apa yang dikatakan sosiolog Amerika, Neil Postmann yang sudah memperingatkan tentang "Hilangnya Masa Kanak-Kanak" dalam dunia yang makin modern dan maju ini.

Untuk menolong anak-anak bangsa ini, perlulah kiranya menyeimbangkan kembali makna sekolah sebagai lembaga pendidikan. Di satu pihak, sekolah adalah tempat di mana anak-anak dipersiapkan untuk menghadapi dan melayani masyarakatnya. Di pihak yang lain, sekolah juga merupakan benteng perlindungan bagi anak-anak untuk menghadapi tekanan dari masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa aman, bahagia dan bebas menikmati masa kanak-kanaknya tanpa peduli sedikit pun atas tuntutan dari masyarakatnya. Yang terakhir inilah kiranya perlu dipikirkan bagi pendidikan anak-anak, mengingat dunia ini sudah tidak banyak menyediakan tempat dan kesempatan bagi mereka untuk menikmati masa kanak-kanaknya.

### **Pendidikan yang Berorientasi pada Perkembangan Anak<sup>3</sup>**

Di sekolah, anak-anak mengalami dunia, mengaguminya dan mengidentifikasikan diri terhadapnya, lewat apa yang diceritakan dan diajarkan para guru mereka. Dengan cara inilah anak-anak menghubungkan diri dengan dunianya. Kualitas dan kedalaman hubungan ini terjadi sesuai dengan tahap-tahap perkembangan hidup mereka. Karena itu, dunia tidak bisa begitu saja dihadirkan kepada mereka secara serentak dan sekaligus tanpa memperhatikan tahap-tahap perkembangan itu.

Anak adalah manusia yang khas dan unik, mereka

harus berkembang sesuai dengan kekhasan dan keunikannya masing-masing. Penyamarataan dalam menyampaikan pendidikan adalah kesalahan yang paling besar terhadap anak. Sayangnya, hal itulah yang sering dilakukan dalam pendidikan. Bila pendidikan tidak lagi memberi kesempatan bagi berkembangnya kekhasan dan keunikan mereka, sama saja dengan pendidikan itu yang menghancurkan mereka sejak dini. Untuk itu mungkin ada baiknya penulis kutip dongeng Kak Seto<sup>4</sup> (2000 : 85) berikut ini:

Tersebutlah sebuah kisah di hutan belantara yang lebat. Di sana akan diselenggarakan sebuah sekolah untuk para hewan yang ada di hutan. Adapun mata pelajaran pokok yang akan diajarkan adalah berlari, memanjat, terbang dan berenang. Dengan demikian, semua murid yang berprestasi diharapkan akan mampu menguasai keempat mata pelajaran pokok di atas. Namun, bagaimana kenyataannya di lapangan? Mari kita lihat.

Si Kucing Hutan ternyata amat pandai dalam hal mata pelajaran berlari dan memanjat. Dengan cepat ia dapat mengejar mangsanya, bahkan sampai ke bagian atas pohon yang cukup tinggi. Namun sayangnya, ia mengalami kesulitan dalam hal mata pelajaran berenang karena ia memang sangat takut pada air. Apalagi dalam pelajaran terbang. Berkali-kali ia memanjat pohon yang cukup tinggi, kemudian mencoba melompat ke bawah bagaikan seekor burung yang hendak terbang. Tetapi, bagaimana akibatnya? Berkali-kali pula si Kucing Hitam jatuh terguling-guling di tanah dengan kesakitan karena kakinya terkilir. Akibatnya, ia malah tidak mampu berlari dan memanjat sama sekali, keterampilan yang semula amat dikuasainya dengan baik.

Lain halnya dengan si Bebek. Ia cukup mahir dalam hal mata pelajaran berenang. Terbang pun untuk jarak yang tidak terlampau jauh ia mampu. Namun untuk berlari dengan cepat, ia mengalami kesulitan. Apalagi untuk memanjat pohon. Bahkan berkali-kali ia mencoba untuk memanjat pohon, sampai akhirnya kakinya lecet-lecet dan berdarah. Usahnya sia-sia. Malah, karena luka-luka yang dialaminya, ia jadi terhambat untuk berenang dan terbang dengan lancar, yang semula amat dikuasainya dengan baik. Sayang sekali, bukan?

Pesan yang ingin disampaikan Kak Seto lewat dongeng tersebut adalah bahwa setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal inilah yang sering disebut sebagai keunikan individu. Bila keunikan ini dihargai, diterima kekurangannya sekaligus juga dihargai kelebihan-kelebihannya, maka individu itu pun akan dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bila sebaliknya, keunikan itu diabaikan, maka sebaliknya pulalah yang akan terjadi pada setiap individu.

Contoh dongeng di atas sering pula merupakan cerminan sikap orang dewasa terhadap anak-anak. Orang tua dan guru sering kurang mau memahami anak-anak sebagai individu yang unik. Kemampuan anak-anak itu lalu disamaratakan, diseragamkan dan dikolektifkan, dengan menuntut mereka agar mampu berprestasi dalam beberapa bidang sekaligus. Akibatnya, mereka sering menemui kegagalan dan akhirnya justru mengalami frustrasi.<sup>5</sup> Sebaliknya, andaikata anak-anak diperlakukan dengan sikap yang seimbang, dalam arti masing-masing dihargai kelebihannya, maka mereka pun akan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Selanjutnya, mereka akan

termotivasi untuk mempelajari hal-hal yang baru sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

Keberhasilan suatu pendidikan sering dikaitkan dengan kemampuan para orang tua dan guru dalam hal memahami anak sebagai individu yang unik, di mana setiap anak dipandang sebagai individu yang memiliki potensi-potensi yang berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi dan berharga. Mungkin dapat diibaratkan sebagai sebuah taman yang indah dengan aneka bunga yang berwarna warni, mereka akan tumbuh dan berkembang dengan keelokannya masing-masing.

### **Pendidikan yang Menghargai Pluralisme**

Sekolah mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya secara klasikal. Sekolah diharapkan mampu menjadi guiding light bagi generasi muda penerus bangsa. Adalah keliru jika kita mengasumsikan bahwa sekolah hanya berfungsi mengajarkan pengetahuan dan keterampilan saja. Sekolah juga berfungsi membentuk akhlak anak didik sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Sekolah secara langsung maupun tidak langsung niscaya mengajarkan dan mentransmisikan budaya seperti nilai-nilai, sikap, peran dan pola-pola perilaku. Sekolah harus mengajarkan kepada siswanya untuk menghargai barang milik orang lain, menghindari kekerasan, dan mematuhi hukum.

Di tengah konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, salah satu tugas utama sekolah yang strategis dan penting adalah menanamkan sikap toleran dan inklusif sehingga relasi antarkelompok yang majemuk dapat terjalin secara harmonis dan damai. Sikap toleran dan

inklusif dalam menghadapi pluralistik harus dipandang sebagai salah satu indikator integral dari akhlak atau budi pekerti luhur. Salah satu prasyarat bagi terwujudnya hubungan antarkelompok yang lebih harmonis adalah menghilangkan stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok lain (Stephan and Stephan, 1996). Sekolah dapat membantu mengurangi prasangka antarkelompok ini dengan menerapkan pendidikan yang menyantuni pluralisme.<sup>6</sup>

Masalah pluralisme<sup>7</sup> merupakan salah satu masalah yang selama ini seakan-akan terabaikan dalam merencanakan pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak didik. Padahal pluralisme merupakan suatu kenyataan yang mencerminkan masyarakat kita. Masalah inilah yang akan diangkat dengan meninjau satu aspek kecil dalam dunia pendidikan, yaitu masalah proses pembelajaran dalam kelas. Meliputi apa sajakah pluralisme dalam kelas itu ?

Anak-anak didik yang berasal dari masyarakat yang bersifat pluralistik akan membawa dengannya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari di lingkungan mereka ke dalam kelas. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, ada pula kebiasaan-kebiasaan yang kurang atau tidak baik. Masalah pluralisme akan menjadi kompleks bila kita perhatikan lingkungan yang paling dekat dengan si anak, yaitu orang tua, teman-temannya, dan kepribadian anak itu sendiri. Walaupun diharapkan bahwa anak-anak yang datang dari lingkungan yang kuat agamanya, berstatus pendidikan, atau berstatus sosial ekonomi lebih tinggi akan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Kadang-kadang malah mengecewakan. Pengaruh pluralisme tidak selalu sejalan dengan harapan-harapan

kita, tetapi kita harus menerima keberadaannya di dalam kelas. Dampak yang baik harus dipertahankan, sedangkan dampak yang negatif harus diusahakan untuk diubah menjadi lebih baik, dan untuk itu harapan ditujukan kepada guru sebagai manager proses pembelajaran di kelas.

Beberapa kebiasaan anak-anak didik sebagai dampak pluralisme adalah berkaitan dengan perihal bertanya, mendengarkan orang lain, menghargai pendapat orang lain, sikap jujur, mau menang sendiri, egois, dan lain sebagainya. Sebagian anak-anak didik ada yang berani bertanya, ada yang malu bertanya, dan ada pula yang enggan bertanya. Tetapi ada pula di antara mereka yang mau bertanya dengan melihat kondisi. Di dalam kelas misalnya, mereka yang tidak mau bertanya mungkin dikarenakan takut dianggap bodoh oleh guru dan teman-temannya. Yang enggan bertanya mungkin disebabkan karena ia tidak menaruh perhatian terhadap apa yang berlangsung di kelas. Mau atau tidak maunya anak bertanya juga ditentukan oleh cara guru mengajar. Mungkin selama ini guru tidak mempersoalkan anak didiknya mau atau tidak mau bertanya, padahal bertanya itu menunjukkan bahwa anak itu berpikir. Karena itu, guru harus mulai memperhatikan kemampuan bertanya pada anak didiknya. Kemampuan bertanya ini harus dipupuk selama proses pembelajaran, jika menginginkan anak-anak didik mau berpikir kritis.

Mau mendengarkan orang lain dan menghargai pendapat orang lain merupakan dua kebiasaan yang baik dalam bergaul dengan orang lain, apakah di dalam keluarga atau dalam organisasi di masyarakat. Sifat anak yang tidak mempunyai kedua kebiasaan ini akan mengarah pada sifat individualistis, hanya mementingkan diri sendiri. Oleh

karena itu kedua kebiasaan ini harus dilatih pada diri anak. Salah satu caranya adalah dengan membiasakan mereka belajar secara berkelompok. Gurulah yang bertanggung jawab untuk membimbing dengan bijaksana selama proses pembelajaran di dalam kelas.

Masih banyak kebiasaan yang terdapat di kalangan anak-anak didik yang tidak mungkin dibahas satu persatu. Yang harus diingat adalah bahwa kelas hendaknya merupakan suatu masyarakat kecil yang mencerminkan pluralitas dalam masyarakat luas. Kebiasaan-kebiasaan baik yang terdapat dalam masyarakat yang pluralistik ini harus ditularkan kepada semua peserta didik, sedangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sedapat mungkin dihindarkan. Dan guru adalah orang yang memegang peranan sangat penting dalam hal ini. Guru harus berusaha mengelola proses pembelajaran dengan memperhatikan keragaman, kelebihan dan kekurangan setiap anak didiknya.

### **Pendidikan yang Memekarkan Rasa**

Thomas Achenbach bersama Chaterine Hoell (dalam I Ketut Sumarta, 2000 : 179), telah membuktikan, lewat penelitiannya terhadap anak-anak Amerika usia 7 – 16 tahun, bahwa telah terjadi penurunan curam yang ajeg pada kecerdasan rasa anak-anak tersebut. Penurunan ini terjadi pada semua tingkatan ekonomi, baik yang tinggal di pemukiman mewah, maupun yang tinggal di lorong-lorong kumuh kota. Dari sini disimpulkan bahwa penurunan kadar kecerdasan rasa secara ajeg itu telah terjadi di seluruh dunia justru di tengah meningkatnya kecerdasan pikir (IQ) dan prestasi akademis. Tanda-tanda penurunan itu antara lain adalah kian tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, meningkatnya kasus kriminalitas

dan tindak kekerasan, hingga depresi, gampang putus asa, keterkucilan, kehamilan yang tak diinginkan, dan putus sekolah.

Hasil penelitian tersebut nampaknya dapat pula dilihat kenyataannya di Indonesia. Cukup sering terdengar kalimat yang mengatakan bahwa pendidikan nasional di Indonesia telah gagal membentuk manusia dewasa berwatak dan merdeka mandiri. Pendidikan nasional kita cenderung cuma menonjolkan pembentukan kecerdasan pikir dan menepikan penempatan kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan kecerdasan batin. Dari sini lahir manusia-manusia berotak pintar, manusia berprestasi secara kuantitatif akademik, namun tiada berkecerdasan rasa, tiada berkecerdasan budi sekaligus sangat berketergantungan, tidak merdeka mandiri.<sup>8</sup>

Dari Achenbach kita menjadi tahu bahwa tidak kekerasan itu senantiasa menunjukkan korelasi yang berbanding terbalik dengan kepekaan rasa. Makin peka rasa seseorang, berarti makin cerdas budinya, maka dorongan untuk berlaku kekerasan pun akan semakin terkendali. Sebaliknya, semakin tumpul kepekaan rasa, berarti budinya semakin bebal, maka tindak kekerasan akan semakin brutal. Selanjutnya, manakala kepekaan rasa sudah mati, maka kekerasan pun akan mudah meledak menjadi anarki.

Jika sudah sedemikian adanya, menjadi benarlah Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yang sudah menjadikan rasa<sup>9</sup> sebagai poros trilogi pendidikan dalam bentangan pikir (cipta), rasa dan karsa (kemauan untuk berlaku). Ki Hajar Dewantara secara konsisten menekankan pentingnya olah rasa di samping olah pikir (cipta) dan olah raga. Olah rasa menjadi penting

karena kepekaan rasalah yang akan menjadikan manusia yang berpikir bisa menjadi unggul dan berkarsa tangguh sehingga tidak semena-mena pada pihak lain. Dengan olah rasa inilah akan terbentuk manusia-manusia yang berwatak.<sup>10</sup>

Watak, karenanya, memprasyaratkan pentingnya pengendalian diri. Pengendalian diri justru berakar pada kemampuan mengolah rasa secara cerdas. Olah rasa akan mencapai hasil manakala didasari oleh dorongan kemauan (karsa) yang kuat, sehingga tindak laku tetap beada dalam kendali pikir yang sehat. Kiranya dari kerangka pendidikan rasa yang bermuara pada pembentukan watak semacam inilah, masyarakat demokratis yang menjunjung keadaban secara tulus bisa dibangun di tengah-tengah realitas yang makin beraneka ragam.

Selanjutnya Ki Hajar Dewantara mengingatkan kembali akan pentingnya memasukkan pendidikan rasa ke dalam lembaga pendidikan formal sekolah, di samping pendidikan karsa dan sudah tentu pendidikan pikir yang memang menjadi tugas pendidikan formal di sekolah. Pendidikan rasa ini dirncinya menjadi dua jenis, yakni pendidikan etis dan pendidikan estetis. Dengan pendidikan etis, bermacam-macam perasaan anak didik diharapkan dapat berkembang seperti rasa religius, rasa sosial, rasa pribadi dan lainnya. Semua itu nantinya dapat diartikan sebagai rasa cinta anak didik terhadap agama, rasa cinta terhadap hidup kemanusiaan, terhadap dirinya sendiri dan segala nilai hidup manusia sebagai makhluk yang luhur.

Adapun pendidikan estetis dimaksudkan untuk menghaluskan perasaan lewat penumbuhan rasa indah. Dengan pendidikan menghaluskan perasaan, anak-anak didik diharapkan mendapat kecerdasan yang luas dan

sempurna dari rohnya, jiwanya, budinya, sehingga mereka mendapat tingkatan yang luhur sebagai manusia.

Dengan demikian, pendidikan yang memekarkan rasa inilah yang seharusnya menjadi poros dasar, sehingga dari lembaga pendidikan formal sekolah pada akhirnya nanti akan lahir manusia muda yang berwatak dewasa dan merdeka mandiri, bukan Cuma manusia yang kaya gaya hidup namun miskin keutamaan hidup. Dan untuk memekarkan rasa ini maka pendidikan estetislah yang sepatutnya dijadikan fundamen. Pendidikan etika (termasuk moral, agama) pun sudah sepatutnya didasarkan pada pendidikan estetis ini sehingga pada diri anak didik akan tumbuh penghayatan etis (termasuk moral, agama) dalam laku, bukan semata-mata pengetahuan hapalan yang menjadikan rasa dan budi anak kering dari humanitas dan religiousitas, lebih-lebih lagi spiritualitas.

## **Penutup**

Berbicara masalah pendidikan anak kiranya tak bisa lepas dari pemahaman tentang perkembangan jiwa anak. Anak bukanlah sekedar robot yang bisa diprogram begitu saja sehingga bisa bergerak hanya atas kemauan guru atau orang tua. Anak adalah individu yang unik yang mempunyai eksistensi, yang memiliki jiwa sendiri serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan iramanya masing-masing yang khas. Pemahaman ini dibutuhkan agar para pendidik, baik orang tua maupun guru, tidak menyamaratakan dan menyeragamkan setiap anak. Agar nak dapat berkembang sesuai bakat, potensi dan cita-citanya, keunikan harus diberi tempat dan dicarikan peluang untuk dikembangkan baik di rumah maupun di sekolah.

Selain itu, yang paling penting adalah agar orang tua dan pendidik yang lain dapat memberikan kasih sayang (hati) kepada anak. Sentuhan, belaian, ciuman dan ketulusan untuk memberikan diri bagi anak adalah bentuk-bentuk kasih sayang konkrit yang dapat menumbuhkan dan memperkembangkan rasa yang ada pada diri anak. Sejak dini anak perlu dibiasakan untuk solider pada yang lemah atau yang sakit, berbagi sesuatu dengan teman-temannya yang kekurangan, suka bekerja sama, dan bertenggang rasa dengan rekan-rekannya yang lain. Dengan itu kita berharap bahwa anak akan menjadi pribadi dewasa yang matang seimbang baik pikiran maupun emosinya.

Pada akhirnya kita dapat berharap bahwa output pendidikan kita bukanlah melahirkan orang pintar yang soliter, yang sulit bergaul dan sulit bekerja sama dengan orang lain, tetapi orang pintar yang solider dan bersedia membaktikan diri bagi kemaslahatan banyak orang. Dan ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara orang tua, guru dan masyarakat. Dengan membangun kekuatan yang sinergis antara semua unsur yang bertanggung jawab terhadap tercapainya output pendidikan sebagaimana digambarkan di atas, dapat menjadi bentuk kesungguhan kita dalam menyiapkan masa depan anak-anak didik kita. Perhatian kita bersama adalah masa depan mereka.

## **CATATAN**

- 1 Pendidikan yang membuka Masa Depan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pendidikan yang lebih menitikberatkan pada kebijakan dan praktek

pendidikan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk memasuki kehidupan di masa mendatang. Tulisan yang lebih lengkap mengenai hal ini dapat dilihat dalam Syaukani HR, 2001, Pendidikan Paspor Masa Depan, Jakarta : Nuansa Madani.

- 2 Dalam perjalanan peradaban manusia selanjutnya, mereka senantiasa menjaga dan melanjutkan tradisi, kebudayaan dan keyakinan mereka melalui berbagai bentuk dan institusi pendidikan. Berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk melakukan pendidikan tersebut lambat laun memunculkan berbagai model dan institusi pendidikan yang tercatat dalam sejarah pendidikan. Institusi pendidikan itu misalnya *Academia* di Yunani, *Padepokan* atau *Pesantren* di Jawa, *Monastery* di kalangan Gereja, *Madrasah* di kalangan Masyarakat Muslim, *Santiniketan* di India, dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu institusi pendidikan yang sekarang menjadi model paling dominant adalah “sekolah” ataupun “universitas”. Lihat Mansour Fakih, dalam Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan, antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta : Insist Press, Cindelas bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001, hlm : v.
- 3 Tulisan yang hampir sama dengan judul ini ditulis oleh Dahlan, Pendidikan yang berorientasi pada Perkembangan Siswa. Pernyataan ini mengandung makna bahwa pendidikan seyogianya memperhatikan tahap-tahap perkembangan siswa, irama perkembangan dan bioritme (ritme kehidupan secara utuh). Pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa seyogianya diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik, berpegang pada prinsip-prinsip *individualized*

*instruction*, sekalipun dilaksanakan secara klasikal. Pendidikan yang berorientasi pada siswa seyogianya mengutamakan belajar cara-cara belajar (*learning how to learn*), dan bukan sekedar mempelajari materi ajar. Menyiapkan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa mengandung makna menyiapkan siswa untuk menjadi pelajar yang mampu belajar secara sempurna.

- 4 Nama lengkapnya adalah Seto Mulyadi, seorang psikolog dan pemerhati pendidikan anak. Sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- 5 Sebuah penelitian di Jerman menyebutkan, karena tuntutan yang melampaui batas kemampuan mereka, anak-anak menjadi stress. Sebanyak tiga puluh persen murid sekolah mengeluhkan gangguan sakit yang mereka derita. Ternyata keluhan mereka sama dengan keluhan yang diderita oleh para manager, yakni sulit tidur, lemah konsentrasi, sakit kepala, dan sakit perut. Anak yang berusia sepuluh tahunan bahkan mengeluhkan tentang hilangnya selera makan mereka.
- 6 Menurut Yayah Kishbiyah (2000 : 159), beberapa gagasan dasar yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan untuk menyusun metode pendidikan yang menyantuni pluralisme adalah sebagai berikut : Pertama, menjadikan Apresiasi Multikultural/ Pluralitas sebagai kebijakan nasional oleh Depdiknas, untuk kemudian diterjemahkan dan dijabarkan melalui prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi pendidikan oleh daerah sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan komunitas lokal di daerahnya masing-masing. Kedua, mengembangkan proses dan metode pembelajaran yang memanfaatkan sebanyak mungkin potensi sosial yang ada pada komunitas lokal setempat,

untuk menumbuhkembangkan social competence anak didik (secara individu) dan social capital (scara kolektif), dengan tujuan menciptakan dan memelihara harmoni dalam relasi sosial. Ketiga, menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten dalam menerjemahkan muatan etika relasi sosial, dan berfungsi sebagai role model yang nyata (living model) dalam menanamkan sikap tepa selira (empathy) dan toleransi yang inklusif pada anak didik. Keempat, memodifikasi kurikulum agar lebih banyak berisi muatan apresiasi dan toleransi terhadap budaya dan kelompok lain. Salah satu caranya adalah dengan menyisipkan muatan tersebut dalam mata pelajaran Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dasar pemikirannya adalah karena toleransi dan apresiasi terhadap kemajemukan dan perbedaan adalah bagian integral dari sikap keberagaman yang inklusif dan sikap sebagai warga negara yang santun – beradab, sehingga mata pelajaran Agama dan PKn tidak dapat menanggalkan pendidikan toleransi. Kelima, mempopulerkan program-program pertukaran budaya (*cross-cultural exchange program*) yang memfasilitasi kontak, komunikasi, interaksi dan kerjasama di antara anak didik yang berasal dari kelompok etnis dan agama yang berbeda-beda.

- 7 Masalah pluralisme dapat ditinjau dari segi makro yang menyangkut keragaman dan perbedaan yang terdapat pada bangsa kita. Pluralisme dalam masyarakat Indonesia ditinjau secara makro menyangkut antara lain agama, suku bangsa serta adat iatiadatnya, kedaerahan, status ekonomi dan status pendidikan. Kenyataan ini berdampak pada cara hidup, cara berpikir, perilaku, serta sifat-sifat setiap anggota masyarakat. Pluralisme dapat pula ditinjau dari segi mikro yang terdapat dalam masyarakat terkecil dalam dunia pendidikan, yaitu di

- kelas, tempat berlangsungnya proses pembelajaran.
- 8 Lihat I Ketut Sumarta, Pendidikan yang Memekarkan Rasa, Yogyakarta : Kanisius, 2000 : 181.
  - 9 Untuk kontek Indonesia kini, istilah kecerdasan rasa kiraanya lebih tepat daripada kecerdasan emosi, mengingat sudah sebegitu jauhnya istilah emosi dalam khazanah bahasa Indonesia disimpangkan maknanya dari kondisi atau suasana hati yang sebenarnya netral dan komplek, menjadi terbatas untuk menunjuk sikap dan perilaku yang temperamental, bahkan cenderung terbatas diartikan ”suka marah”. Dalam percakapan sehari-hari, kini istilah emosional, misalnya, sering digunakan untuk merujuk pengertian orang yang marah-marah saja.
  - 10 Sifat-sifat umum manuia berwatak antara lain adalah berintegritas antara pikir, kata, dan laku, jujur, rendah hati, disiplin, setia, menahan diri, bertenggang rasa, penuh perhatian, belas kasih, berani, adil, sabar, rajin sederhana, taat hukum, berkepedulian terhadap manusia lain, terbuka, mau menerima perbedaan (demokratis), dan menghormati keragaman sebagai keniscayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Francis Wahono, 2001, Kapitalisme Pendidikan, Antara Kompetisi dan Keadilan, Yogyakarta : Insist Press, Cindelas bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- I Ketut Sumarta, Pendidikan yang Memekarkan Rasa, dalam Sindhunata (ed), 2000, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Yogyakarta : Kanisius.

- M. D. Dahlan, Pendidikan yang Berorientasi pada Perkembangan Siswa, dalam Sindhunata (ed), 2000, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Yogyakarta : Kanisius.
- Ratna Wilis Dahar, Pluralisme dan Konstruktivisme, dalam Sindhunata (ed), 2000, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Yogyakarta : Kanisius.
- Seto Mulyadi, Pendidikan dan Masalah Perkembangan Anak, dalam Sindhunata (ed), 2000, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Yogyakarta : Kanisius.
- Sindhunata (ed), 2000, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Yogyakarta : Kanisius.
- Syaukani HR, 2001, Pendidikan Paspor Masa Depan, Jakarta : Nuansa Madani.
- Yayah Khisbiyah, Mencari Pendidikan yang Menghargai Pluralisme, dalam Sindhunata (ed), 2000, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Yogyakarta : Kanisius.

# **KRISIS PENDIDIKAN (Membedah Akar Persoalan Sistem Pendidikan di Indonesia)**

## **Pendahuluan**

Pendidikan menduduki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, sedangkan manusia merupakan kekuatan pembangunan. Oleh karena itu mutu system pendidikan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. Hanya dengan system pendidikan yang baik dan bermutu diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia.

Menurut Retno Sriningsih (1999 : 207), ada dua pandangan dasar<sup>1</sup> yang berlawanan mengenai masalah pendidikan. Di satu pihak, arti baru bagi pendidikan didasarkan pada interpretasi peranan sekolah dalam masyarakat yang mementingkan kaum feodal, dan system pendidikan dipandang sebagai salah satu "industri" vital Negara yang diarahkan untuk "menghasilkan" tenaga

---

1 Kedua pandangan dasar tentang pendidikan dalam sejarah pendidikan membawa konsekuensi dualisme, antara pendidikan kejuruan/vokasional dan pendidikan liberal, antara pendidikan spesialisasi dan pendidikan umum, antara pendidikan ilmiah dan pendidikan cultural. Dalam pengertian modern, maka pendidikan tidak memberi batas yang tegas antara kedua pandangan tersebut

manusia yang cukup terlatih di dunia yang bersaing.

Di pihak lain ada pandangan mengenai pendidikan liberal klasik yang menyatakan bahwa semua orang hendaknya dididik sepenuhnya untuk mencapai kemanusiaan yang lengkap, sehingga seluruh umat manusia dapat menyempurnakan sifat-sifatnya.

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, system pendidikan di semua negara mengalami proses perluasan, termasuk di Indonesia. Tiap system pendidikan juga mengalami perubahan, namun tidak diikuti kemampuan menyesuaikan dengan perubahan lainnya. Ketidakseimbangan terjadi antara pendidikan di satu pihak dan perkembangan lingkungan di pihak lainnya, inilah yang kemudian menimbulkan “krisis pendidikan”.

Krisis pendidikan ini juncul setidaknya dipicu oleh beberapa penyebab. Menurut Philip H. Coombs (dalam Retno Sriningsih, 1999 : 208) empat penyebab berikut nampaknya paling menonjol, yaitu (1) Meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang membawa tekanan kuat terhadap sekolah dan perguruan tinggi yang ada, (2) Kelangkaan sumber-sumber yang menghalangi system pendidikan untuk merespon lebih penuh terhadap tuntutan baru, (3) Kelambanan system pendidikan yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, dan (4) Kelambanan masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi oleh sikap mental tradisional, adap kebiasaan, dan pristise yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan pendidikan semaksimal mungkin yang menggunkana manusia terdidik untuk pembangunan nasional.

## **Kondisi Pendidikan di Indonesia**

Sebagai amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut, pendidikan sudah selayaknya menjadi prioritas yang utama. Sayangnya, sector pendidikan yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita tersebut, saat ini terus mengalami keterpurukan.

Berbagai masalah terus menerus bermunculan dan menggerogoti pendidikan di Indonesia, mulai dari rusaknya ratusan ribu ruang kelas, bangunan sekolah yang kondisinya menyedihkan<sup>2</sup>, kelangkaan guru-guru di plosok, rusaknya kesejahteraan guru, serta banyaknya murid yang putus sekolah<sup>3</sup>, hingga permasalahan yang sifatnya akademis seperti kurikulum yang masih berubah-ubah. Lebih para lagi, beragam permasalahan tersebut cenderung dibiarkan. Kondisi sector pendidikan yang menyedihkan tersebut oleh Yusuf Kalla, dinyatakan sudah dalam tarap *emergency* (gawat darurat).<sup>4</sup>

Kondisi gawat darurat itu semakin diperparah dengan cara Departemen pendidikan nasional dalam mengelola pendidikan yang tak ubahnya seperti sopir angkot mengejar setoran. Sebanyak mungkin penumpang dimasukkan, kemudian angkot dipacu sekencangnya

---

2 Sebagai contoh, pada tahun 1999, menurut Dirjen Dikdasmen, Indra Djati Sidi, sekitar 65 % dari 170 ribu bangunan sekolah mengalami kerusakan. Dalam catatan Kompas pada tahun 2000, kondisi sekolah dasar di Indonesia 23 % rusak parah. Sedangkan pada tahun 2004, sekitar 59 ribu bangunan SD rusak lihat Ade Irawan dkk, 2004 : 4

3 Masalah drop out lebih parah lagi. Ratusan ribu anak mesti bergulat di jalanan karena tak mampu melanjutkan sekolah. Pada tahun 2000/2001, dari sekitar 25 juta siswa SD, 670 ribu putus sekolah. Bahkan departemen social mencatat yang berasal dari 10 propinsi, dari ratusan ribu anak yang putus sekolah, 41 ribu di antaranya sudah menjadi anak jalanan

4 Kondisi gawat darurat tersebut disebabkan oleh dua penyakit kronis yang menggerogoti pendidikan, yaitu tidak adanya kebijakan departemen pendidikan yang konsisten dan proyektivikasi berbagai kegiatan dalam pendidikan

kemudian cepat sampai tujuan dan bila perlu melanggar rambu lalu lintas. Begitu pula Depdiknas, sebanyak mungkin mengelola proyek<sup>5</sup> secepatnya diselesaikan, lalu mencari proyek yang baru.

Memproyeksikan suatu kegiatan tidak selamanya salah, namun apabila kegiatan proyek dikawinkan dengan system borokrasi yang kaku dan dikendalikan dari atas, maka terbukalah peluang-peluang yang besar untuk korupsi. Tujuan proyek yang baik dan bagus dengan setidaknya akan menghilang dan digganti dengan pertimbangan-pertimbangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akhirnya yang menjadi korban adalah anak didik dan generasi Indonesia masa mendatang.

### **Mengurai Benang Kusut Pendidikan**

Permasalah yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia dapat diibaratkan sebagai benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Banyak yang beranggapan bahwa minimnya dana sebagai permasalahan utama, tetapi tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang terlalu sentralistik dan mengabaikan keberagaman daerahlah yang menjadi penyebab utama timbulnya berbagai persoalan pendidikan di Indonesia.

Ibarat kendaraan roda dua, maka bensin adalah bahan baker yang dapat membawa kendaraan tersebut sampai ketempat tujuannya. Begitu juga halnya dengan pendidikan, maka anggaran adalah bensinnya. Perjalanan yang harus ditempuh untuk dapat membangun pendidikan

---

5 Ciri utama kebijakan berbasis proyek adalah : *easy come, easy go*, ada uang proyek disayang, tak ada uang proyek ditandang. Selain itu, karena dalam pembuatan kebijakan, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan birokrasi, maka partisipasi masyarakat termasuk guru tidak diperlukan. Begitu juga dalam pelaksanaan yang tidak diiringi tansparasi dan akuntabilitas. Lihat Ade Irawan dkk, 2004 : xiii - xiv

sangatlah jauh, sedangkan anggaran yang disediakan terlalu sedikit. Rendahnya anggaran tidak sejalan dengan tingginya kebutuhan dana untuk menjalankan pendidikan. Akibatnya, wajar jika pada akhirnya minimnya dana tersebut berimbas pada mutu pendidikan.<sup>6</sup>

Sedangkan HAR Tilaar (2000) berpendapat bahwa masalah pokok pendidikan muncul justru karena terlalu nominannya campur tangan pemerintah. Dalam perjalannya, Pendidikan Indonesia selalu di bawah kungkungan penguasa, digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. Pendidikan, pada akhirnya menjadi alat kekuasaan dan bersifat militeristik. Hal ini ditunjukkan dengan penyeragaman pakaian sekolah SD – SLTA dan sentralisasi kurikulum.<sup>7</sup>

Berbeda apa yang dikatakan HAR Tilaar, dalam pandangan Winarno Surakhmad, mantan rektor Institut keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, masalah utama pendidikan di Indonesia adalah tidak dimilikinya landasan dan tujuan yang jelas. Ketidajelasan tujuan bias dilihat dari ketidakkonsistenan kebijakan yang digulirkan pemerintah. Tiap ganti menteri pendidikan, akan ganti pula kebijakannya. Sebagai contoh, cara belajar siswa aktif (CBSA) hanya dilaksanakan sewaktu Fuad Hasan menjadi menteri, tapi ketika WrdimanDjojonegoro

---

6 Menurut ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Moch. Surya, minimnya anggaran terutama yang dialokasikan untuk guru pada akhirnya berdampak pada mutu pendidikan. Pendapat Surya ini di dukung oleh beberapa penelitian yang dibuat perguruan tinggi terkenal di ASS seperti Cornell University, Harvard University, Yale University dan Ohio State University menunjukkan adanya hubungan positif antara besarnya dana pendidikan dengan kinerja pendidikan. Makin tinggi dana pendidikan, makin baik kinerja pendidikan. Sebaliknya, makin rendah dana pendidikan, makin buruk kinerja pendidikan. Lihat Ade Irawan dkk, *Mendagangkan Sekolah*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2004, hlm. 11 – 12

7 Padahal sentralisasi merupakan kerangka politik untuk menyeragamkan pola piker, sikap dan cara bertindak siswa. Selain itu, sentralisasi juga menceraabut kebhinikaan yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia, yang berakibat pada tercerabutnya siswa dari praktek budaya dan kebutuhan real siswa di tempat tinggalnya

menggantikannya, CBSA diganti dengan *Link and Match*.<sup>8</sup>

Pada akhirnya, ketidakjelasan tujuan membuat pendidikan Indonesia tidak jelas arahnya. Walaupun dibuat berbagai kebijakan, yang bagus dan dikukung dengan sumber pendanaan yang besar, tapi karena tujuan dan dasar berpijaknya tidak jelas, pada akhirnya sering kandas di tengah jalan.

Menurut Roem Tapanimasang (2001), mengumpulnya permasalahan pendidikan, mulai dari pendanaan, besarnya campur tangan hingga ketidakjelasan tujuan, sangat berpengaruh terhadap sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi alat untuk mencerdaskan, memberi keterampilan, bahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tidak lebih dari tempat indoktrinasi. Sekolah hanya menjadi tempat pewarisan dan pelestarian nilai-nilai resmi yang sedang berlaku dan direstui oleh pemerintah. Tidak aneh jika terjadi penyeragaman mulai dari pakaian hingga mata pelajaran.<sup>9</sup>

Anehnya, ketergantungan masyarakat terhadap sekolah semakin bertambah. Padahal sekolah buka satu-satunya institusi tempat tempat peserta didik belajar. Namun dalam kenyataannya, hanya sekolah yang direpresentasikan sebagai tempat berlangsungnya pendidikan. Bahkan, masyarakat menganggap telah menyelesaikan kewajiban

---

8 Konsep *Link and atch* (keterkaitan dan kesepadanan) dikemukakan oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Djojonegoro dalam Rapat Kerja Nasional Departemen tersebut pada tahun 1993 dengan maksud agar program pendidikan di sekolah relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunana di dunia industri dan dunia usaha. Dengan kata lain, agar para lulusan mendapat bekal kemampuan, sikap dan keterampilan dasar yang sesuai dengan kemampuan, Sikap dan kerampilan dituntut oleh dunia kerja.

9 Lihat Roem Tapanimasang , *Sekolah itu Canda*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. Bandingkan dengan Ainurrafiq Dawam yang menyamakan sekolah dengan penjara. Tempat kaum muda yang kreatif yang kritis dibius kesadarnta, diajarkan membuat proyek proposal yang dananya bias dikorupsi. Akhirnya muncullah “generasi sarimin” yang bermental budak-kuli-babu. Lihat pula Ainurrofiq Dawam, *Emob Sekolah, menolak komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Inspela Press, 2003

mendidik setelah menyekolahkan anaknya. Kewajiban dianggap tinggal menyelesaikan urusan administrasi atau financial dengan sekolah.<sup>10</sup>

Tingginya permintaan pada sekolah membuat nilai jual institusi ini semakin mahal. Tak jarang sekolah diposisikan sebagai komoditi bagi para pelaksananya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai komoditi, mereka yang bias memberi uang banyak akan mendapat pelayanan terbaik, sedangkan mereka yang tidak memiliki uang jangan berharap bias sekolah.

Pada akhirnya sekolah akan menciptakan jurang pemisah antara mereka yang kaya dan miskin. Keadaan tersebut memberi gambaran bahwa telah terjadi pergeseran orientasi, visi, maupun idiologi dalam sekolah yang berakibat ancaman eksistensi manusia itu sendiri.<sup>11</sup>

## **Mencari Akar Permasalahan Bangsa**

Andreas Harefa, dalam bukunya *Menjadi Manusia Pembelajar* (2000), telah menunjukkan sikap kritis terhadap lembaga pendidikan dan sisitem pendidikan di tanah air. Pertanyaan kunci yang diajukannya adalah : Apakah akar permasalahan dalam sisitem pendidikan kita? Pertanyaan ini kemudian terjawab bahwa, akar permasalahan dalam system pendidikan di negeri ini adalah karena sekolah dan universitas telah dipisahkan dari soal-soal kehidupan nyata sehari-hari. Ia telah berubah menjadi semacam “sekolah militer”, ajang indokrinasi dan aderisasi” manusia-manusia

---

10 Perhatikan pula apa yang dikatakan Ainurrafiq Dawam (dalam Andreas Harefa) sebagai berikut: “Hampir semua orang di negeri ini berpikiran bahwa belajar itu sekolah. Orang dikatakan sedang belajar (dalam arti yang sesungguhnya), ya pada saat bersekolah. Selain di sekolah, dikatakan belum belajar. Makanya orang menyebut kaum terpelajar itu, ya mereka yang pernah mengenyam bangku sekolah”.

11 Lihat Mansour Fakhri dalam Fransis Wahono, Kata Pengantar buku *Kapitalisme Pendidikan, antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta: Insist Press, 2001

juda yang belajar untuk “patuh” sepenuhnya kepada “komandan” (termasuk guru dan dosen). Tak ada ruang yang cukup untuk bereksperimentasi, mengembangkan kreativitas, dan belajar menggugat kemampuan *status quo* yang membelenggu dan menjajah jiwa. Semua serba terpola, terprogram, teratur dan dapat dikontrol.<sup>12</sup>

Selain itu Winarno Surakhmad (Kompas, 3 Pebruari 2000) juga telah berhasil merumuskan akar persoalan dasar yang menjadi biang keladi dari semua bentuk impotensi, pemasangan, pengkerdilan, dan penjajahan manusia-manusia Indonesia oleh bangsa sendiri. Ia mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pendidikan selama ini malah menjadi sumber masalah dari pada potensi pemecah masalah. Di sisi lain dari tahun ketahun perubahan yang dilakukan pemerintah hanyalah berupa kosmetik, atau sekedar diobok-obok. Padahal yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar, yakni pada landasan falsah pendidikan itu sendiri yang selama ini nyaris tak pernah dibicarakan oleh penyelenggara pendidikan nasional

Dalam benak sebageian dari kita masih bersarang virus kependidikan yang lebih gemar melihat kebelakang dan mengukur keberhasilan dari pencapaian masa lalu, bukan dengan potensinya yang relevan terhadap tantangan masa mendatang. Visi pendidikan bagi orang seperti itu adalah pendidikan yang berusaha menciptakan pemasangan bangsa yang direduksi menjadi bonsai sama sebangun dalam nalar, aspirasi, sikap dan tutr kata bahkan dalam mimpi mereka.

Apakah sumbangan pendidikan semu sejauh ini? Nihil. Terbukti sebuahn ilusi skala nasional itu tidak dapat

---

12 Lihat Andreas Harefa, *Menjadi Manusia Pembelajar*, Jakarta : Harian Kompas, 2000, hlm. xxv - xxvii

mengklaim mampu memberikan daya tahan ekonomis, daya tahan moral, bahkan daya nalar sekalipun pada bangsa ini ...tiadanya kemampuan berbuat jujur, berpikir sehat, bertutur sopan mulai dari rakyat sampai elit politik yang berkuasa.

Sekarang hamper tidak ada sisa pengaruh yang menunjukkan bahwa bangsa ini telah (pernah) besar atau dibesarkan oleh pendidikan di masa lalu.

Falsafah pendidikan yang baru nanti harus dikaitkan dengan aspirasi berbangsa seperti tertuang dalam konstitusi negara, mengaitkannya dengan konsep ketahanan, keutuhan, kerukunan, dan kesatuan bangsa. Di sinilah kita berharap menemui apa yang seharusnya menjadi esensi pendidikan yang kita perlukan secara konsisten. Kita butuh fondasi yang kuat untuk dapat membangun pendidikan nasional yang kuat.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, Winarno ingin menunjukkan bahwa akar persoalan yang memporak-porandakan negeri ini adalah ketidakjelasan (atau ketiadaan) visi-visi pendidikan nasional dan pengacauan serta pemisahan makna pendidikan (*educating*) menjadi sekedar pengajaran (*teaching*) dan pelatihan (*training*).

## Penutup

Agar system pendidikan dapat mengatasi situasi sebagaimana tergambar di atas, maka ia harus mendapatkan bantuan dari semua sector kehidupan di dalam masyarakat lingkungannya. Ia membutuhkan tenaga-tenaga yang paling baik yang terdapat dalam masyarakat, tidak sekedar melanjutkan keadaan pendidikan sekarang, tetapi untuk

---

<sup>13</sup> Winarno Surakhman, Rumuskan Visi Pendidikan Nasional bagi Seluruh Bangsa, Kompas, 3 Februari 2000.

meningkatkan mutu, efisiensi dan produktivitasnya. Diperlukan guru, bangunan, perlengkapan dan alat-alat pengajaran yang lebih banyak dan lebih baik sehingga diperlukan biaya yang lebih besar. Yang lebih penting lagi, diperlukan ide-ide keberanian, dedikasi dan kesediaan untuk menilai diri pribadi, yang didukung oleh kemauan dan keberanian untuk berubah.

Dengan kata lain, untuk mengatasi “krisis pendidikan”, di samping factor sarana prasarana dan dana, lebih penting lagi adalah factor kualitas manusia. Jika suatu bangsa tidak bisa mengembangkan sumber daya manusia, ia tidak akan dapat mengembangkan apapun. Karena itu pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu kondisi yang sangat penting untuk semua pertumbuhan.

Sebagai ilustrasi dapat dibuktikan oleh bangsa Jepang sebagai negara yang serba terbatas sumber-sumber alamnya, namun berhasil membuat investasi yang cerdas dalam system pendidikannya. Pada akhirnya Jepang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, penuh keberanian dan kemauan untuk meniali secara objektif dan krisis atas segala kelemahan dan keterbatasan dirinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ade Irawan, dkk, 2004, *Mendagangkan Sekolah*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch.

Ainurrofiq Dawam, 2003, *Emoh Sekolah, Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : Inspela Press.

- Andrias Harefa, 200, *Menjadi manusia pembelajar (On Becoming A Learner)*, Jakarta : Harian Kompas.
- Francis Wahono, 2001, *Kapitalisme Pendidikan, antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta : Insist Press.
- Retno Sriningsih Satmoka, 1999, *Landasan Kependidikan (Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan pancasila)*, Semarang : IKIP Semarang Press.
- Roem Patimasang, 2001, *Sekolah itu Candu*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

# **PENDIDIKAN GENDER DALAM KELUARGA: (Antara Peluang dan Tantangan dalam Sosialisasi)**

## ABSTRACT

*One of the factors causing gender inequalities, feminists would posit, is the overlapping of the meaning of gender and sex. Gender is misunderstood as having the same meaning as sex. Whereas these two terms are different. Gender is men`s and women`s characteristics that socially constructed, whereas sex is more about biological differences between them. Therefore, illuminating the meaning the meaning of these two terms is a-must to minimize gender inequalities.*

*Family institution is the primary and first place to socialize the different meaning of these two terms. Parent can apply many methods to do this socialization, among others are: being a role model, avoiding the discrimination toward sons and daughters, and sharing a better information about gender.*

*However, it must be noted that the socialization within family always face many constraints, for example: different cultural expectation for both sexes, strict divisional roles of men and women through many policies, insufficient information about gender from parents, deep gender biased of religious interpretation, and*

*ineaduate of women`s ability, motivation, and aspiration to shift the current condition.*

## **PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia. Dalam bentuk dan strukturnya yang paling mendasar, sebuah keluarga pada umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak mereka yang biasa tinggal dalam satu rumah, yaitu rumah tangga.<sup>1</sup> Menurut Ahmad Tafsir (1994 : 155), dalam pandangan Islam, keluarga atau rumah tangga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka orangtua lah yang menjadi pendidik pertama dan utama. Kaidah ini ditetapkan secara kodrati, dimana orangtua tidak dapat menolaknya, dalam keadaan bagaimanapun juga. Mengapa demikian? Karena mereka ditakdirkan menjadi orangtua dari anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, mau tidak mau, mereka harus menjadi penanggung jawab pertama dan utama. Kaidah ini diakui oleh semua agama dan semua sistem nilai yang dikenal oleh manusia.<sup>2</sup>

Dengan demikian, peran mendidik anak bukanlah mutlak kewajiban seorang ibu, tetapi juga ayah. Bahkan di dalam Al-Quran, banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan besarnya peran ayah dalam pendidikan anak. Contoh yang paling jelas adalah kisah Luqman<sup>3</sup>

---

1 Lihat Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: Refika Aditama, 1998), 56.

2 Lihat juga Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak dalam Mengembangkan Disiplin Diri (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 10.

3 Lihat surah Luqman/31 : 13 – 19.

ketika memberi nasehat kepada anak-anaknya. Begitu pula kisah Nabi Sulaiman yang dididik ayahnya, Nabi Daud yang dididik khusus untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai raja, atau Nabi Yusuf yang mendapat curahan kasih sayang dari Nabi Ya`cub sehingga membuat iri saudara-saudaranya yang lain, merupakan kisah yang menceritakan besarnya peran ayah dalam pendidikan anak. Adapun Rasulullah sendiri, meskipun ditinggal oleh ayahnya sejak dalam kandungan, tapi peran sang ayah ini tergantikan oleh kakek dan pamannya yang mengasuh beliau sejak kecil. Kisah-kisah tersebut sangat jelas menggambarkan kepada kita peran sang ayah dalam pendidikan anak-anaknya.<sup>4</sup>

Dalam mendidik dan memperlakukan anak-anak, orang tua hendaknya tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Orang tua harus berlaku adil kepada mereka dalam segala hal (Abdullah Nashih Ulwan, 1999 : 37-38), sebab anak merupakan amanat bagi orang tuanya. Sebagai amanat, baik buruknya perkembangan kepribadian, karakter, sikap dan tingkah laku anak, sangat bergantung kepada baik-buruknya pembiasaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian dan pendidikan anak dalam keluarga.

Peran orang tua yang dominan dalam mendidik anak di keluarga, memberikan peluang yang sangat besar bagi tersosialisasinya gender. Yang menjadi persoalannya adalah bahwa umumnya orang tua tidak memahami bahkan tidak mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender dan dampak yang ditimbulkan

---

4 Tentu saja hal ini tidak terlepas dari tarbiyah Rabbaniyyah (pendidikan langsung dari Allah) mengingat tugas-tugas mereka sebagai Nabi dan Rasul.

oleh bias gender<sup>5</sup> tersebut. Ketidaktahuan orang tua tersebut menyebabkan anak diajarkan, ditunjukkan, dan diberi peran atau tanggung jawab yang sesuai dengan yang dianggap sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Contoh konkretnya adalah seperti tugas perempuan itu bekerja dalam rumah, memasak, mencuci, membersihkan rumah, mendidik anak, menjahit, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah, menjadi pemimpin keluarga, menyetir, membetulkan genteng, memanjat pohon, dan lain sebagainya.

Realitas inilah yang kemudian mendorong penulis untuk menggali lebih jauh bagaimana tantangan dan peluang dalam mensosialisasikan gender dalam keluarga. Tapi sebelumnya, perlu penulis jelaskan terlebih dahulu perbedaan sex dan gender. Hal ini penting untuk disosialisasikan agar para orang tua dan pembaca pada umumnya dapat memahami, mana yang kodrati dan mana yang konstruksi sosial / masyarakat (*social construction*). Perbedaan term sex dan gender dengan jelas dapat merubah pola pikir dan pola asuh orang tua dalam mendidik, menunjukkan dan memberi peran kepada anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan telaah terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses sosialisasi tersebut, dan terakhir akan dikemukakan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan keadilan gender yang dimulai dari lingkungan keluarga.

---

5 Bias gender adalah sebuah pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu, misalnya lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada perempuan atau sebaliknya. Sebagai contoh, pandangan atau sikap yang terlihat dalam gagasan-gagasan bahwa laki-laki itu lebih kompeten, lebih mampu, lebih superior daripada perempuan

## **JENIS KELAMIN (SEX) VERSUS GENDER**

Konsep penting yang harus dipahami ketika berbicara tentang sosialisasi gender adalah memisahkan dua konsep utama yaitu jenis kelamin dan gender. Dengan membedakan kedua konsep yang sering disalahfahami ini maka diharapkan para orang tua mengetahui mana sesungguhnya yang kodrati dan yang bukan kodrati bagi laki-laki dan perempuan.

Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Misalnya, bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan manusia yang berjenis kelamin perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Secara biologis, semua yang disebutkan di atas melekat selamanya pada manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Artinya, secara biologis, semua yang dimiliki dan melekat pada manusia jenis kelamin laki-laki tidak akan bisa dipertukarkan pada manusia jenis kelamin perempuan, begitu pula sebaliknya. Inilah yang dinamakan ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati.

Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang memiliki fisik kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat ini sendiri sebenarnya merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional,

lemah lembut dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, perkasa, dan lebih mengedepankan rasio daripada emosionalnya. Perubahan ciri dari sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan inilah yang dinamakan sesuatu yang bukan kodrati<sup>6</sup>.

Contoh konkrit dari pemahaman gender di atas dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Misalnya, dalam masyarakat yang sistem patriarki, meletakkan laki-laki sebagai penguasa dan pengambil kebijakan, sedangkan kaum perempuan tidak memiliki akses yang signifikan dalam semua lini kehidupan. Mereka ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki, karena dianggap sebagai *the second sex*, sehingga mereka juga harus ditempatkan sebagai *the second class*.<sup>7</sup> Gambaran perempuan Sasak, Jawa, Makasar dan lainnya dapat mewakili potret perempuan yang lemah (dilemahkan).

Adapun masyarakat penganut sistem matriarki, mereka meletakkan perempuan sebagai pengambil kebijakan dan bahkan sebagai penguasa dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, suku Minangkabau<sup>8</sup> dapat diangkat sebagai potret perempuan yang dominan. Ini

---

6 Lihat Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 7-9. Lihat juga Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Quran (Jakarta: Paramadina, 1999), 33-36, dan Nurul Agustina & Lies Marcoes, Gender, Jilid 6,7, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), 175.

7 Lihat Nikmatullah dkk, Relasi Gender dalam Tradisi Masyarakat Pesantren di NTB (Mataram: PSW STAIN Mataram, 2004), 12.

8 Perempuan di Minangkabau memiliki peran dan tugas sebagai kepala rumah tangga, mewarisi tanah, tiang utama ekonomi masyarakat, hasil jerih payah mereka secara langsung menjadi harta yang diwariskan dan menjaga keutuhan klan (yakni suatu pengelompokan sosial yang ditentukan berdasarkan silsilah keluarga perempuan). Sedangkan laki-laki memegang kendali semua urusan sosial masyarakat dan dipilih atas dasar kehormatan dan ketinggian reputasi klan. Tidak mengherankan jika kemudian banyak laki-laki Minangkabau yang pergi meninggalkan kampung halamannya secara sukarela bahkan mengasingkan diri sebagai akibat ketidakberdayaan mereka untuk mengatur urusan ekonomi. Lihat Askiah Adam, "Islam dan Hak-hak Perempuan: Perspektif Asia Tenggara" dalam Menakar "Harga" Perempuan (Bandung: Mizan, 1999), 41.

berarti bahwa pada waktu tertentu perempuan dapat lebih kuat dari laki-laki dan pada waktu yang lain menjadi "jajahan" laki-laki. Kondisi seperti ini sangat tergantung pada tempat, situasi dan kondisi zaman.

Dalam tabel berikut dapat dilihat secara jelas perbedaan antara jenis kelamin dan gender :

No	Jenis Kelamin (Sex)	Gender
1.	Merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan	Merupakan perbedaan peran, hak, kewajiban kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
2.	Perbedaan sex sama di seluruh dunia bahwa perempuan menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki tidak, sifatnya universal.	Gender tidak sama di seluruh dunia, tergantung dari kultur dan perkembangan masyarakat di suatu wilayah, sifatnya lokal.
3.	Perbedaan sex tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Dari dulu sampai sekarang dan masa yang akan datang, laki-laki tidak akan bisa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.	Gender berubah dari waktu ke waktu., dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari suatu class ke class yang lain.

Menurut Mansour Fakih (2001 : 9), sejarah munculnya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan-

perbedaan tersebut kemudian dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan (tafsir keagamaan) dan negara. Melalui proses yang panjang, sosialisasi perbedaan gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis, tidak bisa diubah, sehingga kemudian perbedaan-perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Lebih lanjut Mansour Fakih (2001 : 12) mengatakan bahwa ”Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan”.

Dampak yang dimaksud dapat dilihat dalam beberapa manifestasi ketidakadilan gender (Mansour Fakih, 2000 : 46-48) sebagai berikut :

1. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan.<sup>9</sup>
2. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik.
3. Pembentukan stereotype<sup>10</sup> atau pelabelan negatif.
4. Kekerasan (*violence*), baik secara fisik<sup>11</sup> maupun non fisik<sup>12</sup>.

---

9 Hal ini dapat dilihat dari adanya pertukaran peran dari perempuan petani yang kemudian digeser dengan munculnya alat-alat pertanian modern yang diasosiasikan dengan keahlian laki-laki. Selain itu adanya ketentuan yang melarang perempuan untuk bekerja pada malam hari, sehingga berakibat pada penurunan income yang akan didapatkan oleh perempuan.

10 Stereotype yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan, khususnya bagi kaum perempuan.

11 Seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan

12 Seperti pelecehan seksual yang mengakibatkan terusnya emosional sang korban.

## 5. Beban kerja yang panjang dan lebih banyak (*burden*)<sup>13</sup>

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut di atas tidak bisa dipisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan secara dialektis. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan menyebabkan kekerasan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan dan visi kaum perempuan sendiri. Karenanya, agar peran perempuan dapat dimaksimalkan, pemahaman tentang gender mutlak diperlukan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh karenanya, tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa gerakan kesetaraan dan keadilan gender itu merupakan upaya merusak tatanan masyarakat yang telah baku. Yang benar adalah, kesetaraan dan keadilan gender menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi.

## **PERAN ORANGTUA DALAM SOSIALISASI**

Keluarga mempunyai peranan penting karena dipandang sebagai sumber pertama dalam proses sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai transmitter budaya, atau mediator sosial budaya bagi anak. Lebih dari itu, keluarga juga dipandang sebagai instansi yang dapat memenuhi kebutuhan insan, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya.

Melalui proses sosialisasi, seseorang akan terwarnai cara berpikir dan bertindakya melalui kebiasaan-

---

13 Ini terjadi karena anggapan dan kebijakan dari pemerintah yang menegaskan bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga. Konsekwensinya adalah segala urusan domestic menjadi tanggung jawab perempuan. Apabila perempuan bekerja di luar umah, maka selain ia harus mengerjakan pekerjaan kantor, ia juga harus mengerjakan dan membereskan pekerjaan rumah. Ini disebabkan anggapan bahwa pekerjaan rumah adalah tanggung jawab utama bagi sang isteri, sedangkan pekerjaan di luar rumah adalah bentuk bantuan isteri kepada suami. Anggapan dankebijakan ini telahmenyebabkan perempuan harus bekerja ganda dan menghabiskan waktu yang lebih panjang daripada laki-laki. Bahkan perempuan bekerja dari terbit matahari sampai terpejamnya mata suami.

kebiasaan hidupnya. Dengan demikian, sosialisasi gender yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dalam keluarga akan mempengaruhi pola pikir dan persepsi anak tentang peran mereka dalam keluarga. Jika pola pikir dan persepsi mereka telah terbentuk, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkannya dalam tingkah laku dan pola interaksi mereka.

Ada beberapa pola sosialisasi yang perlu ditempuh orangtua untuk menanamkan pemahaman tentang gender kepada anak, antara lain dengan :

### **1. Keteladanan**

Orang tua harus memberikan keteladanan atau contoh kepada anak-anaknya. Anak-anak akan meniru dan mengidentifikasi perilaku orang tua ke dalam diri mereka. Jika mereka selalu melihat aktivitas ibu selalu di dapur untuk memasak dan menghidangkan makanan, mencuci pakaian, menyapu dan merawat rumah, serta mengasuh anak, sedangkan aktivitas ayah bekerja di luar rumah, dibuatkan minuman, dilayani, pengambil keputusan dan lain sebagainya, akan membentuk pola pikir atau persepsi anak bahwa apa yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya merupakan peran dan tanggung utama sebagai laki-laki dan perempuan.

Persepsi ini kemudian akan melekat dalam diri anak dan akan diterapkan kelak ketika mereka sudah dewasa dan berumah tangga. Pembakuan peran semacam ini akan terus berlangsung dan mengakar jika tidak dimulai dengan “reposisi peran” yang dapat dilakukan dengan membiasakan ayah ikut terlibat dalam urusan-urusan rumah tangga yang sudah biasa dilakoni seorang ibu. Begitu pula sebaliknya, seorang ibu dapat bergandengan

tangan bersama-sama ayah saling bahu membahu dalam menopang kehidupan keluarga.

Dengan demikian, anak-anak akan memiliki persepsi bahwa ruang privat/domestic bukan semata-mata urusan ibu dan ruang publik bukan urusan ayah belaka. Dengan keteladanan ini, anak secara tidak langsung akan memiliki persepsi bahwa laki-laki dan perempuan harus saling bahu membahu dan satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Pada akhirnya, persepsi semacam ini dapat menghindarkan terjadinya ketidakadilan yang ditimbulkan oleh bias gender tersebut.

## **2. Pembiasaan**

Orangtua harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak diskriminatif terhadap anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, membiasakan anak laki-laki dan perempuan untuk mengerjakan tugas-tugas domestik secara bersama-sama, membiasakan mereka bersikap lemah lembut, santun, bekerja keras untuk mencapai tujuan, disiplin, tidak cengeng, mandiri dan sebagainya. Jika pembiasaan yang diberikan kepada anak tidak diskriminatif, maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang baik sehingga mampu berinteraksi dengan harmonis, karena pembiasaan yang mereka dapatkan dari keluarga telah mengilhami mereka untuk saling menghargai dan mengayomi satu sama lain.

Sebaliknya, jika mereka tidak dibiasakan dari kecil, mungkin mereka hanya tahu yang baik dan buruk, tapi tidak mampu melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Di sinilah pentingnya membiasakan hal-hal yang baik kepada anak sejak dini.

### **3. Mengajarkan pengetahuan tentang gender dan mendialogkan persoalan-persoalan yang terjadi akibat bias gender.**

Menanamkan pengertian gender kepada anak-anak sangat penting dilakukan orangtua, dan dialog merupakan cara yang paling tepat. Hal ini bisa dilakukan ketika berada di meja makan atau sedang berkumpul di ruang keluarga sambil menonton TV. Jika kebetulan acara yang ditonton menayangkan berita-berita mengenai ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan seperti trafficking, perkosaan, penyiksaan suami kepada isteri, tenaga kerja wanita yang dieksploitasi dan tidak mendapat gaji, dan kasus-kasus yang lainnya, maka moment seperti ini menjadi sangat strategis untuk menularkan pemahaman tentang gender dan mendialogkan peristiwa-peristiwa yang sedang ditonton dengan memakai perspektif gender.

Orangtua dapat menjelaskan kepada anak bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di mata Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Allah dengan tegas menyebutkan bahwa perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan, tidak dapat menentukan dan menjadi ukuran untuk melihat derajat seseorang. Bahkan Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menyerukan dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Mereka sama-sama mendapatkan pahala dan harus menanggung dosa dari kejahatan yang diperbuat. Dengan sharing pemahaman seperti ini dan mendialogkan kasus-kasus yang terjadi dengan perspektif gender, dapat membantu anak memahami tentang gender dan dampak yang ditimbulkan dari adanya bias gender.

#### **4. Menyediakan bahan bacaan atau media lainnya yang berperspektif gender**

Cara ini memang agak sedikit sulit karena biasanya buku, majalah, koran, VCD ataupun kaset, jarang sekali yang berspektif gender. Apalagi ditambah dengan buku-buku agama yang kebanyakan mengandung nuansa *fiqh oriented*, terkesan justru mendiskreditkan perempuan dan lebih mengutamakan laki-laki. Bahkan, buku-buku ajar yang menjadi pegangan para siswa banyak memuat rumusan kalimat, penjelasan dan gambar yang mencerminkan ketidaksetaraan gender.

Walaupun agak sulit, bukan berarti orangtua tidak bisa mengupayakannya. Justru seharusnya kondisi seperti ini memicu semangat orangtua untuk bisa mengatasi dan menyediakan media tersebut. Hal ini menjadi penting, karena media-media tersebut sangat efektif untuk dapat mempengaruhi cara pandang dan pola pikir anak.

Demikianlah beberapa pola yang menurut hemat penulis dapat diterapkan atau dilakukan dalam proses sosialisasi gender dalam keluarga. Dengan adanya pola-pola tersebut diharapkan dapat terwujud kesetaraan gender yang dibangun dan dimulai dari keluarga. Bukankah keluarga yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik? Bukankah masyarakat yang baik dapat mewujudkan kondisi Negara yang baik pula? Kita semua tentu berharap semua itu dapat terwujud.

#### **TANTANGAN DALAM SOSIALISASI**

Selain peluang yang dapat diisi oleh keluarga dengan menerapkan beberapa pola sosialisasi gender sebagaimana disebut di atas, tantangan dan hambatan

pun selalu ada dan muncul pada saat sosialisasi gender dilaksanakan. Adalah sangat wajar bila kemudian terjadi pro dan kontra terhadap sosialisasi gender. Apalagi ketika gender dipersoalkan dan dipakai untuk menganalisa<sup>14</sup> berbagai ketimpangan dan ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan dalam segala lini kehidupannya.

Sebagai sebuah alat analisis yang baru, tentu proses sosialisasi gender mengalami banyak tantangan dan hambatan yang memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga yang besar untuk dapat melampauinya atau paling tidak dapat memahamkannya kepada anak dalam lingkungan keluarga. Tantangan dan hambatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

### **1. Tata nilai sosial budaya masyarakat**

Masyarakat umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Ini disebabkan oleh budaya patriarki yang sudah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat selama ini. Apa yang tertanam dengan sangat kuat dan kokoh, sangat susah untuk dirubah. Perlu waktu yang sangat panjang dan kesabaran yang luar biasa sehingga sosialisasi gender ini dapat terwujud.

Mempersoalkan posisi perempuan berarti mempersoalkan tatanan sosial budaya masyarakat yang sudah mapan dan mengakar. Berhadapan dengan ini tentu sangat sulit karena masyarakat cenderung untuk mempertahankan *status quo* yang telah menguntungkan kaum laki-laki sebagai dampak adanya perbedaan gender tersebut.

---

<sup>14</sup> Analisa ini dikenal dengan istilah analisis gender, yakni alat yang dipakai untuk melihat persoalan ketidakadilan yang diterima perempuan sebagai dampak dari adanya perbedaan gender. Lihat Mansour Fakih, Analisis gender ..., 3-6.

## **2. Pembakuan peran yang dilakukan oleh Negara melalui Undang-undang, Peraturan pemerintah, maupun Peraturan Daerah**

Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah masih banyak yang menyebabkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Salah satu contoh dapat dilihat dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 31 dinyatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga”. Penegasan ini merupakan pengetatan fungsi-fungsi isteri dan fungsi-fungsi suami secara tegas. Artinya pasal ini melegitimasi secara eksplisit pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Bahkan semakin dipertegas dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isteri, dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari pola pikir masyarakat yang kemudian dibakukan oleh Negara.

Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya hanya menyisakan ketidakadilan pada perempuan. Upaya domestikasi perempuan secara sistematis oleh Negara berdasarkan ideologi gender dalam kebijakan-kebijakan Negara berdampak lebih jauh pada peminggiran terhadap perempuan baik secara ekonomi, politik, social dan budaya, juga menimbulkan subordinasi, eksploitasi dan privatisasi kekerasan terhadap perempuan.

## **3. Orangtua umumnya juga tidak memiliki wawasan gender**

Pada umumnya, orangtua yang hidup dengan nilai sosial budaya masyarakat patriarki melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah sementara laki-laki makhluk yang kuat, perempuan emosional sedangkan laki-laki rasional, perempuan halus dan laki-laki kasar, begitu seterusnya kontadiksi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat dan pemberian Tuhan. Oleh karenanya ia bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Mengubah hal tersebut dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan menentang ketentuan Tuhan.

Gambaran orangtua tentang perempuan dan laki-laki seperti itu menandakan bahwa mereka sendiri sebetulnya tidak memiliki wawasan yang cukup tentang gender. Hal ini kemudian terpatri dalam pemahaman mereka, dan sangat sulit untuk diubah. Selanjutnya pemahaman yang keliru ini tercermin dalam sikap mereka memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara berbeda pula.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisaa' / 4 : 34)

Titik tekan mereka dalam ayat ini adalah kata “Qawwam” (pemimpin) yang dipahami secara tekstual, sehingga menjadi bias gender dan berdampak pada perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Jika ayat ini dipahami secara kontekstual, tentu akan dapat merubah pola relasi antara laki-laki dan perempuan menjadi mitra sejajar, tidak lagi laki-laki mendominasi perempuan.

#### **4. Kurangnya kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan itu sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekwen**

Terkadang, walaupun sosialisasi gender sudah dilakukan, dan pemahaman akan kesetaraan dan keadilan gender sudah didengung-dengungkan, belum menjadi alasan yang cukup kuat bagi perempuan untuk berubah. Hal ini semakin diperparah dengan ketidakmauan dan ketidaksiapan perempuan itu sendiri

untuk berubah.

Sekali lagi, kesulitan ini muncul karena perempuan berhadapan dengan realitas masyarakat yang patriarki, lebih mengutamakan laki-laki. Secara psikologis, perempuan tidak berani untuk merubah sesuatu yang sudah dianggap baku dan mapan oleh masyarakat. Dan jika ini terus berlangsung, maka hambatan bagi tersosialisasinya gender akan semakin menghadang di depan kita.

## **PENUTUP**

Sosialisasi gender dalam keluarga merupakan hal yang sangat menarik untuk dibicarakan karena keluarga merupakan salah satu lembaga yang memberikan pendidikan kepada anak. Sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama, tentu saja keluarga dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi tersosialisasinya gender. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk proses sosialisasi tersebut, tetapi, banyak pula tantangan yang harus dihadapi.

Untuk itu, kiranya kepada pihak-pihak yang berkompeten di bidang sosialisasi gender ini hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk menggeser nilai-nilai budaya yang mendiskreditkan perempuan. Negara, dalam hal ini pemerintah, hendaknya menghapus segala bentuk peraturan yang merugikan perempuan dan menggantinya dengan peraturan atau kebijakan yang berkeadilan gender. Hal ini tentu saja sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 tahun 1986.

Para pihak yang berkompeten seperti Pusat Studi

Wanita (PSW) atau lembaga-lembaga lainnya hendaknya dapat memberikan pemahaman tentang gender kepada orangtua, bukan hanya ibu, tapi juga bapak secara bersama-sama, karena masalah gender, sekali lagi bukan hanya masalah perempuan, tetapi sekaligus menjadi masalah bagi laki-laki.

Para pemegang otoritas keagamaan yang sangat didengar petuah dan wejangannya, hendaknya dapat melakukan penafsiran secara kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga misi Islam mengangkata harkat dan martabat perempuan dapat terwujud.

Terakhir, harus ada keberanian dari diri perempuan untuk merubah keadaan yang mempertahankan status quo dengan memulainya dari lingkungan keluarga, dan mempraktekkannya kepada anak-anak mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam  
(Bandung: remaja Rosdakarya, 1994)

Askiah Adam, "Islam dan Hak-hak Perempuan: Perspektif Asia Tenggara" dalam Menakar "Harga" Perempuan  
(Bandung: Mizan, 1999)

Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam : Tinjauan dari Analisis Gender", dalam Membincang Feminisme (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)

-----, Analisis Gender dan Transformasi Sosial  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu

- Anak dalam Mengembangkan Disiplin Diri (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: Refika Aditama, 1998)
- Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif al-Quran (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Nikmatullah dkk, Relasi Gender dalam Tradisi Masyarakat Pesantren di NTB (Mataram: PSW STAIN Mataram, 2004)
- Nurul Agustina & Lies Marcoes, Gender, Jilid 6,7, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.)

# **PENDIDIKAN PEMBEBASAN<sup>1</sup>**

## **(Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Athiyah al-Abrasyi)**

### **ABSTRAKS :**

*Pendidikan pembebasan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan itu adalah untuk menumbuhkan keseimbangan dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasionalitas diri, peranan dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu pendidikan seharusnya memenuhi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya : spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik baik secara individual maupun secara kolektif dan kesempurnaan. Tujuan terakhir*

---

1 Pakar pendidikan yang telah melakukan kajian tentang pendidikan pembebasan adalah Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, yang berbicara tentang perlunya pembebasan bagi suatu pendidikan kaum tertindas; dan Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, yang berbicara tentang kebebasan secara makro dalam Islam. Kata ini juga dipakai dalam makna "Pendidikan yang Membebaskan" (Lihat Paulo Freire, Pendidikan yang Membebaskan, Jakarta : MELIBAS (Media Lintas Batas), 2001, hlm. Viii, lihat pula dalam Mansour Fakhri, Pendidikan Populer : Membangun Kesadaran Kritis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm. xi). Selanjutnya juga dipakai istilah "Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan" (Lihat Paulo Freire, Menggugat Pendidikan, Fundamentalisme Konservatif Liberal Anarkis, yang disunting dan dialihbahasakan oleh Omi Intan Naomi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 434). Selain itu juga dipakai istilah "Pendidikan untuk Pembebasan" (lihat Everett Reimer, Matinya Sekolah, Yogyakarta : Hanindita Graha Widia, 2000, hlm. 69).

*pendidikan Islam adalah perwujudan penyerahan diri mutlak kepada Allah, baik tingkat individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Selain itu, pendidikan Islam diharapkan mampu untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama buat belajar. Tujuan tersebut hanya akan tercapai apabila pendidikan diarahkan untuk menuju kemandirian dan kebebasan. Kebebasan yang diinginkan dalam pendidikan adalah proses yang diciptakan oleh guru atau pendidik agar peserta didik memiliki kebiasaan bebas secara individu dan mendidiknya agar mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan kehidupannya tanpa harus tergantung pada orang lain. Kebebasan dalam pendidikan diarahkan untuk membangun kemandirian, sifat optimis dan berani memanfaatkan kekuatan yang dimiliki.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hakekat penyelenggaraan pendidikan adalah mengkondisikan manusia didik untuk mencapai kepribadiannya. Dengan cara demikian, pendidikan merupakan proses pembudayaan, dan karenanya haruslah berorientasi pada tumbuh-kembangnya kesadaran budaya. Pendidikan sebagai proses pembudayaan untuk mencapai perkembangan kepribadian memerlukan adanya visi dan misi sebagai *subversive-force*, yakni berfungsi mengubah dan memperbaharui keadaan, sekaligus menyadarkan dan membebaskan manusia yang terlibat di dalamnya.

Pendidikan yang membebaskan, berarti menempatkan subjek yang terdapat di dalamnya dalam situasi dan kondisi yang berada dan hidup bersama dengan subjek-subjek lain, baik internal maupun eksternal. Dengan cara demikian, subjek pun diharapkan memiliki kesadaran terhadap kepribadiannya sendiri.

Berkaitan dengan kebebasan, sesungguhnya pendidikan Islam belum terbebaskan, baik dari segi teoritik konseptual maupun praktis operasional. Hal ini disebabkan masih tingginya muatan-muatan dari luar yang menekan gerak laju pendidikan Islam. Walaupun begitu, ditilik dari sisi tujuan yang mendasari dilakukannya pendidikan Islam dapat dikatakan ia sudah memuat sebagian nilai-nilai pembebasan.

Sebagai contoh bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia dewasa yang sempurna, sehat rohani dan jasmani serta sejahtera dan bahagia. Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pendidikan tidak berupaya secara bersungguh-sungguh membebaskan peserta didik dari ikatan-ikatan (negatif) yang membelenggunya. Dengan demikian pendidikan pembebasan sangat diperlukan untuk mencapai pendidikan yang diharapkan.

Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang berperadaban dan berperikemanusiaan. Dengan kebebasan tersebut setiap individu berhak menentukan dimana dan kepada siapa ia akan belajar dan menuntut ilmu. Kebebasan juga banyak terkait dengan sikap kreatif individu dalam merespon segala persoalan hidup. Kehidupan seseorang akan memiliki makna apabila nilai kebebasan dapat ditemukan dalam perjalanan hidupnya.

Kebebasan bukanlah berarti keinginan atau kehendak manusia untuk berbuat sesuatu semaunya tanpa memiliki arah dan tujuan. Kebebasan bukan berarti bebas berbuat tanpa ada aturan nilai atau norma yang harus mengendalikan. Kebebasan adalah anugerah Tuhan yang harus dinikmati dan dipergunakan manusia dari, oleh dan untuk kemaslahatan semua manusia sekaligus alam semesta.

Pendidikan pembebas, dengan demikian memiliki posisi yang amat strategis. Dalam wacana tersebut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi dalam beberapa karyanya menawarkan kebebasan pendidikan yang amat perlu untuk dikaji. Untuk hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis tentang pemikirannya.

## **B. ATHIYAH DAN CORAK PEMIKIRANNYA**

Seorang profesional sekaligus praktisi kependidikan (Islam) tidak selamanya terkenal dan biografinya ditulis oleh banyak kalangan. Seperti halnya Muhammad Athiyah Al-Abrasyi (untuk selanjutnya cukup disebut Athiyah) yang karya-karyanya banyak dibaca dan menjadi literatur di berbagai negara dan memiliki reputasi internasional, ternyata biografinya sulit didapatkan baik dalam karya-karyanya, Mu'jam maupun Ensiklopedi.

Terasa aneh, seorang yang kreatif dengan puluhan buku sebagai hasil karyanya, ternyata tidak satupun data yang memadai ditemukan. Hal ini menurut Muhyidin Dimiyati (2000:9-10) mungkin disebabkan oleh :

1. Ia adalah seorang yang tidak suka publikasi. Anggapan ini diperkuat dengan tidak adanya informasi yang ia tulis sendiri (otobiografi) dalam beberapa karya tulisnya.
2. Gaya tulisan Athiyah yang kurang “keras”, bombastis, terlihat datar, serta sikap hidupnya yang kompromistis dengan penguasa Mesir saat itu (Gamal Abdul Nasser), sehingga orang kurang tertarik menulis biografinya.
3. Karena daya analisisnya yang kurang tajam dan “menggelitik” walaupun daya inovatif-kreatif yang ditawarkan cukup menarik, sehingga penulis luar

kurang tertarik menuliskan dan mengabadikan untuk diketahui oleh generasi berikutnya.

Walaupun demikian, dalam karyanya yang berjudul “*Al-Tarbiyah Al-Islamiyah*”, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Pokok-pokok Pendidikan Islam”, dapat ditemukan beberapa informasi tentang Athiyah walaupun serba singkat.

Athiyah adalah seorang sarjana dari Akster dan London, Inggris, yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Mesir, dan terakhir sebagai guru besar pada Fakultas Darul Ulum<sup>2</sup>, Universitas Kairo, Mesir. Selain mengajar, Athiyah juga termasuk seorang penulis produktif dengan karya sebanyak 51 judul. Di antara judul-judul buku tersebut, ada yang terdiri dari 2 – 60 jilid buku yang meliputi ilmu pendidikan, ilmu jiwa, bahasa dan sastra arab, sosiologi-antropologi dan sejarah. Mayoritas karya tersebut berupa kajian tentang sejarah dan pendidikan. Sebagai guru besar Pendidikan Islam, ia telah diakui oleh Pemerintah<sup>3</sup>, dan memiliki reputasi internasional termasuk di Indonesia.

Pemikiran seseorang paling tidak dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural keluarga, pendidikan dan masyarakat. Begitu juga Athiyah, yang telah berkembang

---

2 Darul Ulum diresmikan pembukaannya pada Juli 1871 atas ide Ali Mubarrak. Ide tersebut muncul dengan pertimbangan bahwa gap antara lulusan al-Azhar dan sekolah umum Nidzamiyah begitu kokoh dan umat Islam sulit untuk memperkenalkan pengetahuan-pengetahuan baru saat itu ke dalam kurikulum al-Azhar. Melihat hal demikian, Mubarrak memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang baru secara menyeluruh yaitu Darul Ulum.

3 Pengakuan ini terlihat pada penerbitan salah satu buku Athiyah “*Al-Tarbiyah al-Islamiyah*” oleh penerbit pemerintah “*Dar al-Qaumiyyah Li al-Thiba’ah wa al-Nasyr*” (National Printing and Publication House). Sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit ini sebelumnya telah dinilai tim penilai yang terdiri dari tenaga profesional di dalam bidang-bidang tertentu. Norma yang dipakai adalah “nilai baru” yang ditawarkan oleh buku tersebut baik isi, analisis atau metode dan teknik penyajiannya. Lihat Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. ix

menjadi sosok intelektual mandiri dengan berbagai karya tulis yang tersebar di berbagai dunia.

Menurut Chandra Muzaffar (dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, 1995:77-78), dalam dunia Islam, perkembangan pemikiran (intelektual) diwarnai oleh keanekaragaman yang terbentuk dari keragaman struktur dan pengalaman yang diidentifikasi ke dalam; kecenderungan intelektual dominan dan kecenderungan yang lebih rendah. Disatu pihak terdapat kecenderungan kembali kepada pokok ajaran Islam, Quran dan Hadis, sebagai pijakan utama dalam membangun kembali peradaban dan keberagaman umat. Dipihak lain para pembaharu dan reformis muslim mencoba menunjukkan bahwa Islam bukan sistem kepercayaan yang beku dan mati, melalui berbagai interpretasi baru, serta berusaha mendialogkannya dengan khasanah intelektual modern (Barat).

Berbeda dengan klasifikasi diatas, Fazlurrahman (1985:54) mengklasifikasikan ada dua pendekatan dasar. Pertama, ada kecenderungan mengakomodasi kemajuan Barat terbatas pada teknologinya saja, sedangkan aspek intelektualnya tidak, karena ada kekhawatiran akan mengkontaminasikan ajaran Islam. Kedua, sebagian yang lain memandang perlu mengakomodasi kemajuan Barat, baik teknologi maupun pemikiran (intelektual), dengan pertimbangan umat Islam pada masa lalu juga memberi kontribusi yang besar pada keduanya. Athiyah lebih memihak pada pemikiran yang kedua yang dalam beberapa karyanya, mengisyaratkan adanya dialog-dialog tersebut.

Pemikiran Athiyah termasuk kelompok pemikiran “sintesis” dalam peta pemikiran di Mesir yang secara garis besar terdapat tiga kecenderungan pemikiran yaitu

: pertama, kecenderungan pada Islam (*Islamic trend*), yakni kalangan tradisionalis<sup>4</sup>, diwakili Hasan al-Banna dan Rasyid Ridla; kedua, kelompok westernis, yang cenderung mengadopsi peradaban Barat secara total (*rational scientific and liberal trend*), diwakili Luthfi al-Sayyid dan Thaha Husein; ketiga kelompok modernis yang mempunyai kecenderungan sintesis (*syintetic trend*) baik pada pemikiran Islam maupun masukan lain, khususnya dari Barat yang diwakili Syaikh Muhammad Abduh dan Ali Abd al-Razig. Pada kelompok terakhir ini Athiyah mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Hal ini dapat dengan mudah diketahui lewat beberapa tulisannya yang kental dengan jargon-jargon keagamaan disamping pemikiran Barat yang dijadikan referensi buku-bukunya.

Perkembangan pemikiran Athiyah dan juga pemikiran-pemikiran intelektual Mesir yang terpengaruh dengan pemikiran Barat, dimulai sejak dominasi Barat atas Mesir, khususnya semenjak kedatangan Napoleon Bonaparte<sup>5</sup> dan rombongannya dari Perancis, diikuti dominasi Inggris dengan serangkaian usaha modernisasinya. Hal inilah yang kemudian menyadarkan Athiyah akan perlunya menyuntikkan elan evolusioner ke dalam khasanah keilmuan Islam, meski harus dengan meminjam metodologi Barat sebagai “piranti” metodologisnya. Hal ini dimaksudkan agar khasanah intelektual Timur mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban Islam, sehingga dapat kembali berdiri sejajar dengan peradaban Barat.

---

4 Disebut juga kalangan konservatif, yaitu kelompok yang menolak modernisasi dan sekularisme.

5 Napoleon Bonaparte datang ke Mesir bukan hanya membawa tentara. Dalam rombongannya terdapat 500 kaum sipil dan 500 perempuan. Di antara kaum sipil itu terdapat 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ia melakukan usaha-usaha ke arah modernisasi di berbagai sector kehidupan dengan asimilasi prestasi-prestasi Barat. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, hlm. 28-33.

Karenanya Athiyah menyatakan keharusan pendidikan Islam mengembangkan wawasan kehidupan yang progresif, berdimensi pembebasan (*al-hurriyah, liberation*), dan keadilan sosial yang dimanifestasikan dalam struktur populistik.<sup>6</sup>

### **C. KEBEBASAN SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN**

Kebebasan merupakan wacana kontemporer yang selalu menjadi perbincangan baik akademis maupun dalam dunia praktis, terlebih dalam dunia politik. Dalam berbagai kajian ditemukan tentang kebebasan akademik, kebebasan politik, kebebasan berbicara dan berpendapat, dan kebebasan lain yang merupakan hak asasi manusia yang setiap waktu dituntut agar tidak terlupakan apalagi dihilangkan.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang pendidikan pembebasan dalam perspektif Athiyah, terlebih dahulu dikemukakan berbagai persoalan seputar kebebasan.

#### **1. Pengertian Kebebasan**

Menurut Purwadarminta (dalam Muchjiddin, 2000:31-32), kebebasan (*freedom, hurriyah*) secara etimologi berasal dari kata “bebas” yang berarti : *Pertama*, lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan lain sebagainya sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa); *Kedua*, lepas dari (kewajiban, tuntutan, ketakutan dan sebagainya); tidak dikenakan (pajak, hukuman dan sebagainya), tidak terikat atau terbatas; *Ketiga*, merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh negara lain).

---

<sup>6</sup> Sebagai bahan perbandingan, baca Abdurrahman Wahid, Hasan Hanafi dan Eksperimentasinya (Kata Pengantar) dalam Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme, Telaah atas Pemikiran Hasan Hanafi, terj. Imam Aziz dan Jadul Maula, Yogyakarta:LKiS-Pustaka Pelajar, 1994, hlm. xiii

Sedangkan dalam bahasa Arab, kata "bebas" semakna dengan kata "harr" (kata jadiannya menjadi *hurriyyah*) berarti "isyaraf" (penghormatan)<sup>7</sup>. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa orang yang bebas (dengan kriteria tertentu) adalah yang sebenarnya mempunyai penghormatan, dan oleh karenanya, ia memperoleh kehormatan yang sebenarnya dari yang lain.

Lord Action dalam bukunya *History of Freedom* menyatakan tentang asal mula kebebasan dalam diri manusia yaitu kebebasan bukanlah suatu yang telah dimulai oleh manusia secara kodrati, tetapi sesuatu yang perlu diperjuangkan. Hal ini berbeda dengan pendapat Jean Jaques Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* yang menyatakan bahwa manusia telah lahir dalam kebebasan, tetapi dimana-mana ia terbelenggu<sup>8</sup>. Perbedaan ini berasal dari kondisi faktual di masyarakat. Action beranggapan bahwa perkembangan manusia menjadikan ia bebas dari semula, sedangkan Rousseau menyatakan sebaliknya bahwa manusia kurang bebas dari awalnya, kemudian berangsur-angsur bertambah bebas<sup>9</sup>. Kebebasan selanjutnya dapat berarti positif sekaligus negatif. Secara sosial kebebasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan apapun yang diinginkan dengan tanpa mengganggu (bertentangan dengan kebebasan orang lain).

## 2. Kebebasan dan Manusia

Kebebasan seseorang dimiliki semenjak lahir. Akan tetapi, secara biologis ia terbelenggu karena kelemahan dan

---

7 Lihat Abu Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Dar al-Masyriq, 1977, hlm. 124. Untuk arti yang lain, baca Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Yogyakarta:P.P. Al-Munawwir, 1984, hlm. 271.

8 Lebih jauh baca Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta:Kanisius, 1993, hlm. 40-46.

9 Kedua pendapat ini sama-sama biala diterima, tinggal dari sisi mana seseorang melihatnya.

kekurangannya dalam mengendalikan diri sendiri. Ketika seseorang tumbuh lalu berinteraksi secara sosial dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik dan seni budaya, maka saat itu terkuak realitas dan gambaran bahwa kaum yang lemah dalam berbagai segi, berhadapan secara tidak seimbang dengan kaum yang kuat. Masyarakat awam akan berhadapan dengan masyarakat terdidik atau intelektual. Warga negara berbenturan dengan tirani kekuasaan. Masyarakat ekonomi lemah terbelenggu oleh kelompok konglomerat yang semena-mena, dan masyarakat teknologi industrial merasakan keterasingan yang mengungkung eksistensinya. Ini berarti manusia sedang menghadapi problem kemanusiaannya sendiri.

Oleh karena itu, pembebasan berarti memanusiaikan manusia, maksudnya mengembalikan manusia pada jati diri kemanusiaannya yang sebenarnya. Itu merupakan hak sekaligus kewajiban. Upaya ini menjadi lebih penting lagi saat ditemukan banyak manusia yang tidak lagi bebas dan merdeka karena ia telah diperbudak oleh tuntutan fisik, dorongan hawa nafsu, harapan-harapan, kekuasaan, kekayaan, bahkan oleh ketinggian pemikirannya sendiri. Untuk itu pembebasan terhadap kondisi ini menjadi solusi yang paling mendasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan mengangkatnya pada derajat yang tinggi dan mulia<sup>10</sup>.

Pembebasan adalah sebuah proses menuju kemerdekaan. Proses ini dapat dibagi ke dalam bentuk pembebasan dari segala sistem yang menindas dan ke dalam bentuk pembebasan realisasi pribadi manusia, yang memungkinkan manusia menentukan tujuan-tujuan hidup,

<sup>10</sup> Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LKiS, 1993, hlm. v. Karena luasnya sisi-sisi kebebasan dan perbudakan, maka keduanya bisa berlangsung, disadari atau tidak, di rumah, sekolah, masyarakat, atau bahkan di dalam diri sendiri.

politis, ekonomis, kultural dan keimanan bagi dirinya sendiri. Kemudian pada gilirannya ia mampu dan berani melaksanakan apa yang ingin dilakukannya itu, dengan tanpa ada gangguan dan tekanan dari apa dan siapapun. Kecuali ada pertimbangan tertentu yang oleh syariat Islam boleh atau harus kebebasan itu dicabut oleh yang berhak, seperti pertimbangan akan keamanan diri, jiwa-raga, akal, kehormatan, keturunan atau keamanan harta benda.

Manusia adalah makhluk yang bebas<sup>11</sup>. Kebebasan disini pertama-tama dipahami sebagai kemampuan untuk menentukan diri, yakni kemampuan untuk mengambil sikap (memilih) terhadap bermacam-macam pengaruh dan penentuan yang ada. Kebebasan memilih ini oleh Louis Leahy dinamakan dengan kebebasan psikologis. Orang menyebutnya juga sebagai kualitas kehendak, yang dapat berbuat atau tidak berbuat. Dan setiap kali kebebasan kehendak manusia ini dibicarakan, kebebasan psikologis itulah yang dimaksudkan. Kebebasan itu melekat pada keberadaan manusia. Manusia baru dapat menghayati kebebasan seperti itu secara penuh bila ia mencapai kesempurnaan eksistensinya<sup>12</sup>.

Kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi merupakan cita-cita yang pantas dikejar oleh setiap insan.

---

11 Berkaitan dengan kebebasan ini, Al-Farabi menyatakan bahwa manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, manusia hewani yaitu manusia yang dikuasi oleh selera syahwatnya dan yang mengikuti rangsangan selera kenikmatannya. Ia adalah manusia sesat, celaka, dan gemar berbuat buruk. Kedua, manusia merdeka yaitu manusia yang berpikir sehat dan bertekad kuat melaksanakan hasil pikirannya yang sehat itu. Inilah manusia yang bebas dan merdeka. Ketiga, manusia budak yaitu manusia yang dapat berpikir sehat tetapi tidak mempunyai kekuatan dan keberanian untuk melaksanakannya.

12 Menurut Suprpto, kebebasan ini dinamakan kebebasan asasi/esinsial, yaitu kemampuan untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan ini bersumber pada kemampuan manusia untuk berfikir dan berkehendak yang diwujudkan dalam tindakan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar. Kebebasan asasi bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan ungkapan martabat manusia yang mampu melakukan pilihannya sendiri serta menentukan sikap dan pendiriannya sendiri.

Kebebasan itu adalah kemandirian sebagai manusia. Manusia disebut “bebas” bila ia dapat melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang menghalangi perwujudan dirinya secara penuh. Kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi menggambarkan manusia yang memiliki suatu pendirian atau prinsip hidup yang jelas dan diyakini kebenarannya, serta sanggup mempertanggungjawabkannya kepada semua orang yang memintanya<sup>13</sup>.

### 3. Kebebasan dan Tujuan Pendidikan

Menurut Muchjiddin (2000:43), dalam mendeskripsikan tujuan pendidikan, Athiyah telah banyak menyentuh nilai esensial manusia. Baginya pendidikan ditujukan untuk :

- a. Membentuk akhlak manusia.
- b. Mempersiapkan kehidupan (yang bahagia) didunia dan akhirat.
- c. Mempersiapkan untuk bekal mencari rizki.
- d. Menumbuhkan semangat ilmiah, dan
- e. Menyiapkan pelajaran dari sisi profesionalitasnya.

Satu hal yang perlu dicatat berkaitan dengan pendapat Athiyah diatas adalah hasil konfrensi pertama pendidikan Islam yang menyatakan bahwa orientasi tujuan pendidikan Islam adalah :

*“Education should aim at the balanced growth of the total personality of Man trough the training of Man’s spirit, intellect, the rasional self, feelings and bodily sense. Education*

---

13 Kebebasan seperti ini oleh Suprpto dinamakan kebebasan sosial, yaitu kebebasan yang dilaksanakan manusia sebagai makhluk sosial, dalam menyelenggarakan hubungannya dengan sesama manusia, dalam hidup bermasyarakat, bebangsa dan bernegara. Kebebasan sosial berpangkal pada kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup dalam kebersamaan dengan manusia-manusia dalam ruang dan waktu yang sama. Lihat dalam Prop. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Landasan Kependidikan (Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan Pancasila), Semarang: IKIP Semarang Press, 1999, hlm. 103

*should therefore cater for the growth of Man in all its aspects : spiritual, linguistic both individually and collectively, and motivate all these aspects towards goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim mission to Allah on the level of the individual, the community and humanity at large".<sup>14</sup>*

(Pendidikan seharusnya bertujuan untuk menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasionalitas diri, peranan dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu pendidikan seharusnya memenuhi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya : spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, linguistik baik secara individual maupun secara kolektif dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Islam adalah perwujudan penyerahan diri mutlak kepada Allah, baik tingkat individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya).

Tujuan diatas hanya akan tercapai apabila pendidikan diarahkan untuk menuju kemandirian dan kebebasan. Selain itu, pendidikan Islam diharapkan mampu untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama buat belajar, tanpa diskriminasi antara yang kaya dan yang miskin. Dengan demikian pendidikan dalam Islam tetap mengisyaratkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Tanpa kemanusiaan dan keadilan, pendidikan Islam hanyalah simbol yang jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah upaya membebaskan manusia agar terlepas dari belenggu rohaniah dan

<sup>14</sup> *First World Confrence on Muslim Education*, Inter Islamic Univercity Cooperation of Indonesia, tt, hlm. 4 (Lihat Muchjiddin Dimjati dan Roqib, Pendidikan Pembebasan, Yogyakarta:Yayasan Aksara Indonesia, 2000, hlm. 44-45.

jasmaniah sekaligus menghantarkan peserta didik ke jenjang kehidupan yang lebih baik.

#### 4. Makna Kebebasan dalam Pendidikan

Untuk memulai kajiannya tentang makna kebebasan dalam pendidikan, Athiyah mengemukakan sebuah hadis<sup>15</sup> yang artinya :

“Janganlah di antara kamu sekalian menjadi orang fanatik yang selalu mengatakan, saya mengikuti semua manusia yang lain. Jika mereka menganggap baik maka saya menganggap baik juga. Jika mereka menganggap jelek maka saya menganggap jelek. Tetapi, bersikaplah kamu sekalian dengan tegas, jika mereka menganggap baik hendaknya kamu menganggap baik dan jika menganggap jelek janganlah kamu menganggap jelek bersama mereka”.

Dari hadis di atas Athiyah ingin mendobrak tradisi fanatik yang berlebihan pada seseorang, sebab orang yang fanatik cenderung mengikuti pendapat orang lain, tanpa pendirian dan mudah menyalahkan orang lain yang berseberangan. Orang yang fanatik berdasarkan hadis diatas adalah orang menghilangkan otoritas pemikirannya sendiri yang semestinya ia kembangkan. Orang fanatik akan kehilangan kemandirian sekaligus kehilangan prestasi dan prestise hidupnya. Oleh karenanya, sifat-sifat yang mendasar yang harus dimiliki setiap individu untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan adalah percaya diri dan berpegang teguh pada kepercayaan yang ada dalam dirinya. Dengan kepercayaan terhadap diri sendiri atau

<sup>15</sup> Dalam menyitir hadis, Athiyah seringkali tidak menyertakan rawanya. Hal ini merupakan kelemahan dari tulisannya, sehingga pembaca yang kritis akan mengalami kesulitan bila ingin menyikapi hadis tersebut.

sikap optimistik, seseorang dapat mengaktualisasikan potensi dirinya untuk mensikapi dan mengatasi berbagai problema dalam kehidupannya.

Bagi Athiyah (1996:56), hal yang mendasar dan harus diperhatikan oleh para pendidik adalah menanamkan sifat rasa percaya diri yang menjadi landasan esensial bagi terwujudnya kesuksesan dalam hidup. Berpegang teguh pada kemampuan diri, otomatis menuntut kebebasan bagi setiap individu dengan tanpa menghilangkan atau merampas kemerdekaan dan kebebasan orang lain.

Yang dimaksud dengan kebebasan dalam pendidikan menurut pemikiran Athiyah (1996:57), bukan berarti peserta didik harus melepaskan diri dari ikatan guru dan terputus dari manusia lainnya, serta hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Kebebasan yang diinginkan dalam pendidikan adalah proses yang diciptakan oleh guru atau pendidik agar peserta didik memiliki kebiasaan bebas secara individu dan mendidiknya agar mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan kehidupannya tanpa harus tergantung pada orang lain. Kebebasan dalam pendidikan diarahkan untuk membangun kemandirian, sifat optimis dan berani memanfaatkan kekuatan yang dimiliki.

Solusi edukatif yang ditawarkan Athiyah (1996:60-61) agar siswa memiliki nilai kebebasan adalah dengan :

- a. Mentradisikan peserta didik memikul tanggung jawab berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Siswa dibebaskan melakukan apa saja baik di rumah, sekolah maupun dimasyarakat tanpa harus tergantung pada orang lain.
- b. Melibatkan peserta didik dalam mengatasi problematika hidup agar pada saatnya dimasyarakat, ia telah memiliki keteguhan jiwa, semangat yang

- kuat, objektif, memiliki kekuatan iman, percaya diri, mampu melaksanakan tugas diri dan negaranya serta selalu mantap dan sukses dalam hidupnya.
- c. Tepat dan bijaksana dalam memuji peserta didik agar mereka memiliki kepercayaan diri yang wajar dan sehat. Terlalu percaya diri bahkan mengisyaratkan bahwa orang tersebut sangat lemah.
  - d. Jangan memperbanyak perintah dan larangan sebab hal itu akan mematikan emosi dan kreativitas siswa. Perintah dan larangan yang berlebihan sama artinya dengan pengendalian, penggiringan dan pengurangan kesempatan bagi peserta didik untuk berinisiatif dan pada gilirannya mereka akan tergantung dan kurang percaya diri. Bakat dan minatnya pun akan tumpul tak bergerak lagi.
  - e. Guru atau pendidik hendaknya memperhatikan kemampuan riil peserta didik, kemudian mengarahkan dan memotivasinya menuju pada kesempurnaan jiwa dan skil peserta didik.

Pandangan Athiyah dalam pendidikan pembebasan seakan membuka mata bagi para pendidik, agar mengembangkan metode, pendekatan dan teknik mengajar yang tidak mematikan anak. Dengan perubahan jaman, mengharuskan pendekatan dan cara yang tepat tanpa terlepas dari nilai dasar yang dijunjung. Dengan dasar keimanan yang kuat, kreativitas dan kemandirian, peserta didik akan lebih bijak menjawab tantangan jamannya.

Karenanya Athiyah mengingatkan bahwa pendidikan Islam telah memberikan saham besar kepada dasar kebebasan dan demokrasi. Tanpa kepercayaan, kebebasan, dan demokrasi, pendidikan Islam tidak mungkin dapat

berdiri.

## **D. KEBEBASAN DAN DEMOKRASI PENDIDIKAN**

### **1. Arti Demokrasi Pendidikan**

Berbicara tentang demokrasi pendidikan, maka yang dimaksud adalah pendidikan yang berprinsip dasar “rasa cinta dan kasih sayang” terhadap sesama. Dalam hal ini pendidikan tidak membedakan tiap-tiap suku, ras, golongan, aspirasi politik, sekte, organisasi atau kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang membawa keadilan bagi semua anggota masyarakat.

Demokrasi pendidikan telah dilakukan pada masa kejayaan Islam. Menurut Athiyah (1979:27), pada waktu itu pendidikan tidak terikat pada peraturan-peraturan yang keras, ijazah-ijazah, pembayaran-pembayaran (SPP dan lain-lain), atau syarat-syarat yang bersifat penjajahan supaya tidak menjadi penghalang generasi muda, laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dengan demikian pintu pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi setiap orang yang berkeinginan untuk belajar, kapan dan dimana saja. Inilah demokrasi yang hakiki di dalam pendidikan dan pengajaran.

Untuk menuju pada demokrasi pendidikan yang diharapkan, harus terpenuhi prinsip-prinsipnya. Di antara prinsip-prinsip yang ideal dalam pendidikan itu adalah :

- a. Mengajarkan berpikir bebas dan mandiri dalam studi.
- b. Kemerdekaan dan demokrasi dalam mengajar.
- c. Sistem belajar yang individual.
- d. Perhatian terhadap perbedaan individualitas

peserta didik

- e. Perhatian terhadap bakat dan kecenderungan fitrah<sup>16</sup> dari peserta didik.

Pendidikan demokratis diwarnai oleh nilai keterbukaan dan sikap bebas. Makna demokrasi dengan sendirinya membutuhkan seperangkat kebebasan, baik kebebasan akademik, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan lainnya asal tidak mengganggu kebebasan orang lain. Demokrasi pendidikan membawa pendidikan bukan hanya sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan belaka, tetapi juga sebagai alat untuk mentransfer nilai dan kebenaran.

## **2. Kebebasan Sebagai Dasar Demokrasi dan Persamaan**

Demokrasi akan tegak apabila ada kebebasan, dan kebebasan dapat berjalan bila ada nilai persamaan dan keadilan. Dasar persamaan pendidikan mengantarkan tiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan dan karenanya bisa disebut dengan pendidikan kerakyatan<sup>17</sup>.

Konsep pendidikan kerakyatan dalam Islam, terdapat dalam sistem universitas rakyat yang sekarang diambil alih dan dipraktekkan di universitas-universitas Barat. Konsep

---

16 Ada beberapa pemaknaan terhadap kata "Fitrah" sebagaimana diidentifikasi oleh para pakar, yaitu : (1) Fitrah berarti suci dari dosa waris, (2) Fitrah berarti Dienul Islam, (3) Fitrah berarti pengakuan akan keesaan Allah (tauhid), (4) Fitrah berarti murni (ikhlas), (5) Fitrah berarti kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran, (6) Fitrah sebagai potensi dasar manusia untuk mengabdikan mengabdikan dan mengenal Allah, (7) Fitrah berarti ketetapan dan kejadian asal manusia mengenai kebahagiaan dan kesesatan, (8) Fitrah berarti tabiat alami dari manusia, dan (9) Fitrah berarti Gharizah (insting) dan Mumazalah (wahyu dari Allah), lihat dalam Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993, hlm. 13-21.

17 Sebagaimana Athiyah, Wardiman Djojo Negoro menyatakan bahwa ciri pendidikan kerakyatan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan bagi setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. Pendidikan diperuntukkan semua (education for all), minimal sampai tingkat pendidikan dasar. Apabila ada sebagian anggota masyarakat tersingkir dari kebijakan pendidikan, berarti kebijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan.

ini didasarkan pada teori bahwa mencari ilmu dalam masyarakat Islam adalah ibadah, tidak terikat pada syarat-syarat yang ketat, usia tertentu, ijazah-ijazah formal dan nilai-nilai yang dibatasi. Lembaga-lembaga pendidikan terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang memiliki motivasi untuk belajar dan menuntut ilmu.

Berkaitan dengan kebebasan dan demokrasi dalam pendidikan, Athiyah (1993:5) mengatakan:

“Metode pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam sangat banyak terpengaruh oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah menyerukan prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi semua orang; Pintu masjid dan institut-institut terbuka buat semua, tanpa ada perbedaan si kaya dan si miskin, tinggi atau rendahnya kedudukan sosial seorang siswa, oleh karena di dalam Islam tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan Arab, kecuali dengan taqwa. Pelajaran-pelajaran di dalam Islam itu adalah gratis, siswa tidak terikat pada batas umur tertentu, ijazah-ijazah atau nilai angka dalam ujian, ataupun peraturan-peraturan khusus buat penerimaan siswa. Bila seseorang memiliki keinginan untuk belajar dan rasa cinta ilmu, kegairahan untuk mengadakan penelitian dan pembahasan, pintu untuk belajar terbuka luas baginya, bahkan Islam mendorong supaya mereka belajar, apalagi bila seseorang itu berpembawaan cerdas.”

Pendidikan Islam bersifat elastis, pintunya terbuka bagi setiap individu yang berminat dan memiliki kemampuan. Karenanya, *equalitas* (persamaan kesempatan)

harus dilengkapi dengan *aksesibilitas*, yaitu bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya, mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan. Untuk menunjang *equitas* dan *aksesibilitas*, maka harus ada persamaan kesempatan dalam pendidikan, tak terkecuali untuk perempuan<sup>18</sup>. Dengan demikian, pendidikan yang mengandung nilai kemanusiaan dapat terwujud dengan adanya pemerataan dan tidak bias gender.

### **3. Kebebasan dan Keadilan Pendidikan**

Demokrasi tidak biasa tegak dan kuat apabila tidak dibangun diatas keadilan. Demokrasi dan keadilan tidak bisa tegak, apabila tidak di bangun atas kebebasan individu dan sosial yang proporsional. Laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan yang sama untuk mendapatkan segala hak kemanusiaan dan melaksanakan kewajibannya, menyuarakan pendapat baik lisan maupun tertulis dan bebas memilih jalan hidup yang diyakininya.

Dalam pendidikan, keadilan mengandung implikasi adanya “perbedaan” perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Secara etis-moral adalah adil dan wajar apabila peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat dan minatnya. Termasuk adil juga

---

18 Untuk mengembalikan nilai kerakyatan dan kemanusiaan pendidikan, Athiyah (1979:138) berpendapat bahwa pendidikan perempuan harus dipusatkan pada ibu, karena ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Ibu adalah sekolah bagi rakyat tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, dan penuh kasih sayang. Inilah yang menjadi inti demokrasi tertinggi, ketika keterbukaan, kerelaan, persaudaraan sudah mencapai tingkat kasih sayang. Peran ini hanya terdapat dalam pendidikan informal yang biasa dilakukan perempuan dalam rumah.

apabila peserta didik dari daerah-daerah tertentu diberikan peluang untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meskipun jika dibandingkan dengan peserta didik dari daerah lain, mereka lebih rendah kemampuannya. Hal ini dilakukan untuk mengangkat anak-anak yang kurang beruntung (*disadvantaged children*) baik anak yatim, anak gelandangan, serta anak-anak cacat fisik dan mental.

Pendidikan yang demokratis dan berkeadilan adalah pendidikan yang berfungsi membebaskan manusia. Dalam hal ini berarti pendidikan mampu membawa peserta didik menjadi manusia yang mandiri, penuh inisiatif dan kepribadian, memiliki sejumlah kemampuan baik intelektual maupun praktis, serta mau dan berani menghadapi masalah-masalah hidupnya, bahkan mampu mencari jalan keluarnya. Pendidikan yang merata belum tentu mencerminkan nilai demokrasi dan keadilan apabila dalam pendidikan justru tergantung kepada orang lain, tidak mampu mengambil inisiatif, tidak berani menyuarakan kebenaran dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, untuk menuju pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, perlu dibarengi dengan kebebasan.

Kebebasan manusia menyuarakan hati nurani merupakan bagian tak terpisahkan dari khazanah intelektual. Manusia adalah makhluk yang bebas (*liberal*). Maksudnya adalah manusia bebas menentukan terhadap sesuatu yang sedang dihadapi. Liberalisme mengandung arti tidak ada belenggu dan kekangan yang bisa terjadi. Akan tetapi jika dikatakan bebas di sekolah atau bebas belajar, tidak berarti para peserta didik bebas dari segala aturan dan tanggung jawab. Justru yang dimaksudkan disini adalah bebas menentukan sikap terhadap segala

aturan, tanggung jawab atau beban yang telah ditetapkan kepada mereka sebelumnya, dan boleh menentukan masa depannya. Ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan tidak diperkenankan melakukan intervensi untuk mengekang kebebasan peserta didik.

## **E. PENUTUP**

Dasar pemikiran Athiyah tentang pendidikan terletak pada tiga kata kunci yaitu persamaan, keadilan dan demokrasi. Dari ketiga dasar tersebut, Athiyah membangun beberapa konsep pendidikan, termasuk tentang pendidikan pembebasan.

Bagi Athiyah, pendidikan pembebasan adalah inti pendidikan Islam. Dengan pendidikan pembebasan diharapkan ada sebuah dinamika baru dalam kehidupan dan bukan sekedar mengekor pemikiran dan perilaku orang atau tokoh tertentu, tetapi memiliki kepercayaan diri yang utuh untuk berfikir, berbuat dan mencipta. Karenanya, menurut Athiyah, pendidik harus dapat menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, sehingga peserta didik dapat memiliki pemikirannya sendiri dan kemudian mengembangkannya ke arah yang lebih positif dan mandiri.

Dalam wacana pemikiran Athiyah, pendidikan pembebasan amat penting buat peserta didik. Baginya pendidikan pembebasan selama ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan pendidik muslim, untuk itu perlu disosialisasikan dan diaplikasikan, agar nilai kemanusiaan yang berkeadilan dapat ditegakkan. Karenanya pemikiran Athiyah memiliki relevansi dengan kondisi jaman yang serba terbuka ini.

## REFERENSI

- Abd. Rahman Assegaf, 1994, Teori Pendidikan John Dewey dan Muhammad Athiyah al-Abrasyi (Studi Analisis Komparatif), Yogyakarta : PPs. IAIN Sunan Kalijaga.
- Asghar Ali Engineer, 1993, Islam dan Pembebasan, Yogyakarta : LkiS.
- Fazlurrahman, 1985, Islam dan Tantangan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka.
- Harun Nasution dan Azyumardi Azra (ed.), 1995, Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam, Jakarta : Yayasan Obor.
- Harun Nasution, 1991, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta : Bulan Bintang.
- Kazuo Shimogaki, 1994, Kiri Islam antara Modernisasi dan Postmodernisme, Telaah atas Pemikiran Hasan Hanafi, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, Yogyakarta : LkiS – Pustaka Pelajar.
- Louis Leahy, 1993, Manusia Sebuah Misteri, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muchjiddin Dimiyati, Moh. Roqib, 2000, Pendidikan Pembebasan, Yogyakarta : Yayasan Aksara Indonesia.
- Muhaimin dan Abd. Mujib, 1993, Pemikiran Pendidikan Islam, Bandung: Trigenda Karya.
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1979, Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha, Beirut : Dar al-Fikr.

- , 1993, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, Jakarta : Bulan Bintang.
- , 1996, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, terj. Samsuddin Asyaraifi, Yogyakarta : Titian Ilahi Press.
- Muhammad Iqbal, 1981, The Reonstruksion of Religious Thought in Islam, New Delhi : Kitab Bhavan.
- Nico Syukur Dister, 1993, Filsafat Kebebasan, Yogyakarta : Kanisius.
- Prof. DR. Retno Sriningsih Satmoko, 1999, Landasan Kependidikan (Pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Pancasila), Semarang : IKIP Semarang Press.
- Syahrin Harahap, 1994, Al-qur'an dan Sekularisasi : Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Husein, Yogyakarta : Tiara Wacana.

# **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM<sup>1</sup> DI PERGURUAN TINGGI<sup>2</sup>**

## **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu pendukung utama Sistem Pendidikan Nasional<sup>3</sup> merupakan pendidikan yang memberi warna bagi peningkatan iman dan takwa dalam mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Keseimbangan antara kemajuan Iptek dan Imtak diharapkan mampu melahirkan Cendekiawan Muslim<sup>4</sup> yang memiliki rasa tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Kemajuan Iptek yang dilepaskan dari dimensi agama atau sebaliknya berkecenderungan menimbulkan kepincangan dalam pelaksanaannya. Ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh<sup>5</sup>.

Pendidikan Agama Islam mengandung arti yang luas, menyangkut pendidikan dalam arti pengetahuan dan pendidikan dalam arti kepribadian. Pendidikan dalam pengertian tersebut tidak cukup diukur pada ranah kognitif semata, namun juga melibatkan ranah afektif dan

psikomotorik. Lebih lanjut, pendidikan Agama Islam juga diharapkan mampu merasuk ke dalam tahap penghayatan, sehingga sikap dan tingkah laku si penganut agama akan sejalan dengan pengetahuan keagamaan yang dimilikinya. Disini dituntut adanya konsistensi antara ucapan dengan perbuatan, sebagaimana disinyalir dalam Al-Quran : *“Wahai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Allah murka kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak mau melakukannya”*. Tidak konsistennya antara ucapan dan perbuatan juga merupakan ciri yang paling menonjol dari kemunafikan<sup>6</sup> seseorang, sebagaimana hadits Nabi S.A.W :

*Artinya : Dari Abu Huraira r.a. Katanya Nabi S.A.W. bersabda tanda-tanda munafik ada tiga yaitu : (1) Apabila berkata, ia dusta, (2) Apabila berjanji, dia mungkir, (3) Apabila dipercaya, dia khianat. (H.R. Bukhari)*

Untuk kepentingan pencapaian tujuan dari Pendidikan Agama Islam yang harus mampu mewarnai aspek afektif dan psikomotorik, sekaligus mampu merasuk ke dalam tahap penghayatan, maka dirasakan perlu untuk mengembangkan Pendidikan Agama Islam, khususnya di Perguruan Tinggi. Beberapa pertimbangan atau alasan yang mendasari perlu dikembangkannya Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, sekaligus aspek yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada “belajar tentang agama”, sehingga banyak mahasiswa yang mengetahui nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya. Selain itu, mahasiswa yang mengikuti/ mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi memiliki standar dan kesiapan yang

berbeda. Banyak di antara mereka yang nyaris “buta ajaran agama”. Idealnya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah mahasiswa yang telah memiliki bekal minimal dan standar yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Mereka juga harus siap belajar di Perguruan Tinggi, dalam arti siap menerima pemikiran-pemikiran kritis dan tidak emosional, sekaligus siap untuk tidak selalu cocok dengan pendapat orang lain dalam menafsirkan ajaran agama.

2. Pengembangan dan pengamalan Iptek dalam perilaku keseharian kurang dikaitkan dengan nilai-nilai luhur agama. Idealnya, tujuan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi adalah berkembangnya Iptek, lengkap dengan pengamalannya yang sarat dengan muatan moral Islam.
3. Materi agama Islam yang diajarkan lebih banyak dalam aspek tradisional/ dogma/ritualnya saja. Idealnya, materi perkuliahan agama yang diberikan juga harus mempertimbangkan aspek rasionalnya dan terkait erat relevansinya dengan kebutuhan pembangunan nasional yang menjadi kebutuhan bersama. Oleh karenanya, metodologi Pendidikan Agama Islam seharusnya adalah metode pendidikan yang rasional, menantang, dan membuka pemikiran mahasiswa untuk berpikir ke depan, sehingga dapat menghadirkan agama dalam kehidupan modern dengan bahasa modern.
4. Dosen yang mengajar mata kuliah agama tidak memiliki persyaratan yang cukup. Mereka mengajar hanya dengan modal “banyak memiliki pengetahuan agama”. Dosen seperti ini hanya mampu menyampaikan pengetahuan agama, tanpa mampu mengolah dan

menganalisis pengetahuan agama tersebut. Idealnya, dosen agama Islam adalah seorang ahli agama Islam, berpendidikan minimal S.2. Selain itu, mereka juga diharapkan benar-benar memiliki rasa keterpanggilan tugas, profesional dan penuh dengan kreativitas, inovasi, dan rasa percaya diri yang tinggi sebagai dosen agama. Dengan persyaratan yang demikian diharapkan dosen mampu menciptakan dan mengembangkan kurikulum, khususnya kurikulum Pendidikan Agama Islam.

5. Kehidupan kampus belum mampu mengembangkan kehidupan akademis religius, belum mampu mengembangkan kegairahan dialog, baik intern maupun antar agama di kalangan sivitas akademika. Idealnya, harus dimiliki kampus akademika yang religius, dimana perilaku keagamaan dalam kampus menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Mahasiswa khususnya dan sivitas akademika pada umumnya terdorong untuk mempelajari agama Islam dalam rangka mengembangkan konsep-konsep keilmuan bidang studinya, sehingga bidang keahlian yang ditekuni benar-benar bersumber dan dipandu oleh Imtak kepada Tuhan YME, dalam relevansinya dengan perspektif pengembangan dan pengamalan Iptek demi pembangunan nasional yang sarat dengan muatan moral Islam.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka peran Pendidikan Agama Islam dalam dunia akademik tidak hanya diletakkan pada lingkup pembenaran (*context of justification*), melainkan yang terpenting adalah diletakkan pada lingkup penemuan (*context of discovery*). Sinyalemen-sinyalemen Allah – baik dalam ayat-ayat kitabiyah maupun kauniyah – harus dipahami dan diberi interpretasi yang “*up*

*to date*”. Interpretasi dan reinterpretasi akan menjadikan agama siap dan mampu berdialog dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada akhirnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

## **B. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA<sup>8</sup>**

Peran pendidikan agama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat secara makro dan mikro (Pratiknya, 1999 : 87 - 89). Secara makro, pengembangan sumber daya manusia, pada hakikatnya, merupakan upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan seluruh daya manusia secara terpadu untuk mencapai kompetensinya sebagai subjek pembangunan, maupun ketinggian martabatnya (mahluk budaya dan religius) sebagai objek yang dibangun. Dalam rangka mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut, pengembangan sumber daya manusia menganut paradigma “nilai tambah”.<sup>9</sup>

Pendidikan sebagai proses pengembangan manusia secara makro meliputi proses:

1. Pembudayaan, yaitu proses transformasi nilai-nilai budaya yang menyangkut nilai-nilai etis, estetis, dan nilai budaya serta wawasan kebangsaan dalam rangka terbinanya manusia berbudaya.
2. Pembinaan Imtak<sup>10</sup>, yaitu transformasi nilai-nilai keagamaan (iman, takwa, kebajikan, budi pekerti, akhlak, dan sebagainya) dalam rangka terbinanya manusia beragama.
3. Pembinaan Iptek, dengan cara menanamkan kecintaan

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menumbuhkembangkan budaya Iptek<sup>11</sup>. Pembinaan Iptek ini juga merupakan pengembangan potensi ke arah terbinanya kemampuan manusia sebagai manusia pembangun, yaitu manusia yang mampu mengolah kekayaan lingkungannya – dengan kemampuan ilmu dan teknologi – untuk mendapatkan manfaat kesejahteraan bagi umat manusia.

Sedangkan secara mikro, peranan pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari proses pembelajaran yang meliputi proses :

1. Alih pengetahuan (*transfer of knowledge*)

Fungsi pendidikan sebagai sarana alih pengetahuan dapat ditinjau dari teori *human capital*<sup>12</sup>, yaitu bahwa pendidikan tidak dipandang sebagai barang konsumsi belaka, tetapi juga sebagai barang investasi. Hasil investasi ini berupa tenaga kerja yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses produksi dan pembangunan pada umumnya. Dalam kaitan ini proses alih pengetahuan dalam rangka pembinaan iptek dilakukan untuk mengembangkan manusia Indonesia sebagai manusia pembangun.

2. Alih metode (*transfer of methodology*)

Fungsi pendidikan sebagai sarana alih metode terutama berperan pada pengembangan kemampuan penerapan teknologi dan profesionalisme seseorang. Penguasaan pada *technological sciences* lebih merupakan proses *transfer of methodology* dari pada *transfer of knowledge*.

3. Alih nilai (*transfer of value*)

Bila dikaitkan dengan proses makro, pendidikan

sebagai proses alih nilai mempunyai tiga sasaran, yaitu :

- a. Menghasilkan manusia yang berkepribadian, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur, mempunyai wawasan dan sikap kebangsaan, serta menjaga dan memupuk jati dirinya. Dalam hal ini, proses alih nilai dalam rangka proses pembudayaan.
- b. Melahirkan manusia yang tunduk dan patuh dalam menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing, berakhlak mulia, dan senantiasa menjaga hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam sekitar. Dalam hal ini, proses alih nilai adalah dalam rangka proses pembinaan Imtak.
- c. Menciptakan manusia yang menghargai waktu, disiplin, mandiri, dan mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi dengan efisien, kreatif, inovatif, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam hal ini, proses alih nilai dalam rangka proses pembinaan Iptek.

Pendidikan sebagai proses alih nilai dapat dilakukan dengan dua model pendekatan. Pertama, pendekatan struktural-kuantitatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada satuan subjek dan jam belajar. Dengan pendekatan ini pendidikan agama biasanya diberikan dalam sebuah mata pelajaran khusus dan jam pelajaran yang memadai. Kedua, pendekatan fungsional-kualitatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada substansi kegiatan pembelajaran sebagai wahana proses alih nilai. Dengan pendekatan ini pendidikan agama lebih mengarah kepada intensitas pendidikan nilai pada tiap mata pelajaran yang ada secara integrative dan proporsional.

Ada beberapa agenda yang harus dipersiapkan oleh pendidik agar pendidikan nilai, khususnya Pendidikan

Agama Islam dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan. *Pertama*, perlunya pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang proses alih nilai dalam kegiatan pembelajaran. *Kedua*, perlunya peningkatan kemampuan penjabaran kurikulum dalam kegiatan pembelajaran yang terkait dengan wawasan dan nilai-nilai agama. *Ketiga*, perlunya pemahaman mengenai kontekstualitas nilai-nilai agama itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, peran iklim kampus yang kondusif bagi berlangsungnya pendidikan nilai juga amat menentukan kemangkusan pendidikan agama di suatu kampus.

### **C. PENGEMBANGAN KURIKULUM<sup>13</sup>**

Dalam tulisan ini tidak akan diuraikan bagaimana pengembangan kurikulum secara rinci, melainkan hanya mengkaji dengan strategis bagaimana pengembangan kurikulum tersebut dilakukan. Menurut Pratiknya (1999 : 96), ada dua strategi pokok yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama di perguruan tinggi, yaitu :

*Pertama*, pendekatan integratif *course content* dengan program studi yang ditempuh mahasiswa. Dengan pendekatan ini, apa yang diajarkan dosen agama secara kontekstual berhubungan dengan persoalan yang dihadapi atau digeluti mahasiswa di program studi tertentu. Pendekatan secara integratif ini membawa dua keuntungan, yaitu : (a) Secara metodologis akan mudah bagi mahasiswa untuk “menangkap” apa yang diberikan oleh dosen, dan (b) Pemahaman integratif sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dipenuhi.

Salah satu contoh model pengembangan

kurikulum dengan pendekatan integratif ini adalah apa yang disusun oleh tim Departemen Agama dengan “Islam sebagai Disiplin Ilmu (IDI)<sup>14</sup>”, dan untuk melakukan pendekatan integratif ini dituntut kemampuan tertentu oleh dosen.

*Kedua*, pendekatan “tiga dimensional”, yaitu pengembangan kurikulum yang di dalamnya interpretasi terhadap agama dilakukan dengan menggunakan tiga dimensi pendekatan, yaitu :

1. Dimensi horizontal, yaitu pemahaman/penafsiran agama dengan pendekatan kesejarahan, yang mencakup aspek asbab al-nuzul, sampai kaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah (masa lalu) dan antisipasinya dengan apa yang akan terjadi.
2. Dimensi vertikal, yaitu bagaimana menginterpretasikan agama pada “aksi normatif operasional”. Bagaimana menerjemahkan agama sebagai sumber nilai dan sumber konsep dalam gagasan-gagasan yang operasional dalam masyarakat, terutama di bidang studi mahasiswa.
3. Dimensi topikal, yaitu pendekatan tematis. Pendekatan ini harus dipilih sebagai konsekuensi strategi pendekatan integratif di atas.

## **D. PENGEMBANGAN PENDEKATAN**

### **1. Pendekatan Pendidikan Agama Islam**

Menurut Towaf (1999 : 168), ada dua macam pendekatan yang dikembangkan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, yaitu pendekatan holistik dan kontekstual.

Pendekatan holistik merupakan pendekatan yang memandang sesuatu sebagai satu kesatuan organis, sebagai satu keseluruhan yang terpadu. Pendekatan ini

diperlukan dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam karena tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membina mahasiswa berkepribadian Muslim yang utuh, yang memahami dan menghayati ajaran Islam secara utuh pula.

Adapun pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang memperhatikan seluruh situasi, latar belakang atau lingkungan yang relevan dengan beberapa kejadian dan kepribadian. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan agar mahasiswa memiliki wawasan yang komprehensif dan integral dalam menyikapi masalah kehidupan. Pendekatan kontekstual dalam Pendidikan Agama Islam dapat tercermin dalam pengembangan materi dan proses yang tidak hanya memberikan gambaran utuh tentang ajaran agama yang dianut mahasiswa, tetapi juga mencerminkan kebutuhan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mengasah kepekaan mahasiswa terhadap masalah aktual di bidang sosial, politik, ekonomi, ataupun budaya.

Menurut Kuntowijoyo (dalam Suprpto, 1996) penggunaan pendekatan holistik-kontekstual bagi Pendidikan Agama Islam diarahkan pada tradisi keilmuan dalam Islam yang memiliki tiga aspek, yaitu :

- a. Tradisi normatif, baik yang bersifat deklaratif maupun apologetis dalam arti menjelaskan norma-norma ajaran Islam ataupun sikap pembelaan dalam menghadapi tulisan orang luar tentang Islam.
- b. Tradisi ideologis, yaitu cita-cita mewujudkan akhlakul karimah secara individu maupun sosial.
- c. Tradisi ilmiah, yaitu pemakaian metode induktif-empiris melalui pendekatan kontekstual, sosial dan historis.

Lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaan pendekatan holistik dalam Pendidikan Agama Islam mencerminkan tradisi normatif dan ideologis, sedangkan penggunaan pendekatan kontekstual lebih mencerminkan tradisi ilmiah.

## **2. Pengembangan Pendekatan Kontekstual**

Pendekatan kontekstual yang dikembangkan di Perguruan Tinggi merupakan strategi merombak dikhotomi ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum) dalam benak mahasiswa. Oleh karena itu, pengembangan pendekatan kontekstual dilakukan dengan beberapa pola, yaitu :

Pertama, mempertautkan ajaran agama dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang digali dan dipelajari mahasiswa. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara mengupas secara jelas tentang sistem pengetahuan dalam Islam. Secara umum, pengetahuan merupakan upaya manusia menangkap kebenaran dengan menggunakan akal dan pengalaman indera yang dimilikinya.

Pola pendekatan kontekstual ini sesuai dengan pemaknaan kontekstual yang berarti keterkaitan antara yang sentral dengan yang *periferi* (Muhadjir, 1996 : 198), dengan pengertian yang sentral adalah ayat-ayat qur'aniyah dan yang periferi adalah ayat-ayat kauniyah yang digelar oleh Allah SWT di alam raya ini untuk dicermati dan dipelajari manusia. Dengan pendekatan ini kepekaan mahasiswa terhadap ayat-ayat kauniyah diasah, dan ditumbuhkan kesadarannya bahwa penggalian dan pengembangan iptek saat ini merupakan penerapan dari anjuran yang ada dalam ayat-ayat qur'aniyah.

Kedua, keterkaitan antara pemahaman mahasiswa

terhadap norma-norma dan nilai-nilai Islam dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam pola ini, kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan dalam menanggapi masalah, sehingga pengertian kontekstual sama dengan situasional (Muhafjir, 1996 : 198). Dengan pendekatan kontekstual pola kedua ini penghayatan ajaran agama yang dimiliki oleh mahasiswa tidak akan berhenti pada tataran normatif, tetapi berlanjut pada penerapan ajaran agama untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, keterkaitan antara pemahaman ajaran Islam dengan konteks historisnya, atau pemaknaan kontekstual dengan melihat keterkaitan masa lampau-kini-mendatang. Dengan pola pendekatan kontekstual ini mahasiswa dilatih untuk dapat memahami bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Quran dapat berkembang, ajaran Islam itu bersifat dinamis, dan mahasiswa sebagai ilmuwan Muslim nantinya merupakan bagian dari dinamika itu sendiri.

## **E. PENUTUP**

Pembangunan pendidikan yang bermutu merupakan wahana untuk membangun sumber daya manusia yang berwawasan Iptek dan Imtak, yaitu sumber daya manusia yang mampu menerapkan, mengembangkan dan menguasai Iptek dalam arti mampu mengolah kekayaan lingkungannya – dengan kemampuan ilmu dan teknologi – untuk mendapatkan manfaat kesejahteraan bagi umat manusia, dengan tetap dilandasi nilai-nilai agama, moral dan budaya luhur bangsa.

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah strategi budaya yang menggunakan prinsip dasar moral dan keadilan. Penyelenggaraan pendidikan agama

di perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan pengayaan moral sehingga dalam diri mahasiswa dapat menyatu antara keimanan dan ketakwaan, dan Iptek menjadi kekuatan yang sinergik bagi kemaslahatan umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawani, Imam dan Isa Anshori, 1991, *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Fajar, Malik, 1999, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia
- Fuaduddin dan Cik Hasan Basri (ed), 1999, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hamidy, Zainuddin, dkk, 1981, *Shahih Bukhari, Jilid I*, Jakarta: Widjaya
- Isna, Mansur, 2001, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama
- Muhadjir, Noeng, 1992, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nasution, 1993, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Pratiknya, Ahmad Watik, 1999, "Beberapa Masukan dalam

Rangka Pengembangan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi Umum” dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Basri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Soeprapto, Sri, 1999, “Model Kegiatan Keagamaan di Kampus Abad XXI menghadapi Perkembangan Sosial dan Iptek”, dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Basri (ed), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Syarief, Hidayat, 1999, “Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Iptek dan Imtak”, dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Basri (ed) *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

## CATATAN

<sup>1</sup> Secara umum Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu strategi memberdayakan umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Program Pendidikan Agama Islam semestinya mampu mengembangkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa sebagai calon ilmuwan dan tenaga professional. Kualitas iman dan takwa yang diharapkan adalah yang : (a) mendorong manusia dinamis dan bekerja keras, (b) mendorong manusia selalu ingin tahu sehingga menjadi orang yang *well informed*, (c) menciptakan sifat dan kelakuan toleran tanpa harus kehilangan prinsip yang diyakini, (d) menumbuhkan sifat dan tingkah laku yang berkeadilan social dan berkepedulian social, (e) mengangkat harga diri, kepercayaan dan kemampuan diri bagsa sehingga muncul manusia yang bebas, progresif, berinisiatif, mempunyai pengendalian dan kemampuan diri, (f) mewujudkan dan mengembangk-an hubungan vertical dan horizontal, dan (g) kualitas hidup bangsa yang iman dan takwa disempurnakan dengan Iptek. Lihat Siti Malikhah Towaf, Pendekatan Kontekstual bagi Pendidikan Agama

- Islam di Perguruan Tinggi Umum, 1999, hlm. 166.
- 2 Makalah ini dipresentasikan dalam kegiatan diskusi dosen yang dipelopori oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) pada tanggal 2014.
  - 3 Dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa : “Pendidikan Agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agamalain dalam hubungan kerukunan umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional”. Undang-undang tersebut memberi makna bahwa pendidikan di berbagai jenjang tidak terlepas dari pendidikan agama, dan proses pendidikan agama yang ada merupakan usaha untuk membina manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beragama. Dari sisi individu, pendidikan agama merupakan upaya nyata membina setiap peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi religius yang memahami dan menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, pendidikan agama diberikan dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran tentang agama dan umat beragama di Indonesia. Di samping itu, dengan adanya pendidikan agama, diharapkan pula dapat dikembangkan sikap menghormati eksistensi agama dan umat beragama, sehingga mampu menciptakan persatuan antar umat eragama di Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan agama mengemban misi membina integritas pribadi dan integritas nasional.
  - 4 Istilah cendekiawan muslim telah dibahas panjang lebar oleh Imam Bawani dan Isa Anshori dalam bukunya *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam*, 1991, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
  - 5 Istilah ini merupakan ucapan yang termasyhur dari tokoh terkenal Einstein : *“Science without religion is blind, religion without science is lame”*.
  - 6 Munafik ada 2 macam : (1) Munafik dalam I’tikad yaitu mereka yang menonjolkan keislamannya, tetapi pada hakekatnya, dia tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka termasuk golongan kafir, bahkan lebih jahat. Dan orang-orang itulah yang dijanjikan Allah tempatnya di tingkatan yang paling bawah dalam neraka, (2) Munafik dalam amal, yaitu yang tersebut dalam hadits ini. Dan munafik seperti ini tidak membawa kepada kekaifiran, tetapi amat merugikan diri dan merusak pergaulan. (Lihat Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari Jilid I, 1981, hlm 26).
  - 7 Dalam sanad yang lain dikatakan bahwa tanda orang munafik ada 4 sebagaimana hadits Nabi S.A.W :  
Artinya : Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ra, katanya Nabi SAW bersabda : “Ada 4 perkara, barangsiapa terdapat pada dirinya lengkap keempatnya, itulah dia orang munafik sesungguhnya. Dan barangsiapa terdapat padanya satu perkara saja, maka ia termasuk munafik juga, hingga ditinggalkannya sifat yang satu itu : (1) apabila dipercaya, dia khianat, (2) apabila berkata, dia dusta, (3) apabila berjanji, dia mungkir, (4) apabila ia bermusuhan, dia sangat jahat”. (Li-

hat Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari Jilid I, 1981, hlm 26).

- 8 Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya lanjut dari pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan iptek dan Imtak. Pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan iptek dan Imtak dilakukan dengan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut : *Pertama*, menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menumbuh-kembangkan budaya Iptek. *Kedua*, menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang mampu membangkitkan dan menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi serta minat dan semangat belajar. *Ketiga*, menumbuhkembangkan daya juang (*fighting spirit*), profesionalisme dan wawasan keunggulan. *Keempat*, menumbuhkembangkan sikap hidup yang hemat, cermat, teliti, tertib, tekun dan disiplin. *Kelima*, menumbuhkembangkan moral dan budi pekerti luhur sebagai pengejawantahan dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lihat Hidayat Syarief, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berwawasan Iptek dan Imtak, dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Bisri (ed), 1999, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Logos
- 9 Nilai tambah sebagai paradigma pembangunan sumber daya manusia mempunyai dua makna, yaitu makna ekonomis dan makna insani. Nilai tambah ekonomis menjadikan manusia lebih produktif, sedangkan nilai tambah insani menjadikan manusia lebih tinggi harkat dan derajat kemanusiaannya yaitu manusia yang lebih berbudaya, lebih beriman dan bertakwa.
- 10 Khusus di perguruan tinggi, pembinaan keimanan dan ketakwaan mahasiswa dilakukan antara lain melalui : (a) optimalisasi dan peningkatan efektivitas pendidikan agama, (b) penciptaan lingkungan kampus yang kondusif (c) pengintegrasian nilai-nilai Imtak ke dalam materi perkuliahan, (d) pengisian kegiatan ekstra kurikuler dengan kegiatan yang bernafaskan Imtak, dan (e) peningkatan kerjasama antara perguruan tinggi dengan masyarakat.
- 11 Ciri yang menonjol dari seseorang yang berbudaya Iptek antara lain : (a) kreatif, selalu terdorong untuk mencari sesuatu yang baru, (b) selalu bertanya dan menggali rahasia alam karena alam adalah sumber ilmu pengetahuan, (c) berpikir logis dan rasional, serta cenderung pada kebenaran, karena ilmu pengetahuan hanya mungkin dikembangkan atas dasar kebenaran, serta sadar bahwa kebenaran itu sendiri tidak bersifat mutlak (absolut) dan abadi, (d) mengutamakan profesionalisme, serta (e) menjunjung tinggi mutu dan keunggulan.
- 12 *Human Capital : Aproductive investment embodied in human persons. These include skills, abilities, ideals, health, etc., that result from expenditures on education, on-the-job training programs, and medical care.* Lihat Todaro, *Economic Development In The Third World*, dalam Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Global Pustaka Utama, 2001, hlm. 2.
- 13 Pengembangan kurikulum pada hakikatnya sangat kompleks, karena banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Salah satu pegangan dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh *Ralph Tyler* (1949). Menurutnya, tiap kurikulum didasarkan atas empat faktor atau asas utama, yaitu : *Pertama*, asas filosofis, yaitu falsafah bangsa, masyarakat, sekolah dan

guru-guru. Asas filosofis ini pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan. *Kedua*, asas sosiologis, berupa harapan dan kebutuhan masyarakat. Asas sosiologis ini memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, asas psikologis, yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek baik fisik, mental, emosional, dan sosial, serta cara mereka belajar. *Keempat*, asas organisatoris, yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun, bagaimana luas dan urutannya. Dengan kata lain, asas ini membicarakan tentang hakikat pengetahuan atau disiplin ilmu. Lihat Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1-2.

- 14 Istilah ini lebih populer dikenal dengan sebutan proses Islamisasi ilmu pengetahuan (*Islamization of knowledge*), yaitu upaya untuk mempertautkan ajaran agama dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang digali dan dipelajari mahasiswa. Walaupun tidak semua cendekiawan dan ilmuwan muslim setuju dengan gagasan ini, namun demikian gagasan itu tetap saja mengundang daya tarik di kalangan pemikirnya dalam melakukan reorientasi terhadap kandungan Al-Quran dan Sunnah dari perspektif ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari IDI ini adalah untuk : (a) Membuktikan kebenaran agama dalam disiplin ilmu, (b) Membenarkan formula ilmu sebagai produk pemikiran yang sesuai dengan tata nilai atau norma agama, (c) Menyanggah formula ilmu yang tidak memiliki hakekat kebenaran, tetapi masih merupakan hipotesa, (d) Merintis terciptanya ilmu yang bersumber pada tata nilai atau norma agama, baik sebagai asumsi atau sebagai bukti (*scientific proof*). Lihat Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta : Fajar Dunia, 1999, hlm. 54-55

# **GURU SEBAGAI JABATAN PROFESIONAL**

## **PENDAHULUAN**

Profesionalitas tenaga kependidikan, khususnya guru di Indonesia, sampai saat ini masih dirasakan sebagai sesuatu yang belum dipahami secara utuh. Di satu pihak jabatan ini menuntut berbagai persyaratan sebagaimana layaknya profesi lain serta penghargaan yang layak yang berlaku untuk sebuah profesi, sedangkan di lain pihak penghargaan terhadap guru dan tenaga kependidikan hanya sebatas sebagai pekerja atau pegawai yang mempunyai tugas mengajar. Bahkan, kadang-kadang muncul gejala bahwa guru yang menyandang profesi, mempunyai kadar / bobot lebih rendah dari guru yang tidak menyandang profesi. Hal ini memberikan kesan bahwa profesionalisasi tenaga kependidikan (guru) hanya semacam "kewenangan formal" yang diberikan kepada guru untuk menjabat jabatan itu.

Bila ditelusuri lebih jauh tentang profesi dalam berbagai bidang, ternyata profesi guru mempunyai perbedaan yang jelas dengan berbagai profesi lain yang ada. Sebagai ilustrasi, bandingkan antara profesi guru

dengan profesi dokter. Profesi sebagai dokter hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi (Fakultas Kedokteran atau Sekolah Tinggi Kedokteran). Dengan demikian, seorang dokter dalam menjalankan tugasnya selalu dilandasi oleh kemampuan dan keahlian yang ditunjang oleh konsep dan teori yang mantap. Hal ini menyebabkan prosedur kerja serta teknik melaksanakan pekerjaan itu membawa hasil yang jelas. Dalam menghadapi pasien misalnya, seorang dokter membuat diagnose (mencari sebab munculnya penyakit), dilanjutkan dengan prognose (menghubungkan sebab dengan gejala suatu penyakit untuk menentukan kemungkinan cara penyembuhannya), sehingga dapat dilakukan upaya penyembuhan atau pengobatan yang tepat. Pada umumnya, hasil yang diperoleh pun memuaskan, karena memang secara konseptual dan teoritis gejala penyakit dapat diketahui secara jelas, demikian pula penyebabnya serta cara pengobatannya.

Berbeda halnya dengan pekerjaan seorang guru. Bila diibaratkan input (masukan) pendidikan yang berupa peserta didik itu sebagai pasien, proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dan yang dikendalikan oleh guru, belum tentu akan dapat menghasilkan output (keluaran) sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan keahlian seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran belum tentu bisa menjamin diperolehnya hasil belajar sesuai dengan yang diinginkan. Kesiapan anak didik untuk mengikuti proses pembelajaran, kondisi lingkungan, kondisi kehidupan keluarga dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasil dari sebuah proses pendidikan. Hal ini berbeda dengan seorang dokter yang menangani seorang pasien, yang

memang datang untuk berobat dan menjalani proses pengobatan.

Meskipun demikian, bukan berarti profesionalisasi guru merupakan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Profesionalisasi justru merupakan tantangan bagi siapa saja yang menggeluti dan terlibat dalam pekerjaan sebagai guru, dan harus dapat diaktualisasikan. Oleh karena itu, analisis tentang guru profesional diharapkan dapat lebih mendekatkan kita pada satu tujuan, yaitu terwujudnya guru yang profesional, yang mampu berperan sebagai “agen pembelajaran” sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

## **A. PENGERTIAN PROFESI**

Kata “profesi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb.) tertentu”. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dapat dan boleh dilakukan oleh orang-orang yang secara khusus dipersiapkan untuk itu. Dengan kata lain, profesi bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh sembarang orang, yang bekerja karena tidak memperoleh pekerjaan lain, oleh karena di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan.

Dari waktu ke waktu, konsep mengenai profesi terus mengalami perkembangan. Di Amerika, pada awal abad 20, profesi ditekankan pada *pelatihan* dan *kualifikasi*. Pelatihan dibuktikan dengan surat tanda tamat (atau sertifikat) mengikuti pelatihan, sementara kualifikasi dinyatakan dengan sejumlah karakteristik, termasuk ujian,

pengalaman, dan reputasi yang berhubungan dengan efektivitas pekerjaan. Definisi ini telah memunculkan beberapa implikasi, antara lain lahirnya suatu masyarakat eksklusif dan terciptanya hubungan yang bersifat vertikal antara seorang profesional dan supervisor atau pihak-pihak lain yang merumuskan norma-norma profesi.

Ketika reformasi bergulir dan semangat kebebasan berkembang, berbagai tuntutan profesi telah melahirkan definisi alternatif. Definisi ini di satu pihak mendorong dan mengembangkan otonomi serta kemandirian seorang profesional, sedang di pihak lain menitiktekan pada pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan pihak yang dilayani (klien). Menurut definisi ini, seorang profesional adalah orang yang terlibat secara luas dalam suatu posisi untuk mempengaruhi nasib kliennya. Dengan kata lain, seorang profesional menjalin hubungannya secara aktual ataupun potensial dengan kliennya dalam bentuk yang disebut hubungan hidup-mati (*life and death relationship*). (Dirjen Bimbagais, 2001: 6)

Di samping itu, hubungan yang terjalin antara profesional dan klien bersifat horizontal dan ekuivalen. Implikasinya, seorang profesional dituntut tidak hanya untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum-hukum dan aturan-aturan teknis yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi juga tentang karakteristik dan kondisi kliennya. Orang yang profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang kepribadian, motivasi, dan aspirasi klien atau orang-orang yang dilayaninya.

## **B. INDIKATOR PROFESI**

Suatu jenis pekerjaan pada umumnya akan dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan hasil yang baik jika

dikerjakan oleh orang yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang itu. Kemampuan atau keahlian ini dalam tingkatan yang paling dasar dan sederhana ditandai oleh keterampilan kerja (Mohamad Ali, 1989 : 33).

Keterampilan kerja seseorang diperoleh dari latihan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan teknik dan prosedur tertentu. Dengan demikian, teknik dan prosedur kerja itu merupakan kegiatan yang sudah terkondisi. Meskipun demikian, penguasaan akan teknik dan prosedur kerja bukan satu-satunya indikator yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki keterampilan kerja. Penguasaan itu harus ditunjang pula oleh pengetahuan yang memadai.

Walaupun keterampilan kerja merupakan salah satu indikator dari suatu profesi, akan tetapi tidak setiap orang yang memiliki keterampilan bekerja pada suatu bidang dapat disebut sebagai seorang yang profesional. Orang yang hanya memiliki sesuatu keterampilan teknis saja disebut sebagai orang yang memiliki keterampilan "*vokasional*", tetapi orang yang tingkatan keterampilan kerjanya mencapai taraf yang lebih tinggi (didukung oleh konsep dan teori tertentu), baru dikatakan sebagai seorang yang "*profesional*" (Mohamad Ali, 1989 : 34).

Keterampilan vokasional dapat saja dimiliki oleh orang yang hanya menempuh jenjang pendidikan tingkat rendah ataupun menengah. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan, tanpa menempuh jenjang pendidikan formal pun, dengan melalui latihan khusus dan pengalaman kerja secara terus menerus, seseorang dapat memiliki keterampilan semacam itu. Sedangkan keterampilan yang ditunjang oleh landasan konseptual dan teoritis, pada umumnya hanya dimiliki oleh orang yang

telah menempuh jenjang pendidikan keahlian khusus atau jenjang pendidikan tinggi.

Di samping itu, suatu jabatan profesional bercirikan adanya sifat kepekaan terhadap implikasi sosial dari pekerjaannya. Ini dimaksudkan bahwa dampak dari hasil kerjanya yang terlihat dalam masyarakat selalu ditanggapi oleh sang profesional itu. Dengan demikian dimungkinkan berkembangnya bidang yang ditekuni berjalan sejalan dengan dinamika kehidupan. Jadi, suatu pekerjaan profesional menuntut adanya syarat-syarat tertentu yang oleh Mohammad Ali (1989 : 35) disebutkan antara lain :

1. Menuntut adanya keterampilan yang berlandaskan pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan keprofesiannya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan tinggi.
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
5. Memungkinkan pengembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Berbeda dengan apa yang dikatakan Mohamad Ali di atas, Dirjen Bimbingan Kelembagaan Agama Islam pada Departemen Agama (2001 : 7) menyebutkan bahwa indikator profesi pada umumnya berkisar pada pokok-pokok sebagai berikut : (1) **Kompetensi** yang didasarkan atas wawasan teoritis, (2) Melalui ujian (**sertifikasi**), (3) **Organisasi profesi**, (4) Mengikuti **kode etik** (*code of conduct*), (5) **Pelayanan altruistik** (mementingkan dan membantu orang lain, dan (6) **Vokasional** (sumber penghidupan).

Indikator-indikator tersebut di atas akan dijelaskan

di bawah ini dengan aplikasinya pada profesi keguruan.

### 1. **Kompetensi berdasar wawasan teoritis**

Suatu profesi memerlukan kompetensi khusus, yaitu kemampuan dasar berupa keterampilan menjalankan pekerjaan atau tugas-tugas rutin sesuai dengan petunjuk, aturan dan prosedur teknis. Akan tetapi, kompetensi khusus saja belum cukup untuk menjadikan suatu pekerjaan menjadi sebuah profesi. Dalam profesi, keterampilan dan kecakapan perlu didasarkan atas wawasan teoritis. Itulah sebabnya mengapa banyak pengrajin yang terampil, yang memiliki kemampuan khusus dan luar biasa, tidak dapat disebut sebagai orang yang profesional.

Seorang guru misalnya, belum dapat disebut sebagai guru profesional hanya dengan memiliki kompetensi khusus. Bisa jadi ada seorang guru yang memiliki *tricks of trade* (kiat-kiat dalam melakukan tugas mengajarnya) yang memungkinkannya untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dengan sangat efektif meskipun ia tidak memiliki wawasan teoritis tentang bagaimana dan mengapa dia berhasil. Guru semacam ini baru bisa disebut sebagai orang yang memiliki keterampilan “vokasional” ketimbang sebagai seorang “professional”.

Wawasan teoritis akan membimbing guru dalam menghadapi kondisi apapun, membuka jalan untuk melakukan eksperimen, serta memodifikasi prosedur lama dan menciptakan prosedur baru, sehingga mampu mengubah suatu keadaan yang sulit menjadi sebuah kesempatan atau peluang, bukan kegagalan. Dengan kata lain, wawasan teoritis yang dimiliki oleh guru akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi dinamis dan fleksibel.

Adapun wawasan teoritis yang perlu dimiliki oleh

guru menurut Dirjen Bimbagais (2001 : 10) mencakup pemahaman yang luas tentang pokok-pokok sebagai berikut :

- a. hakikat kepribadian manusia,
- b. teori belajar,
- c. nilai-nilai pendidikan,
- d. syarat-syarat komunikasi yang efektif,
- e. pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan peserta didik,
- f. ide-ide dasar dan struktur teoritis mata pelajaran yang diajarkan.

Pokok-pokok di atas biasanya diperoleh dengan mempelajari psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan yang membahas faktor-faktor sosial dan kultural pendidikan, serta sejarah, filsafat, dan perbandingan pendidikan.

Dengan wawasan teoritis di atas, maka seorang guru akan memiliki kompetensi yang sinkron dengan bidang-bidang tugasnya, yaitu pengajaran, bimbingan, dan administrasi. Dalam pembahasan ini, kompetensi yang dimaksudkan (Dirjen Bimbagais, 2001 : 8) lebih dititikberatkan pada bidang pengajaran, yaitu yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- α. Penguasaan yang baik atas bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Penguasaan di sini tidak dimaksudkan sekedar menguasai seluk beluknya bahan tersebut, tetapi juga meyakini bahwa apa yang diajarkan itu memiliki kebenaran berdasarkan sumber-sumber yang dipercaya.
- β. Kemampuan untuk menyusun perencanaan program pembelajaran, dengan mengetahui arti dan tujuan perencanaan, serta menguasai secara

teoritis dan praktis unsur-unsur yang ada dalam perencanaan, bentuk-bentuk perencanaan, dan prosedur kegiatan pembelajaran.

- χ. Memiliki kreativitas untuk menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa, kemampuan untuk mengubah perencanaan apabila diperlukan, dan kemampuan untuk mengelola kelas.
- δ. Memiliki kemampuan melakukan penilaian kemajuan belajar peserta didik dengan memanfaatkan secara kreatif bentuk-bentuk penilaian yang ada.

Keempat kompetensi di atas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok kompetensi, yaitu penguasaan terhadap bahan pelajaran serta penguasaan terhadap teknik dan metode pengajaran. Kompetensi khusus tersebut jelas diperlukan, karena pendidikan bukanlah sebuah proses yang terjadi secara alamiah, tetapi dilakukan dengan sengaja (disadari). Hubungan yang sederhana dan berdasarkan akal sehat (*common sense*) saja belum cukup untuk bisa melaksanakan pengajaran yang baik. Untuk lebih jelas mengenai kompetensi guru ini, akan dibahas pada bab berikutnya.

## **2. Sertifikasi**

Setelah memiliki kompetensi yang didasarkan atas wawasan teoritis, seorang guru masih juga belum bisa langsung menjadi seorang guru profesional. Profesi menuntut proses pengakuan kompetensi. Proses ini disebut dengan “sertifikasi”. Untuk dapat menentukan bahwa seorang guru sudah memenuhi standar profesional maka

guru yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi.

Ada dua macam uji sertifikasi, yaitu :

- a. Sebagai bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka yang masih berstatus calon guru, dan
- b. Berdiri sendiri untuk mereka yang saat ditetapkannya Undang – Undang Guru dan Dosen (dalam hal ini UU Nomor 14 tahun 2005) sudah berstatus sebagai guru.

Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- a. kualifikasi akademik;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengalaman mengajar;
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- e. penilaian dari atasan dan pengawas;
- f. prestasi akademik;
- g. karya pengembangan profesi;
- h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memenuhi ketentuan persyaratan untuk penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat guru. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan guna melengkapi portofolio agar dapat memenuhi ketentuan untuk lulus, atau

- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi / penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Ada dua badan yang memiliki otoritas untuk memberikan sertifikat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki kompetensi untuk menjalani suatu profesi. **Pertama**, lembaga pemerintahan yang berfungsi menjamin kepentingan umum bahwa orang yang direkrut benar-benar memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dalam hal ini, lembaga pemerintah tersebut dapat meminta orang yang menekuni profesi itu untuk menjadi tenaga ahli dalam rekrutmen. **Kedua**, organisasi profesi itu sendiri. Organisasi ini tentunya akan berhati-hati dan bersikap selektif dalam melakukan rekrutmen. Kesalahan dalam hal ini bukan hanya akan merugikan kepentingan umum, tetapi organisasi itu sendiri akan kehilangan prestise dan kepercayaan publik.

### 3. Organisasi profesi

Para profesional memerlukan sebuah wadah organisasi profesi yang berfungsi untuk mewadahi kegiatan, gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi. Hal ini disebabkan karena aspirasi mereka baik mengenai idealisme maupun kesejahteraan yang merupakan implikasi dari tuntutan kompetensi tugas, seringkali memerlukan perjuangan bersama. Aksi bersama seringkali lebih efektif untuk meningkatkan kekuatan para anggota daripada aksi perorangan.

Bagi guru-guru di negara kita, wadah ini telah ada, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI yang didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November

1945, merupakan wadah dan perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa (Hermawan, 1989). Adapun salah satu tujuan dari PGRI, adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Basyuni Suryamihardja (dalam Soetjipto, 1999 : 35) ada empat misi utama PGRI yaitu : (a) Misi politis/ideologi, (b) Misi persatuan/organisatoris, (c) Misi profesi, dan (d) Misi kesejahteraan. Dalam praktek pelaksanaan dari keempat misi tersebut, dua misi pertama – politis/ideologis dan persatuan/organisatoris – lebih menonjol realisasinya daripada kedua misi yang lain. Ini dapat dibuktikan dengan telah adanya wakil-wakil PGRI dalam badan legislatif seperti DPR dan MPR. Sedangkan misi ketiga dan keempat, yaitu – misi profesi dan misi kesejahteraan – masih harus diperjuangkan melalui perjuangan yang terus menerus.

#### **4. Kode etik (Code of Conduct)**

Seorang profesional memiliki kemampuan dan kekuatan unik yang bisa saja digunakan untuk tujuan baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, di dalam profesi ada kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh para anggotanya. Dengan kata lain, kemampuan dan kekuatan itu mensyaratkan tanggung jawab moral khusus dari pemiliknya untuk mengarahkannya kepada tujuan yang baik.

Kode etik adalah norma yang harus dimiliki dan dihayati oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik ini didasarkan pada dua prinsip, yaitu :

- α. Keamanan dan integritas profesi itu sendiri.

Suatu profesi akan dihargai oleh masyarakat apabila anggota-anggotanya mampu menjalankan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan kompetensinya. Makin tinggi kompetensi itu, makin tinggi pula penghargaan yang diberikan masyarakat terhadapnya.

- β. Ketulusan dan keikhlasan dalam memberikan layanan.

Seorang profesional dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya tidak semata-mata bertujuan untuk mengejar kepuasan materi (duniawi) ataupun penghargaan profesi, tetapi juga didorong oleh cita-cita luhur untuk memberikan layanan secara tulus ikhlas. Prinsip kedua inilah yang dimaksud dengan “pelayanan altruistik”.

## 5. Vokasional

Alasan lain yang membuat suatu pekerjaan disebut profesi ialah karena pekerjaan itu merupakan sumber utama mata pencaharian seseorang. Profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh sembarang orang yang bekerja karena tidak mendapat pekerjaan lain. Dengan indikator ini, seorang profesional dibedakan dari amatir.

Pekerja amatir mungkin akan melakukan pekerjaannya untuk mencapai prestasi maupun kepuasan batin, sedangkan seorang profesional melakukannya terutama untuk mencapai prestasi sekaligus imbalan materi yang memadai. Meskipun demikian, seorang profesional tidak akan memandang pekerjaannya semata-mata sebagai “pekerja bayaran”. Pekerjaan ini lebih merupakan suatu panggilan yang membuatnya beridentifikasi dengan pekerjaan dan memenuhi sebagian besar tujuan hidupnya.

Selain itu, seorang amatir bekerja hanya dalam waktu-waktu tertentu demi penyaluran minat ataupun kesenangan (hobi)nya, sementara profesional bekerja secara teratur dan terus menerus. Demikian pula ketika menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat, seorang profesional akan memandangnya sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab karena aktivitasnya terkait dengan profesinya, sementara seorang amatir tidak mempunyai pandangan seperti itu.

## **C. GURU SEBAGAI JABATAN PROFESIONAL**

### **1. Pengertian Profesional**

Kata profesional berasal dari kata "profesi" yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb.) tertentu. Pengertian ini mengandung implikasi bahwa profesi hanya dilakukan oleh orang-orang yang secara khusus dipersiapkan untuk itu (Dirjen Bimbagais, 2001 : 5).

Kata profesi yang semula berarti bidang pekerjaan, kemudian berubah menjadi profesional bermakna memberikan sifat pada bidang pekerjaan dimaksud. Profesional sendiri berarti : *"a vocation an wich profesional knowledge of some department a lerning science is used in its applications to the of other or in the practice of an art found it"*. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat professional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini maka pekerjaan profesional memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam pelaksanaannya (Uzer Usman, 2000 : 14).

Sedangkan menurut Undang Undang RI Nomor 14

Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan profesional adalah, “pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.

Selain memberikan makna sifat, kata profesional juga dapat menjadi kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian (guru, dokter, hakim, dan sebagainya). Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat professional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak memperoleh pekerjaan lain (Nana Sudjana dalam Uzer Usman, 2000 : 14).

Professional terkait dengan kemampuan memahami tugas-tugas serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut secara lebih mendalam. Orang yang profesional tidak hanya mampu melaksanakan tugas pokoknya, namun juga mampu melaksanakan hal-hal yang terkait dengan keberhasilan tugas pokok tersebut (Siagian, 1997 : 197). Untuk menjadi profesional diperlukan pengetahuan yang relevan dengan bidang tugas yang digeluti. Pengetahuan ini didapat dari pendidikan dan pengalaman.

Professional dapat juga berarti memiliki karakteristik pemahaman teknik pekerjaan yang lebih baik dan lebih luas. Lebih baik diartikan sebagai pemahaman yang mendalam dan memahami keterkaitan antara tugas-tugasnya dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan itu.

Menurut Muhammad Zid (2006 : 4) seseorang dikatakan profesional apabila memiliki karakteristik

sebagai berikut :

- a. Memiliki komitmen yang kuat dan berjangka panjang terhadap keahlian mereka
- b. Memiliki loyalitas yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya daripada kepada pimpinannya
- c. Selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman.
- d. Dalam bekerja tidak terikat dengan jadwal regulernya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan perannya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya (Agus F. Tamyong, dalam Uzer Usman, 2000 : 15).

## **2. Profesionalitas Jabatan**

Sebagai jabatan profesional, profesi guru harus tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugasnya yang nampak dalam perwujudan unjuk kerja profesional. Menurut Muhammad Zid (2006 : 1), unjuk kerja profesional tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal;
- b. Meningkatkan dan memelihara citra profesi;
- c. Keinginan untuk senantiasa mengejar percepatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas serta keterampilannya;

- d. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi;
- e. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Selanjutnya, dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan (kompetensi) yang beraneka ragam. Kompetensi yang dimaksud menurut Muhammad Zid (2006 : 5) di antaranya adalah :

- a. Menguasai filsafat pendidikan termasuk di dalamnya kemampuan menguasai konsep, teori, dan proses pendidikan.
- b. Menguasai strategi belajar dan pembelajaran.
- c. Menguasai *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan aplikasinya dalam proses pembelajaran untuk mendukung penerapan strategi pembelajaran (*learning strategies*) yang dikembangkan oleh guru.
- d. Menguasai psikologi perkembangan dan psikologi anak.
- e. Menguasai berbagai teori belajar.
- f. Menguasai cara berpikir dan karakteristik materi dari bidang studi / mata pelajaran yang relevan.
- g. Menguasai visi, prosedur dan keterampilan pengembangan kurikulum.
- h. Memahami administrasi pendidikan terutama tentang *management of learning* dan peraturan yang berkenaan dengan profesi.
- i. Memahami dan menguasai proses pendidikan nilai.
- j. Memahami peran dan pengaruh aspek sosial, kultural dan ekonomi terhadap proses pendidikan.

Keseluruhan kompetensi di atas bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan utuh.

Kompetensi tersebut menggambarkan kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki seseorang terkait dengan profesi tertentu. Kompetensi dimaksud berkenaan dengan bagian-bagian yang diaktualisasikan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, disebutkan bahwa pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Dalam konteks ini maka, kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang calon guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Pembahasan lebih lanjut tentang kompetensi ini dapat pembaca ditemukan pada bab selanjutnya dari buku ini.

#### **D. PRINSIP – PRINSIP PROFESIONALITAS**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengemukakan dalam Bab III pasal 7 ayat (1) bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan

- bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Menurut Munawar Sholeh (2007: 130 – 132), guru yang profesional adalah guru yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Ia adalah ahli dibidang teori dan praktek keguruan  
Guru profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan dan ahliu mengajarkannya. Dengan kata lain, guru profesional adalah guru yang mampu membelajarkan peserta didiknya tentang pengetahuan yang dikuasainya dengan baik.
2. Ia senang memasuki organisasi profesi keguruan  
Guru sebagai jabatan profesional seharusnya senang memasuki organisasi profesi dan merasa

memilikinya. Fungsi organisasi profesi selain melindungi kepentingan anggotanya juga sebagai dinamisator dan motivator anggota untuk mencapai karir yang lebih baik. Konsekuensinya, organisasi profesi turut mengontrol kinerja anggota, bagaimana para anggota dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

3. Ia memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai

Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Tugas yang dilakukan guru sebagai tenaga pendidik antara lain :

- a. pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing dan melatih
- b. pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki
- c. petugas kemasyarakatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik

4. Ia mampu melaksanakan Kode Etik Guru

Kode etik bagi suatu organisasi sangat penting dan mendasar, sebab kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Kode etik berfungsi untuk memotivasi setiap anggotanya guna meningkatkan diri, dan meningkatkan layanan profesionalismenya demi kemaslahatan orang lain.

5. Ia merasa memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab.

Otonomi yang dimaksudkan di sini adalah dalam

arti dapat mengatur diri sendiri. Guru yang memiliki otonomi berarti guru tersebut memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Kemandirian seorang guru dapat dilihat dari kemampuannya untuk membuat pilihan nilai, dapat menentukan dan mengambil keputusan sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang dipilihnya.

6. Ia memiliki rasa pengabdian pada masyarakat Pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemajuan. Guru sebagai tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat tersebut. Untuk itulah guru dituntut memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat khususnya dalam membelajarkan peserta didik.
7. Ia bekerja atas panggilan hati nurani Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani, sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan peserta didik.

Ciri – ciri guru profesional sebagaimana disebutkan di atas harus pula didukung dengan moral yang baik, karena moral tidak dapat dipisahkan dengan profesionalisme seseorang. Keduanya saling terkait secara kausal, yang satu menjadi penyebab yang lain, dan yang satu menjadi akibat dari yang lain. Bagaimana mungkin seorang guru dapat dikatakan profesional apabila tidak memiliki keutamaan moral.

Dalam konsep Azyumardi Azra (1999 : 165), ”guru” berarti orang berilmu yang arif bijaksana, maka faktor

moral harus berada di urutan teratas kualifikasi keguruan. Sedangkan faktor kompetensi keilmuan dan akademis berada di bawah kualifikasi moral. Bukan sebaliknya, karena jika guru dilihat sebagai fungsionaris pendidikan yang bertugas mengajar atas dasar kualifikasi keilmuan dan akademis tertentu, maka faktor terpenting dalam profesi keguruan adalah kualifikasi keilmuan dan akademis tersebut. Sedangkan kearifan dan kebijaksanaan yang merupakan sikap dan tingkah laku moral, tidak lagi signifikan. Dan hal ini tentu saja tidak boleh terjadi.

Moral dan profesionalisme juga memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan dunia global. Profesional dapat dianggap sebagai suatu akibat dari merebaknya arus globalisasi, dan globalisasi merupakan suatu sebab munculnya profesionalisme. Di sini, moral menjadi perekat sekaligus penawar hubungan keduanya. Seorang guru hendaknya selalu melekatkan dan menumbuhkembangkan keutamaan-keutamaan sebagai guru dalam dirinya demi memantapkan kualitas pelayanan dan pengabdianya kepada pemanusiaan manusia muda.

Untuk dapat meningkatkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugasnya, Munawar Sholeh (2007 : 138) menawarkan beberapa hal untuk dilakukan, baik lewat usaha guru itu sendiri maupun melalui usaha dan dorongan pemerintah, sebagai berikut:

1. Usaha meningkatkan kesejahteraannya

Persoalan kesejahteraan akan mempengaruhi kualitas dan profesionalisme guru. Oleh karenanya diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kebijakan pemerintah harus berpihak pada guru, bukan hanya sekedar janji. Apalagi tingkat kesejahteraan guru di

Indonesia cukup rendah dibanding dengan guru di negara lain, terlebih negara maju.

2. Usaha meningkatkan derajat pendidikannya  
Peningkatan kualitas guru akan dapat terwujud jika guru mau meningkatkan derajat pendidikan mereka. Dengan melakukan peningkatan derajat pendidikan, guru akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu materi pengajaran dan metode serta strategi pengajaran.
3. Memiliki budaya membaca dan berusaha meningkatkannya  
Untuk meningkatkan pengetahuan mereka, maka guru harus mau dan senantiasa menumbuhkan budaya membaca. Selain oleh dirinya sendiri, pemerintah dan masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menciptakan budaya membaca bagi guru.
4. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing dan kemampuan teknologi  
Jika guru memiliki kemampuan berbahasa asing dan menguasai teknologi, maka jaringan informasi yang memberi kemungkinan luas untuk penambahan pengetahuan guru akan semakin terbuka.
5. Mendapat dukungan dari sekolah untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengajar  
Institusi sekolah tempat guru mengajar perlu memberi dukungan sepenuhnya bagi peningkatan profesionalisme guru. Hal ini dikarenakan peningkatan profesionalitas guru tidak bisa dilepaskan dari salah satu peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan dan sebagai tempat di mana berbagai kebijakan diterapkan.
6. Meningkatkan dan mengefektifkan kegiatan

lembaga profesi

Untuk meningkatkan kualitas guru dan memompa profesionalisme guru, wadah profesi sangat diperlukan. Kegiatan ini selain bermanfaat sebagai transfer ilmu bagi sesama guru, dapat pula dipergunakan untuk menyamakan visi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

7. Partisipasi dalam penegakan hukum di bidang pendidikan

Setelah kebutuhan guru terpenuhi, harus ada upaya untuk mengawal agar tetap terlaksananya program tersebut. Pengawasan itu dapat dilakukan dengan adanya penegakan hukum. Keberadaan peraturan seperti itu mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung bila seorang guru tidak mampu meningkatkan kualitas diri serta peserta didiknya.

# **KEBEBASAN EKSPRESIF DALAM PENDIDIKAN : Sebuah Keharusan Membangun Paradigma Baru<sup>1</sup>**

## **ABSTRACT :**

*“The Right for Expression in Instructional Process” describes a shift paradigm in instructional process from having nothing to the right for expressions. It aims to build students’ independency, optimist and braveries. It is ranging from freedom in academic life to freedom of thought. It closely corresponds to democracy and reform.*

## **KATA KUNCI : kekerasan, peradaban, pertentangan Pendahuluan**

Hakekat kehidupan adalah perubahan dan dalam kehidupan yang selalu berubah tidak pernah ada kepastian. Hanya ada satu kepastian dalam kehidupan yang selalu berubah, yakni perubahan itu sendiri. Demikian Einstein dengan teori relativitas-nya. Hal ini merupakan *sunnatullah*, dimana alam selalu dan senantiasa berubah (*al-‘alamu mutaghayyiru*). Jika perubahan merupakan suatu kepastian, maka kesiapan untuk berubah menjadi kewajiban bagi manusia. Al-Qur’an sendiri menegaskan hal ini dalam

---

<sup>1</sup> Makalah ini dipresentasikan dalam kegiatan diskusi intern dosen Prodi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 19 Juli 2012.

Surah al-Ra'd ayat 11: "*Sesungguhnya Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah nasib mereka*". Ketidaksiapan manusia untuk berubah akan membuatnya tergilas oleh derasny arus perubahan.

Konsekuensi dari sebuah perubahan adalah hadirnya nilai-nilai baru dalam kehidupan, baik positif maupun negatif. Selain itu, kehadiran nilai-nilai dimaksud merupakan wujud dari nilai-nilai lama, walaupun tidak menjadi pengganti bagi nilai-nilai lama yang sudah terseleksi oleh ruang dan waktu. Perwujudan dan pergantian nilai ini sangat potensial membuat manusia terperangkap dalam suasana kebingungan dan ketidakmengertian (Piliang, 1999), sehingga dalam diri mereka tumbuh subur sikap pesimis (putus asa) dan pasrah pada keadaan.

Pendidikan adalah sebuah sarana yang melalui seleksi ruang dan waktu telah membuktikan dirinya mampu menyelamatkan manusia dari kebingungan dan ketidakmenentuan. Oleh karenanya, sangatlah wajar jika sejumlah harapan ditumpukan di pundak pendidikan. Salah satu harapan yang diamanatkan kepada pendidikan adalah membentengi manusia dari pengaruh negatif yang muncul sebagai salah satu konsekuensi perubahan zaman, pendidikan juga diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi kewajiban membaca dan menafsirkan fenomena (gejala) perubahan realitas sosial.

Sejalan dengan derasny arus perubahan, tuntutan terhadap dunia pendidikan juga berubah. Dalam *paradigma*<sup>1</sup> (cara pandang) pendidikan lama, tuntutan terhadap dunia pendidikan hanya berkisar pada persoalan aplikasi konseptual. Dengan paradigma ini, peserta didik diharap mampu berperilaku dan bertindak

dengan cenderung hanya berlandas pada apa yang telah ia terima dari gurunya. Namun perubahan yang demikian deras mengharuskan adanya pergeseran paradigma lama, maka pendidikan tidak akan mampu menghantarkan peserta didik untuk menghadapi realitas sosial yang sangat kompleks.

Paradigma baru yang mungkin ditawarkan untuk menghadapi situasi semacam itu adalah paradigma pendidikan yang menawarkan nilai kebebasan kepada peserta didik untuk berfikir dan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Demikian pula dengan tema pendidikan yang awalnya hanya terbatas pada persoalan peningkatan kualitas manusia atau peningkatan sumber daya manusia, bergeser pada persoalan pemberdayaan manusia yang harus dihargai sebagai makhluk potensi untuk berkualitas.

Pergeseran paradigma di dunia pendidikan, terutama yang terkait dengan tema dan teknik pengelolaan pendidikan, sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat terelakkan lagi (Tilaar, 2000). Realitas menunjukkan betapa dehumanisasi (pemberangusan/penghancuran nilai-nilai kemanusiaan) justru bermula dari sistem pendidikan yang ada (Azra, 1999). Contoh kecil dapat diamati dari sistem evaluasi yang dikembangkan dalam dunia pendidikan, dimana peserta didik diukur hanya dengan menggunakan standar penilaian kognitif belaka, pada hal ada aspek lain yang seharusnya juga diperhatikan, yaitu aspek sikap dan tingkah laku peserta didik, serta keunggulan-keunggulan lain yang mereka miliki.

Pada bagian lain, dunia pendidikan juga dapat diikutsertakan dalam mempertanggungjawabkan “kedangkalan rasionalitas” masyarakat Indonesia. Sekian

banyak *out-put* pendidikan yang telah dihasilkan oleh berbagai institusi pendidikan formal, namun tetap saja bangsa Indonesia menjadi konsumen terbesar bagi produk ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa lain. Hal ini disebabkan oleh kalangan tali moralitas yang mengikat erat pemikiran anak bangsa dalam mengikuti proses pendidikan. Dijadikannya “moral” sebagai trend melebihi objektivitas/rasional pendidikan di Indonesia sedikit banyaknya telah memperlambat gerak dan lincahnya rasio (daya pikir) peserta didik. Anehnya, pelanggaran dan penyimpangan moralitas justru semakin menjamur dan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini.

Terlepas di mana yang salah dalam pendidikan, namun kenyataan bahwa dalam kehidupan keberagaman kita selama ini, yang dibanggakan sebagai masyarakat yang religius, ternyata agama belum menampilkan peranannya sebagai faktor sublimatif (menyucikan dan menjadikan tulus ikhlas segala amal perbuatan karena ibadah kepada Allah) dan faktor integratif kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (secara individual menjadikan kepribadian yang utuh, tidak mudah goyah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup, sedang secara sosial menjadikan perekat/kohesif antara sesama manusia, menciptakan kebersamaan dan kedamaian dalam bermasyarakat) (Ahmadi, 2000). Di sinilah perlunya mengkaji ulang, memperbaharui dan merumuskan kembali konsep pendidikan agar lebih mampu berperan dalam mengisi dan menata perubahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat.

## **Pengertian Kebebasan**

Kebebasan (*freedom, hurriyyah*) secara terminologis

berasal dari kata “bebas” yang berarti: *pertama*, lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan lain sebagainya sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa); *kedua*, lepas dari (kewajiban, tuntutan, ketakutan dan sebagainya); tidak dikenal (pajak, hukuman, dan sebagainya); *ketiga*, merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh negara lain (Purwadarminta, 1976)

Sedangkan Masykuri Abdullah (1999) mengartikan kebebasan atau kemerdekaan sebagai tidak adanya suatu pemaksaan atau rintangan, sementara Werner Becker mendefinisikan kemerdekaan sebagai “seorang yang dalam batas-batas tertentu melakukan atau meninggalkan apa yang dia inginkan. Batas-batas ini mungkin bersifat biologis atau hukum positif”.

Sejalan dengan definisi di atas, Franz Magnis Suseno (1997) mengatakan bahwa “kebebasan adalah tidak adanya paksaan dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang melawan kehendak hati kita, atau adanya kemampuan menentukan diri sendiri.” Menurutnya arti kebebasan dapat dibedakan menjadi dua arti. *Pertama*, kebebasan sosial, yakni kebebasan yang kita terima dari orang lain, dan *kedua*, kebebasan eksistensial yakni kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri.

Lord Action menyatakan tentang asal mula kebebasan dalam diri manusia yaitu bahwa kebebasan bukanlah suatu yang telah dimulai oleh manusia secara kodrati, tetapi sesuatu yang perlu diperjuangkan. Hal ini berbeda dengan pendapat J.J. Rousseau beranggapan bahwa manusia telah lahir dalam kebebasan, tetapi di mana ia terbelenggu (Dister, 1993) Perbedaan ini berasal dari kondisi faktual di masyarakat. Action beranggapan bahwa perkembangan manusia menjadikan ia bebas dari

semula, sedangkan Rousseau menyatakan sebaliknya bahwa manusia kurang bebas pada awalnya, kemudian berangsur-angsur bertambah bebas.

Kebebasan selanjutnya dapat berarti positif sekaligus negatif. Secara sosial kebebasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan apapun yang diinginkan dengan tanpa mengganggu (bertentangan dengan kebebasan orang lain).

### **Kebebasan dan Manusia**

Kebebasan seseorang dimiliki semenjak ia lahir. Akan tetapi, secara biologis ia terbelenggu karena kelemahan dan kekurangannya dalam mengendalikan diri sendiri. Ketika seseorang tumbuh lalu berinteraksi secara sosial dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan seni budaya, maka saat itu terkuak realitas dan gambaran bahwa kaum yang lemah dalam berbagai segi, berhadapan secara tidak seimbang dengan kaum yang kuat. Masyarakat awam akan berhadapan dengan masyarakat terdidik atau intelektual. Warga negara berbenturan dengan tirani kekuasaan. Masyarakat ekonomi lemah dibelenggu oleh kelompok konglomerat yang semena-mena, dan masyarakat teknologi industri merasakan keterasingan yang mengungkung eksistensinya. Ini berarti manusia sedang menghadapi problem kemanusiaannya sendiri.

Oleh karena itu, pembebasan berarti memanusiaakan manusia (Dimiyati dan Roqib, 2000), maksudnya mengembalikan manusia pada jati diri kemanusiaannya yang sebenarnya. Itu merupakan hak sekaligus kewajiban. Upaya ini menjadi lebih penting lagi saat ditemukan bahwa banyak manusia yang tidak lagi bebas dan merdeka karena ia telah diperbudak oleh tuntutan

fisik, dorongan hawa nafsu, harapan-harapan, kekuasaan, kekayaan, bahkan oleh ketinggian pemikirannya sendiri. Untuk itu pembebasan terhadap kondisi ini menjadi solusi yang paling mendasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan mengangkatnya pada derajat yang tinggi dan mulia (Engineer, 1993)

Pembebasan adalah sebuah proses menuju kemerdekaan. Proses ini dapat dibagi ke dalam bentuk pembebasan dari segala sistem yang menindas dan ke dalam bentuk pembebasan untuk realisasi pribadi manusia, ekonomis, kultural dan keimanan bagi dirinya sendiri. Kemudian pada gilirannya ia mampu dan berani melaksanakan apa yang ingin dilakukannya itu, dengan tanpa ada gangguan dan tekanan dari apa dan siapapun.

Manusia adalah makhluk yang bebas. Kebebasan di sini pertama-tama dipahami sebagai kemampuan untuk menentukan diri, yakni kemampuan untuk mengambil sikap (memilih) terhadap bermacam-macam pengaruh dan penentuan yang ada. Kebebasan memilih ini oleh Louis Leahy dinamakan dengan kebebasan psikologis (Leahy, 1993). orang menyebutnya juga sebagai kualitas kehendak, yang dapat berbuat atau tidak berbuat. Dan setiap kali kebebasan kehendak manusia ini dibicarakan, kebebasan psikologis itulah yang dimaksudkan. Kebebasan itu melekat pada keberadaan manusia. Manusia baru dapat menghayati kebebasan seperti itu secara penuh bila ia mencapai kesempurnaan eksistensinya.

Kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi merupakan cita-cita yang pantas dikejar oleh setiap insan. Kebebasan itu adalah kemandirian sebagai manusia. Manusia di sebut “bebas” bila ia dapat melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang menghalangi perwujudan dirinya

secara penuh. Kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi menggambarkan manusia yang memiliki suatu pendirian atau prinsip hidup yang jelas dan diyakini kebenarannya, serta sanggup mempertanggungjawabkannya kepada semua orang yang memintanya (Satmoko, 1999)

### **Kebebasan dan Tujuan Pendidikan**

Kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi pantas dijadikan tujuan akhir pendidikan itu sendiri. Bila kesempurnaan eksistensi dipahami sebagai kemandirian, maka sesungguhnya pengertian kebebasan juga termuat dalam rumusan tujuan tersebut.

Untuk mencapai kesempurnaan eksistensi manusia sebagai makhluk yang bebas, perlu diupayakan suatu pendidikan yang tidak hanya menyangkut pengalihan pengetahuan dan latihan keterampilan semata, melainkan juga pembentukan watak dan sikap hidup. Pendidikan seperti itu tentu tidak terbatas hanya pada pendidikan formal di sekolah, melainkan juga pendidikan informal dalam keluarga maupun pendidikan nonformal dalam masyarakat. Pendidikan formal di sekolah lebih memberi tekanan perhatian pada pembinaan intelektual peserta didik. Namun pendidikannya akan pincang bila peserta didik sama sekali tidak mendapatkan bantuan untuk tumbuh sebagai pribadi yang semakin dapat menghayati kebebasannya secara bertanggung jawab.

Membantu para peserta didik untuk semakin menghayati kebebasannya serta bertanggung jawab berarti membantu mereka untuk memperoleh pengertian yang benar tentang kebebasan dan untuk hidup sesuai dengan pengertian tersebut. Bebas berarti mempunyai kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri dalam kondisi objektif

yang melingkupi dirinya. Mampu menentukan diri sendiri berarti dapat mengambil sikap terhadap kondisi objektif tersebut. Peserta didik perlu dibantu untuk berani mengambil posisi dan tidak hanya ikut-ikutan saja.

Selain menjadikan kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi, sebagai tujuan akhir pendidikan, kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas berdampak bahwa anak sebagai peserta didik adalah subjek dan bukan sekedar objek pendidikan. Istilah “peserta didik” mau menyatakan bahwa dalam pendidikan itu terjadi komunikasi dua arah. Bukan hanya pihak yang mendidik yang aktif dan menemukan, tetapi juga pihak yang dididik. Pola pendidikan yang hanya berorientasi pada program dan tidak berorientasi pada anak didik mengandung bahaya verbalisme dan pencetakan manusia-manusia robot.

Verbalisme muncul karena yang dikejar dalam suasana pendidikan adalah program selesai dan paket pengetahuan tertentu masuk ke benak anak. Karena itu, anak cenderung menghafal saja tanpa mengerti konsep-konsep yang diterima. Mereka juga menjadi semacam manusia robot yang hanya menjalankan apa yang diperintahkan atau diprogramkan. Dalam suasana seperti itu, minat, bakat, perhatian, dan daya kreativitas anak tidak berkembang.

Dengan demikian, tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah upaya membebaskan manusia agar terlepas dari belenggu rohaniah dan jasmaniah sekaligus menghantarkan peserta didik ke jenjang kehidupan yang lebih baik.

### **Pendidikan dan Kebebasan Potensi Individu**

Pendidikan bukan hanya menjadi satu-satunya sarana bagi pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya

manusia (SDM). Pendidikan sekarang ini juga diarahkan pada usaha pemberdayaan manusia. Melalui pendidikan manusia Indonesia dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang kesemuanya bertujuan memberikan dasar bagi peningkatan kemampuan untuk menata, mengolah dan memanfaatkan secara bertanggung jawab sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa ini. Persoalannya adalah, mampukah pendidikan kita saat ini menggarap proyek besar tersebut? Mungkinkah pendidikan yang masih mengedepankan konsep persamaan hak tanpa memperhatikan perbedaan mendasar dalam hal potensi kecerdasan, keberanian dan kejujuran peserta didik, mampu meningkatkan sumber daya manusia? Berikutnya, mampukah pendidikan kita yang cenderung memotivasi (mendorong) peserta didik untuk berprestasi dalam standar nilai atau angka-angka, walaupun penguasaan materi pelajarannya terabaikan, melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan terampil? Dengan berdasarkan pada realitas yang telah terjadi, maka jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah “tidak”. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya *output* pendidikan kita yang memiliki tingkat rasionalitas tanggung, cerdas namun kurang terampil atau sebaliknya terampil tetapi tidak cerdas. Wajar saja jika banyak *output* pendidikan Indonesia yang kalah bersaing dengan bangsa lain, atau setidaknya tidak siap untuk bersaing.

Berdasarkan pada kenyataan seperti tersebut di atas, maka selanjutnya pendidikan harus diarahkan pada proses pembinaan potensi individual dan tidak lagi mengedepankan konsep persamaan hak yang cenderung pada proses pembinaan kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan

pencapaian tujuan dari program pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pembinaan potensi individu juga berarti penghargaan terhadap pemberian kebebasan kepada individu juga berarti penghargaan terhadap pemberian kepada individu untuk berkembang, yang berarti pula membebaskannya dari kekangan keterbatasan individu lain dalam kelompok (Freire, 1999).

Pendidikan yang senantiasa mengukur kemampuan rata-rata kelompok belajar dari peserta didik cenderung mengabaikan potensi besar yang terkandung dalam diri individu. Pola pendidikan tersebut akan berpengaruh pada penetapan kebijakan program penyajian materi, dimana kemampuan rata-rata kelompok selalu dijadikan sebagai landasan. Dengan sendirinya kebebasan individu untuk mengembangkan potensi kecerdasan dan keterampilannya secara cepat menjadi terhambat oleh keterbatasan individu yang lain (Bahm, 1995).

Selanjutnya pola pendidikan yang senantiasa memotivasi peserta didik melalui standar nilai tertentu selayaknya diperbaharui. Pembaharuan dapat dilakukan dengan cara merubah target pendidikan yang selama ini diwujudkan dalam bentuk evaluasi normatif rasionalistik (standar nilai hasil kerja ratio) kepada target belajar siswa dalam bentuk evaluasi empirik rasionalistik (standar pengalaman<sup>2</sup> hasil kerja ratio).<sup>3</sup> Sifat positif dari bentuk evaluasi kedua adalah mampu meminimalisir (memperkecil) sifat dan sikap tidak jujur yang mungkin saja potensial berkembang dalam diri peserta didik.

Guna mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, penghargaan terhadap kebebasan individu untuk pencapaian tujuan pendidikan, penghargaan terhadap kebebasan individu untuk mengekspresikan

(menampakkan atau mewujudkan) potensi yang dimilikinya menjadi sebuah keharusan. Kebebasan berekspresi bagi peserta didik selama ini telah dirampas oleh kewibawaan para guru. Kasus ketidakbebasan individu berekspresi ini sering terjadi di saat guru terlalu mengatur arah pemahaman atas materi pelajaran yang disajikan. Contoh kecil dapat dilihat ketika seorang guru kesenian yang meminta siswanya untuk menggambar sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau hayalkan. Namun setelah siswa mengekspresikan pikiran dan hayalan mereka, dengan kewibawaannya si guru mengomentari lukisan atau gambar tersebut, bahkan ironisnya guru itu juga memberikan nilai, pada hal pikiran dan hayalan adalah azali dari hakekat kebebasan manusia yang tidak mungkin untuk dicampuri apalagi diatur oleh orang lain (Krapiec, 1983).

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membangun daya demokrasi, dimana kewibawaan guru tidak harus diciptakan namun selayaknya ia tercipta dengan sendirinya (Brameld, 1961). Pendidikan hanya merupakan sarana bagi proses interaksi potensi antara individu yang didalamnya terkandung pengalaman dan pengetahuan (Barbu, 1981). Dengan demikian, kewibawaan guru dalam proses pendidikan tidak layak menjadi genta kematian bagi kebebasan ekspresif para peserta didik.

## **Kebebasan Ekspresif Dalam Pendidikan**

### **Makna Kebebasan dalam Pendidikan**

Yang dimaksud dengan kebebasan dalam pendidikan, bukan berarti peserta didik harus melepaskan diri dari ikatan guru dan terputus dari manusia lainnya, serta hanya berfikir tentang dirinya sendiri. Kebebasan yang diinginkan dalam pendidikan adalah suatu proses yang diciptakan oleh guru

atau pendidik agar peserta didik memiliki kebiasaan bebas secara individu dan mendidiknya agar mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan kehidupannya tanpa harus bergantung pada orang lain. Kebebasan dalam pendidikan diarahkan untuk membangun kemandirian, sifat optimis dan berani memanfaatkan kekuatan yang dimiliki.

Adapun yang menjadi dasar bagi adanya kebebasan dalam pendidikan adalah sebuah hadits yang menyatakan:

*“Janganlah di antara kamu sekalian menjadi orang fanatik yang selalu mengatakan, saya mengikuti manusia yang lain, jika mereka menganggap baik maka saya menganggap baik juga, jika mereka menganggap jelek maka saya menganggap jelek. Bersikaplah kamu sekalian dengan tegas, jika mereka menganggap baik hendaknya kamu menganggap baik dan jika mereka menganggap jelek janganlah kamu menganggap jelek bersama mereka”.*

Orang yang fanatik berdasarkan hadits di atas adalah orang yang menghilangkan otoritas pemikirannya sendiri yang semestinya ia kembangkan. Orang fanatik akan kehilangan kemandirian sekaligus kehilangan prestasi dan prestise hidupnya. Sebab, di antara sifat-sifat yang mendasar yang harus dimiliki setiap individu untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan adalah percaya diri dan berpegang teguh paada kepercayaan yang ada dalam dirinya (al-Abrasyi, 1996). Dengan kepercayaan terhadap diri sendiri atau sikap optimistik, seseorang dapat mengaktualisasikan potensi dirinya untuk menyikapi dan mengatasi berbagai problem dalam kehidupannya.

## **Macam-macam Kebebasan Ekspresif dalam Pendidikan**

### **Kebebasan Akademik<sup>4</sup>**

Kebebasan akademik menurut *Enchyclopedia of Religion*

adalah:

.....tidak ada pembatasan, hukuman dan intimidasi berkaitan dengan kegiatan tradisional insan akademis, terutama yang menyangkut studi dan penelitian-penelitian yang dilakukan, mengutarakan pandangan, hasil-hasil temuan dan opini yang diyakini, melalui lisan atau publikasi, betapapun dianggap usang ataupun bercorak subversif, bijaksana maupun kolot (Altwaijri, tt).

Russel Kirk, seorang budayawan konservatif mengatakan bahwa definisi yang diberikan W.T. Couch tentang kebebasan akademik adalah definisi terbaik yang pernah ditemuinya. Couch mengatakan bahwa kebebasan akademik adalah:

.....prinsip yang dirancang untuk melindungi guru dari aneka bahaya (resiko) yang cenderung mencegah atau menghambat kewajiban-kewajiban yang ia pikul di tengah medan pencarian kebenaran (Altwaijri, tt).

Sedangkan Azyumardi Azra mengatakan bahwa kebebasan akademis adalah kebebasan dosen atau ilmuwan secara personal dalam pengajaran dan penelitian untuk mencapai kebenaran tanpa khawatir atau takut kepada hukum, pemecatan, dan sebagainya (Azra, 2000).

### Kebebasan Akademik dalam Islam

Untuk meneliti sejarah dan perkembangan konsep-konsep yang bersumber dari Islam, seseorang harus merujuk kepada dua sumber yang utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dua sumber ini memang tidak menyajikan definisi dan peraturan secara terperinci mengenai kebebasan akademi, akan tetapi secara implisit, prinsip-prinsip dasar dan garis-garis besar yang berkaitan

erat dengan definisi dan peraturan tentang kebebasan akademi dapat ditemukan di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar dan garis-garis besar tersebut terdapat pada Syari'ah Islam, politik ekonomi dan masyarakat.

Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar dan garis-garis besar secara global, tidak memaparkannya secara rinci tentang metode-metode penerapannya kepada segenap generasi muslim. Dua sumber utama Islam juga menyajikan prinsip-prinsip yang dapat menjawab segala kebutuhan dan suasana masing-masing terhadap sejarah yang selalu mengalami perubahan secara dinamis. Oleh karenanya, untuk melacak sejarah dan perkembangan kebebasan akademik dalam Islam, pertama kali yang harus diketahui adalah metode versi Islam, dengan mengkaji kedua sumber utama ajaran Islam itu, kemudian berusaha memahami suatu pengetahuan dan orang yang memunculkannya, serta aneka perbedaan pendapat yang timbul baik yang berkaitan di bidang konsep maupun ideologi.

Islam mengakui dan memperbolehkan perbedaan pendapat. Bentuk yang pertama adalah perbedaan dalam masalah-masalah ijtihad. Bentuk yang kedua adalah perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan keilmuan yang lain. Berkaitan dengan ijtihad, Said Ramadhan (1970) memberikan komentar: "Tidak mungkin ada upaya pengambilan suatu keputusan sendiri jika tidak ada kelonggaran terhadap kebebasan berfikir dan berpendapat".

Di lain pihak, Islam sama sekali tidak memberikan batasan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah keilmuan dan kesarjanaan yang lain (non-hukum). Islam tidak hanya memberikan dukungan, tetapi justru menuntut upaya maksimal dari umat manusia untuk menguak pintu-

pintu kebenaran dan ilmu pengetahuan. Kendati demikian, kebebasan yang diberikan itu bukan berarti tanpa kendali, namun tetap harus berpijak dan berpedoman kepada etika dan moralitas Islam.

Salah satu prinsip dasar yang diajarkan Islam adalah bahwa Allah menciptakan manusia dengan dibekali kekuatan menentukan suatu pilihan. Namun bila di kehendaki semua umat manusia tunduk dan patuh kepada-Nya, maka manusia tidak mempunyai pilihan atau kemampuan untuk menolak. Oleh karena itu, tidak ada paksaan dalam masalah kepercayaan.

Berdasarkan prinsip tersebut maka Islam sangat menjamin kebebasan beragama<sup>5</sup> Kebebasan ini tidak terbatas hanya pada pembangunan tempat ibadah dan pelaksanaan berbagai seremonial keagamaan, namun juga mencakup kebebasan berpolitik dan berfikir. Abu A'la al-Maududi menegaskan bahwa:

Dalam suatu negara Islam, semua warga negara bukan Islam mempunyai kebebasan yang sama untuk memeluk suatu kepercayaan, berpendapat, memberikan ulasan dan kebebasan berserikat seperti yang dinikmati oleh orang-orang Islam itu sendiri. Tetapi mereka juga harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam....Mereka juga diberi hak yang sama untuk melontarkan kritik terhadap Islam sebagaimana pemeluknya berhak untuk mengajukan kritik terhadap agama itu.... (Altwaijri, tt)

Hal yang sama juga dilontarkan oleh A. Rahman I. Doi:

Penduduk yang bukan Islam dalam suatu negara Islam dipersilakan menganyam hak-hak yang sama dengan hak-hak yang diberikan kepada orang-orang Islam. Termasuk

di dalamnya adalah hak untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapatnya di tengah tata pergaulan masyarakat. Mereka juga berhak menentukan kepercayaan yang diyakini, mengajukan pendapat dan ulasan melalui kata-kata, pertanyaan maupun protes... (Altwajri, tt)

Luasnya peranan agama merupakan salah satu dasar filosofis konsep kebebasan akademik dalam Islam. Segala sisi kebebasan akademik telah tercakup dalam lingkup agama, baik dalam filsafat maupun undang-undangnya. Kesatuan seluruh kegiatan manusia berada di bawah dominasi agama. Oleh karena itu, kebebasan akademik dalam Islam secara langsung berkait dan dipengaruhi oleh segenap dimensi kehidupan Islam.

Satu hal yang patut dicatat dari rumusan konsep kebebasan akademik adalah bahwa segenap tanggung jawab seluruh umat Islam secara spiritual tetap berkait dengan aspirasi-aspirasi dan pernyataan-pernyataan ideologinya. Kebebasan tidak merupakan hak pribadi yang berarti bahwa individu-individu mesti menyita hak-haknya dari negara atau masyarakat, tetapi merupakan suatu tugas atau kewajiban yang ditetapkan oleh kepercayaan yang dianut serta aspirasi-aspirasi ummah. Batasan-batasan terhadap kebebasan itu tidak diciptakan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh Allah. Oleh karenanya, batasan-batasan tersebut suci dan setiap pelanggaran terhadapnya berarti pelanggaran terhadap hukum Allah. H. Abdalati menulis:

Konsep kebebasan Islam tidak lain adalah suatu artikel tentang iman, suatu perintah tegas dari Yang Maha Pencipta. Kebebasan tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip fundamental berikut: pertama, kesadaran

manusia hanya tunduk kepada Allah saja, yakni Dzat yang kepada-Nya manusia memberikan tanggung jawabnya. Kedua, setiap manusia secara pribadi bertanggung jawab atas segala perilaku sekaligus akan memperoleh ganjaran dari perbuatannya. Ketiga, Allah telah mengajarkan manusia agar menanggung keputusan yang dibuatnya. Keempat, manusia dibekali bimbingan rohani dan kemampuan akal agar mampu mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya. (Altwaijri, tt)

#### *Kebebasan Berpikir dan Mengemukakan Pendapat*

Yang dimaksud dengan kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat ialah bahwa setiap orang berhak secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dan fenomena yang terlintas dalam benak pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya (gagasannya) serta mengemukakannya dengan berbagai cara (Wafi, tt.).

Termasuk dalam kebebasan berfikir di sini adalah kebebasan berilmu dan kebebasan berfikir ilmiah. Kebebasan dalam menuntut ilmu akan menyebabkan manusia terbebas dari kebodohan menuju kebijaksanaan; bebas dari kemelaratan menuju kecukupan; bebas dari ketergantungan menuju kemandirian; dan bebas dari tradisionalitas menuju modernitas (Su'ud, 2001).

Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berfikir ilmiah adalah bahwa setiap individu berhak menetapkan pemikirannya mengenai fenomena falak (cakrawala), alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan berpegang pada hasil pemikirannya (gagasannya) dan teori yang ia yakini kebenarannya serta mengemukakan pendapatnya dengan berbagai cara (Wafi, tt.).

Selain berfikir tentang fenomena alam, termasuk dalam berfikir ilmiah adalah mengadakan observasi dan eksperimen,<sup>3 5</sup> serta memanfaatkan akal dan intitusi.<sup>3 6</sup> Hal ini perlu karena ada realitas lain yang tidak dapat dijangkau oleh opanca indera, sehingga akal tidak dapat menjangkaunya karena keterbatasan manusia yang hanya dapat menjangkau fenomena. Untuk itulah Nabi SAW melarang seorang Muslim untuk berfikir tentang Dzat Allah, yang semua itu demi menjaga kebebasan manusia sendiri agar tidak terjerumus pada jurngag kesesatan berfikir yang tidak dalam wilayahnya dan tidak ada peralatannya.

### **Cara Menanamkan Nilai Kebebasan pada Peserta Didik**

Agar peserta didik memiliki nilai kebebasan, maka dalam pendidikan seorang pendidik harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mentradisikan peserta didik memikul tanggung jawab berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Siswa dibebaskan melakukan apa saja baik di rumah, sekolah maupun masyarakat tanpa harus bergantung pada orang lain, (2) Melibatkan peserta didik dalam mengatasi problematika hidup agar pada saatnya di masyarakat, ia telah memiliki keteguhan jiwa, semangat yang kuat, objektif, memiliki kekuatan iman, percaya diri, mampu melaksanakan tugas diri dan negaranya serta selalu mantap dan sukses dalam hidupnya. (3) Tepat dan bijaksana dalam memuji peserta didik agar mereka memiliki kepercayaan diri yang wajar dan sehat. Terlalu percaya diri bahkan mengisyaratkan bahwa orang tersebut sangat lemah. (4) Jangan memperbanyak perintah dan larangan sebab hal itu akan mematikan emosi dan kreatifitas siswa. Perintah dan larangan yang berlebihan sama artinya

dengan pengendalian, penggiringan, dan pengurangan kesempatan bagi peserta didik untuk berinisiatif dan pada gilirannya mereka akan bergantung dan kurang percaya diri. Bakat dan minatnya pun akan tumpul tak tergerakkan lagi. (5) Guru atau pendidik hendaknya memperhatikan kemampuan riil peserta didik, kemudian mengarahkan dan memotivasinya menuju pada kesempurnaan jiwa dan skill peserta didik (Dimiyati dan Roqib, 2000).

Hal mendasar dan harus diperhatikan oleh para pendidi adalah menanamkan sifat percaya diri yang menjadi landasan esensial bagi terwujudnya kesuksesan dalam hidup. Dengan kepercayaan, seseorang akan melakukan sesuatu yang menurutnya baik dan bermanfaat bagi dirinya dan masa depannya. Dengan kepercayaan, akan muncul insting kuat untuk meraih kesuksesan tersebut walaupun harus berbeda dengan yang lain.

Berpegang teguh pada kemampuan diri, otomatis menuntut kebebasan bagi setiap individu dengan tanpa menghilangkan atau merampas kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Untuk membentuk kemandirian diperlukan berfikir bebas dan tidak terpaku pada pendapat orang lain.

## **Kebebasan Dan Demokrasi Pendidikan**

### Arti Demokrasi Pendidikan

Berbicara tentang demokrasi pendidikan, maka yang dimaksud adalah pendidikan yang berprinsip dasar “rasa cinta dan kasih sayang” terhadap sesama. Dalam hal ini, pendidikan tidak membedakan tiap-tiap suku, ras, golongan, aspirasi politik, sekte, organisasi atau kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, pendidikan demokrasi

adalah pendidikan yang membawa keadilan bagi semua anggota masyarakat.

Demokrasi pendidikan telah dilakukan pada masa kejayaan Islam. Pada waktu itu, pendidikan tidak terikat pada peraturan-peraturan yang keras, ijazah-ijazah, pembayaran-pembayaran (SPP dan lain-lain), atau syarat-syarat yang bersifat penjajahan supaya tidak menjadi penghalang bagi generasi muda, laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dengan demikian pintu pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi setiap orang yang berkeinginan untuk belajar, kapan dan di mana saja. Inilah demokrasi yang hakiki di dalam pendidikan (Dimiyati dan Roqib, 2000).

Untuk menuju pada demokrasi pendidikan yang diharapkan, harus terpenuhi prinsip-prinsipnya. Di antara prinsip-prinsip yang ideal dalam pendidikan itu adalah : a) mengajarkan berfikir bebas dan mandiri dalam studi, b) kemerdekaan dan demokrasi dalam mengajar, c) sistem belajar yang individual, d) perhatian terhadap perbedaan individualitas peserta didik, dan e) perhatian terhadap bakat dan kecenderungan fitrah dari peserta didik.

Pendidikan demokrasi diwarnai oleh nilai keterbukaan dan sikap bebas. Makna demokrasi dengan sendirinya membutuhkan seperangkat kebebasan, baik kebebasan akademik, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan lainnya asal tidak mengganggu kebebasan orang lain. Demokrasi pendidikan membawa pendidikan bukan hanya sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan belaka, tetapi juga sebagai alat untuk mentransfer nilai dan kebenaran.

## Kebebasan sebagai Dasar dan Persamaan

Demokrasi akan tegak apabila ada kebebasan, dan kebebasan dapat berjalan bila ada nilai persamaan dan keadilan. Dasar persamaan pendidikan mengantarkan tiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan, dan karenanya bisa disebut dengan pendidikan kerakyatan.

Konsep pendidikan kerakyatan terdapat dalam sistem universitas rakyat yang sekarang diambil alih dan dipraktekkan di universitas-universitas Barat. Konsep ini didasarkan pada teori bahwa mencari ilmu tidak terkait kepada syarat-syarat yang ketat, usia tertentu, ijazah-ijazah formal, dan nilai-nilai yang dibatasi.<sup>6</sup> Lembaga-lembaga pendidikan terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang memiliki motivasi untuk belajar dan menuntut ilmu.

## Kebebasan dan Keadilan Pendidikan

Demokrasi tidak bisa tegak dan kuat apabila tidak dibangun di atas keadilan. Demokrasi dan keadilan tidak bisa tegak, apabila tidak dibangun atas kebebasan individu dan sosial yang proporsional. Laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan yang sama untuk mendapatkan segala hak kemanusiaan dan melaksanakan kewajibannya, menyuarakan pendapat baik lisan maupun tulisan dan bebas memilih jalan hidup yang dinyakininya.

Dalam pendidikan, keadilan mengandung implikasi adanya “perbedaan” perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Secara etis-moral adalah adil dan wajar apabila peserta diperlakukan menurut kemampuan, bakat dan minatnya. Termasuk adil juga apabila peserta didik dari daerah-daerah tertentu diberikan peluang untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meskipun jika dibandingkan dengan peserta didik dari

daerah lain, mereka lebih rendah kemampuannya. Hal ini dilakukan untuk mengangkat anak-anak yang kurang beruntung (*disadvantaged children*) baik anak yatim, anak gelandangan, serta anak-anak cacat fisik dan mental.

Pendidikan yang demokratis dan berkeadilan adalah pendidikan yang berfungsi membebaskan manusia (Dimiyati dan Roqib, 2000). Dalam hal ini berarti pendidikan mampu membawa peserta didik menjadi manusia yang mandiri, penuh inisiatif dan kepribadian, memiliki sejumlah kemampuan baik intelektual maupun praktis, serta mau dan berani menghadapi masalah-masalah hidupnya, bahkan mampu mencari jalan keluar. Pendidikan yang merata belum tentu mencerminkan nilai demokrasi dan keadilan apabila dalam pendidikan justru tergantung kepada orang lain, tidak mengambil inisiatif, tidak berani menyuarakan kebenaran dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kebebasan manusia menyuarakan hati nurani merupakan bagian tak terpisahkan dari khazanah intelektual. Manusia adalah makhluk yang bebas (*liberal*). Maksudnya adalah manusia bebas menentukan terhadap sesuatu yang sedang dihadapi. *Liberarisasi* mengandung arti tidak ada belenggu dan kekangan yang bisa terjadi. Akan tetapi jika dikatakan bebas di sekolah atau bebas belajar, tidak berarti para peserta didik bebas dari segala aturan dan tanggung jawab. Justru yang dimaksudkan di sini adalah bebas menentukan sikap terhadap segala aturan, tanggung jawab atau beban yang telah ditetapkan kepada mereka sebelumnya, dan boleh menentukan masa depannya. Ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan tidak diperkenankan melakukan intervensi untuk mengekang kebebasan peserta didik.

## **Paradigma Baru Pendidikan**

Dapatkah kita melahirkan manusia demokratis sehingga mampu memerankan dirinya sebagai anak bangsa dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Agar dapat melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis, maka reformasi (diperbaharui) adalah aspek regulatori, aspek profesionalitas, dan aspek manajemen.

Reformasi ketiga aspek tersebut amat diperlukan agar dapat menciptakan kondisi sekolah yang memungkinkan peserta didik dapat sepenuhnya mengembangkan bakatnya, serta dapat mengambil keputusan secara rasional tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

### Aspek Regulatori

Reformasi aspek regulatori dititikberatkan pada reformasi kurikulum. Kurikulum yang selama ini terpusat pada garis-garis program pengajaran yang semakin detail, tidak saja menyebabkan tujuan dan evaluasi pendidikan semata-mata ditujukan pada pengembangan kognitif, tetapi juga semua kegiatan pendidikan formal senantiasa didasarkan pada GBPP tersebut. Akibatnya, mata pelajaran menjadi steril, membosankan, tidak relevan dan tidak aplikatif dengan kehidupan masyarakat.

Oleh karenanya, reformasi aspek regulatori pendidikan ditujukan pada: (1) Merumuskan kembali tujuan pendidikan, tidak hanya aspek kognitif tetapi juga merupakan proses pembudayaan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, personal dan sosial peserta didik secara utuh. (2) Mengubah kurikulum

yang semula bertumpu pada GBPP menjadi bertumpu pada *basic Competencies* yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berdasarkan *basic competencies* ini, sekolah dapat merumuskan kurikulum yang harus disampaikan kepada peserta didik. Dengan demikian, aspirasi sekolah sangat dominan dalam pelaksanaan kurikulum sehari-hari. (3) Mengubah pola kerja guru yang semua mendasarkan pada reponsibility ke arah *accountability*. Diharapkan pada kurikulum mendatang tekanan guru adalah pada *accountability* yakni sejauh mana peserta didik sudah mencapai *basic competencies*. (4) Sebagai konsekwensi lebih lanjut akan terjadi perubahan pada sistem evaluasi dan bentuk buku teks siswa. Evaluasi lebih banyak dilaksanakan dengan esai dan porto folio. Adapun buku teks yang semua bertumpu pada GBPP akan bergeser kembali bertumpu pada struktur keilmuan.

#### Aspek Profesionalitas

Reformasi aspek profesi ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Dalam reformasi aspek profesi, yang perlu dilaksanakan antara lain adalah: (1) Mengembangkan kesadaran akan hak-hak politik guru sehingga mereka dapat bereaksi manakala hak-hak profesi guru terancam. Salah satu caranya adalah dengan memandirikan dan memperkuat organisasi profesi yang ada. (2) Menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada pendidik untuk menegembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya.

#### Aspek Manajemen

Adapun reformasi manajemen pendidikan ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan keputusan dan

kendali pendidikan pada level yang lebih dekat dengan proses pembelajaran. Dalam reformasi ini, yang harus dilakukan adalah: (1) Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan. Bentuk kebijakan ini adalah menumbuhkan *school based management*. (2) Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Dengan demikian peran masyarakat akan semakin besar untuk kemudian mewujudkan *community based school* (Zamroni, 2001).

Secara garis besar, reformasi ketiga aspek pendidikan tersebut di atas akan bermuara pada perubahan ke-13 aspek sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

### **Penutup**

Sebagai bagian dari dunia pendidikan, tentunya kita tidak ingin selalu dilibatkan dalam proses pertanggungjawaban atas berbagai persoalan bangsa ini, hanya karena pola pendidikan yang kita terapkan. Kita juga tidak ingin bangsa ini karam dan tenggelam dalam persoalan yang berkepanjangan hanya karena kita tidak mau selalu disalahkan. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah menyelamatkan bangsa ini melalui profesionalitas kita di dunia pendidikan.

Berbagai persoalan yang telah ada sedang dialami oleh bangsa Indonesia hingga saat ini seharusnya menjadi cambuk bagi kita untuk melakukan koreksi diri, betapa proses dan program pendidikan kita masih harus dibenahi sedemikian rupa. Untuk itu sudah sewajarnya kita melakukan pergeseran paradigma (sudut pandang) dalam dunia pendidikan, agar pendidikan yang kita geluti menjadi dunia yang subur namun tidak terbungkan oleh kesuburan itu, dunia yang penuh harapan namun tidak hampa dengan

ketidakpastian harapan.

Akhirnya, marilah kita landasi dunia pendidikan kita dengan dengan prinsip *rahmatan lil'alamin*, karena dengan prinsip ini manusia akan dihadirkan sebagai makhluk Tuhan yang dihargai sekaligus diajarkan untuk menghargai. Dan sebagai bagian dari dunia pendidikan, kita selalu berharap itu, semoga !

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud. 2001. *Reformasi Pendidikan Islam, Quo Vadis?* makalah disampaikan dalam diskusi Konsentrasi Pendidikan Agama Islam pada Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, tanggal 18 Juni.
- al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. 1996. *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, terj. Samsudin Asyaraifi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Altwaijri, Ahmad O. tt. *Academic Freedom in Islam and the West: A Study of Fundamental Phiosophy of Akademik Freedom in Islam and the West liberalism*, diterjemahkan oleh Mufid, *Islam, Barat dan Kebebasan Akademis*, Yogyakarta: Titian Ilahi.
- Asghar Ali Engineer. 1993. *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LkiS.
- Azyumardi Azra. 1999. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modersasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Wacana Ilmu.
- Azyumardi Azra. 2000. "IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi", dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat

- Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Dirjen Bimbagais.
- Bahm, Archie J. 1995. *Epistemology, Theory of Knowledge*, Albuquerque: World books Publisher.
- Barbu, Zevedei. 1971. *Society, Culture and Personality, An Introduction to Sosial Science*, Oxford: Basil Blackwell.
- Brameld, Theodore. 1961. *Education for The Emerging Age, Newer Ends and Stronger Means*, New York: Harper & Brother.
- Dister, Nico Syukur . 1993. *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Franz Magnes Suseno. 1997. *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius.
- Freire, Paulo. 1999. *Menggugat Pendidikan, Fundamentalisme Konservatif Liberal Anarkis*, disunting dan dialihbahasakan oleh Omi Intan Noani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Achmadi. 2000. “Reformasi sistem pendidikan Agama Islam dalam era reformasi (telaah filsafat pendidikan)”, dalam Ismail SM-Abdul Mukti (ed), *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- H.A.R. Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krapiec, Mieczyslaw. 1983. *I-Man, an Outline of Philosophical Anthropology*, New Britain: Mariel Publications.
- Louis Leahy. 1993. *Manusia Sebuah Misteri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- M. Muchjiddin Dimiyati dan Moh. Roqib, 2000. *Pendidikan Pembebasan*, Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia.
- Masykuri Abdullah. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramadan, Said. 1970. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. London: P.R. MacMillan. Limited.
- Retno Sriningsih Satmoko. 1999. *Landasan Kependidikan (pengantar ke arah Ilmu Pendidikan Pancasila)*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Wafi, Ali Abdul Wahid. tt. *Kebebasan dalam Islam*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Yasraf Amir Piliang. 1999. *Hiper, Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Zamroni M.A. 2001. *Pendidikan Untuk Demokrasi, Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

# **TAUHID SEBAGAI PARADIGMA PENDIDIKAN PEMBEBASAN<sup>1</sup>**

## **A. PENDAHULUAN**

Berbicara masalah pendidikan, secara tidak langsung kita akan membicarakan masalah manusia. Sulit bagi kita untuk memisahkan antara keduanya karena manusia adalah subjek sekaligus objek dari pendidikan. Pembicaraan tentang manusia dan pendidikan, akan membawa kita pada upaya untuk mengeksplorasi berbagai dimensi<sup>3</sup> kemanusiaan dalam perspektif pendidikan. Pertanyaan apa dan siapa sebenarnya manusia akan membawa ke arah pemahaman tentang manusia, yang pada gilirannya akan mengantarkan kita pada konsep pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia memiliki peran di muka bumi ini. Menurut Muhaimin (1993 : 63), setidaknya ada tiga peran yang menjadi tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yaitu sebagai hamba (*'abd*)<sup>5</sup>, khalifah<sup>6</sup>, dan pewaris para nabi (*warasatul anbiya*). Ketiga peran ini harus tetap dibingkai oleh fitrah<sup>7</sup> penciptaan manusia, yang secara

teologis, lahir dengan Dienul Islam dan dalam kesucian tanpa membawa dosa waris.

Aktualisasi fitrah dalam konteks sosiologis mensyaratkan adanya kebebasan untuk melakukan eksplorasi terhadap segenap potensi yang ada pada diri manusia. Karena manusia lahir dengan Dienul Islam, maka aktivitas tersebut harus dilandasi oleh semangat tauhid, karena tauhid merupakan esensi utama dari Dienul Islam tersebut. Dengan kata lain, tauhid merupakan paradigma bagi keseluruhan aktivitas manusia. Dengan tauhid, manusia menjalin hubungan dengan sesama manusia secara egaliter. Tidak ada superioritas dan inferioritas dalam jalinan antar manusia, karena tauhid hanya mengakui Allah SWT sebagai satu-satunya otoritas dan superioritas.

Sayangnya, dalam realitas sosial, banyak sekali penyimpangan dan penindasan yang terjadi pada manusia. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana bagi proses pembebasan, acapkali justru menjadi sarana yang membuat manusia semakin tertindas dan teralienasi<sup>8</sup> (terasing) dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Keterasingan itu seringkali justru (secara langsung atau tidak langsung) dipola dan dikondisikan sedemikian rupa oleh struktur, ideologi, opini dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan.

Dalam konteks inilah, tauhid sebagai paradigma pendidikan pembebasan menjadi sangat signifikan untuk mengembalikan manusia pada kebebasannya, mendudukan kembali manusia pada posisinya sebagai makhluk yang bebas. Oleh karena itu, tepatlah kiranya pendapat Ludjito (1995) yang menyatakan bahwa pendidikan harus tetap berpijak pada upaya memanusikan manusia sebagai makhluk yang bebas, di samping

menjadi sarana komunikasi antar manusia, manusia dan lingkungannya serta manusia dengan Tuhannya.

## **B. TAUHID DAN PENDIDIKAN ISLAM**

### **1. Makna Tauhid**

Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah (*Oneness of God*) (Amin Rais, 1987 : 13). Formulasi terpendek dari tauhid, menurut Yunahar Ilyas (1993:19) adalah kalimat *tayyibah* “*Laa Ilaaha illa Allah*<sup>9</sup> (tiada Tuhan selain Allah)”. Secara teologi, pengakuan tersebut mengandung kesempurnaan kepercayaan kepada-Nya dari tiga segi, yakni Rububiyah<sup>10</sup>, Mulkiyah<sup>11</sup> dan Ilahiyah<sup>12</sup>.

Tauhid dalam pengertian ini didudukkan dalam posisinya sebagai esensi agama Islam. Lebih dari itu, tauhid mendasari keseluruhan gerak aktivitas muslim, sehingga dengan bertauhid seorang muslim meniadakan otoritas yang datang bukan dari Allah. Dalam konteks ini, perlu kiranya kita perhatikan pernyataan Nurcholish Madjid (1995:5) yang mengatakan bahwa :

“kita benar-benar telah bertauhid apabila kita tidak hanya “percaya” kepada adanya Allah, tetapi harus pula “mempercayai” Allah itu dalam kualitas-Nya sebagai satu-satunya yang bersifat keilahian atau ketuhanan, dan sama sekali tidak memandang adanya kualitas serupa kepada sesuatu apapun yang lain. Dan sebagai konsekuensinya, karena kita “mempercayai” Allah, maka kita harus bersandar sepenuhnya kepada-Nya. Dia-lah tempat menggantungkan harapan, kita optimis kepada-Nya, berpandangan positif kepada-Nya, menaruh kepercayaan kepada-Nya, dan bersandar

(tawakal) kepada-Nya”.

Implikasinya, jika manusia telah bertauhid sebagaimana digambarkan oleh Nurcholish Madjid di atas, maka manusia tidak saja akan menjadi bebas dan merdeka, tetapi lebih dari itu, ia juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia lain. Yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujuraat/49 : 13)

Pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dengan sendirinya menempatkan manusia dalam posisi dan kedudukan yang sama yaitu sebagai ‘abd Allah (hamba Allah). Tauhid menekankan prinsip centrality on God (segala sesuatu terpusat pada Tuhan). Tauhid melahirkan prinsip unity of mankind dimana umat manusia merupakan satu kesatuan yang tunduk dan patuh kepada Allah (Amin

Rais, 1998). Berkaitan dengan prinsip ini, Muhammad Fazlurrahman Anshari (1994 : 164) menegaskan :

*Coming to human beings: God, the One, has created them all; and He originated the existence of human species on the earth through one original pair of man and woman. This gives us the Qur'anic principles of the Unity of Mankind, in which all prejudice of race, colour, case and sex are obliterated and the only principle of distinction in respect of status is achievement in term of spiritual and moral character and knowledge. As regards respect for human dignity, it is, in the Qur'anic view, the birthright of every human being.*

## **2. Konsep Pendidikan Islam**

Menurut Al-Syaibany (1979 : 399), pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Mohammad Fadhil al-Jamaly (1986:3), pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya.

Proses tersebut mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar)<sup>13</sup>. Pendapat ini didukung dengan mengutip firman Allah SWT dalam

surat al – Nahl ayat 78 yang berbunyi :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (Q.S. al-Nahl : 78)

Hasil seminar pendidikan Islam Indonesia tahun 1960 (dalam Arifin, 1993 : 15) memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya pendidikan Islam mengandung pengertian :

- a. Upaya sadar untuk mengubah tingkah laku individu dan kehidupannya ke arah yang lebih baik dan berarti.
- b. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengajar, mentransfer ilmu, menanamkan nilai-nilai luhur, memupuk dan mengarahkan perkembangan jasmani dan rohani, memberikan latihan, bimbingan bahkan pengawasan.
- c. Semua upaya yang dilakukan itu mestilah didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang hakiki.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendidikan

Islam adalah suatu proses yang dilakukan secara bertahap, senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membimbing dan mengarahkan seluruh potensi manusia agar dapat berkembang menuju terbentuknya manusia yang utuh dan berkepribadian utama. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus mengembangkan manusia yang utuh sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam, sehingga pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam itu sendiri.

Pendidikan Islam sebagai suatu proses penemuan jati diri kemanusiaan bermakna bahwa manusia tidak otomatis menjadi manusia yang sebenarnya, tanpa bantuan pendidikan. Selama manusia menjadi manusia, maka dia tetap memerlukan pendidikan, dan oleh karenanya pendidikan berlangsung seumur hidup.

### **3. Manusia dalam Pendidikan Islam**

Dalam Pendidikan Islam, manusia diletakkan pada posisi sentral dalam usaha-usaha pendidikan yang dilakukan. Oleh karena itu untuk menentukan aspek-aspek dalam Pendidikan Islam harus terlebih dahulu diketahui hakikat manusia menurut Islam. Pertanyaan siapa sebenarnya manusia, harus mendapatkan jawaban yang memadai, sebelum sampai kepada jawaban untuk apa pendidikan Islam dilakukan. Apabila pertanyaan tentang manusia tidak terjawab, dan manusia tidak dimengerti secara meyakinkan, maka pendidikan betapapun modernnya tidak akan menghasilkan kesuksesan dan manfaat yang sesungguhnya.

Jawaban tentang pertanyaan siapa manusia, harus diutamakan jika manusia akan dididik, dibudayakan, dibuat beradab dan disempurnakan. Masalah eksistensi dan

proses kemajuan manusia haruslah menjadi tujuan utama setiap proses peradaban yang ingin membangun manusia dan peradabannya (Ali Syariati, 1995 : 50) Selanjutnya, dalam melihat wujud manusia, Ali Syariati (1995:51) membedakannya dalam dua dimensi, *basyar*<sup>14</sup> dan *insan*<sup>15</sup>. Sedangkan Jalaluddin Rahmat (1995:75) mengidentifikasi manusia dalam al-Quran menjadi tiga dimensi, yakni *basyar*, *insan* dan *an-nas*<sup>16</sup>. Ketiga dimensi inilah yang merupakan pijakan untuk memahami fitrah dan potensi manusia dalam rangka pemberian pendidikan kepadanya.

Konsep fitrah memiliki tuntutan agar Pendidikan Islam diarahkan untuk bertumpu pada tauhid. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan yang mengikat manusia dengan Allah. Apa saja yang dipelajari oleh manusia, seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid ini. Kepercayaan manusia akan adanya Allah melalui fitrahnya tidak dapat disamakan dengan teori yang memandang monoteisme sebagai suatu tingkat kepercayaan agama tertinggi. Muhaimin dan Mujib (1993:29) menegaskan bahwa tauhid merupakan inti dari semua ajaran agama yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Konsep tauhid bukan hanya sekedar jumlah, bahwa Allah itu Esa, tapi juga masalah kekuasaan (otoritas). Konsep tauhid inilah yang harus dipatuhi dan diperhatikan dalam kurikulum Pendidikan Islam.

#### **4. Asas (Spirit) Tauhid dalam Pendidikan Islam**

Tauhid, sebagai asas utama Pendidikan Islam mengandung makna penolakan terhadap selain Allah sebagai sumber otoritas ketergantungan. Ketergantungan pada selain Allah berarti terjebak dalam kemusyrikan. Pendidikan Islam sangat menentang kemusyrikan dalam

wujud dan bentuk apapun, sebagaimana nasehat Luqman kepada anaknya :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberikan pelajaran kepada anaknya : “Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Luqman/31 : 13)

Pendidikan Islam dengan dasar utama tauhid, sebagaimana yang dilakukan Luqman, akan menghasilkan manusia-manusia tauhid<sup>17</sup> yang meniadakan otoritas yang bukan datang dari Allah. Dengan demikian, Pendidikan Islam pada hakekatnya merupakan pendidikan yang membebaskan. Tugas utamanya adalah membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia menuju kepada menyembah Allah semata.

Inilah nilai esensi dari Pendidikan Islam yang menjadi penuntun ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang dilaksanakan. Bertolak dari sini, seorang pendidik muslim harus menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pemutlakan Allah sebagai Khalik. Dengan begitu, Pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang bertauhid, yang memegang komitmen kepada Allah sebagai satu-satunya sumber nilai<sup>18</sup>. Pada konteks ini, secara tidak

langsung, tauhid telah menjadi unsur atau struktur yang memberi identitas bagi pendidikan, khususnya Pendidikan Islam.

## C. PARADIGMA TAUHID DALAM PENDIDIKAN PEMBEBASAN

### 1. Dimensi Pembebasan dalam Tauhid

Dalam pandangan keagamaan umumnya kaum Muslimin, terdapat kesan yang amat kuat bahwa ber-Tauhid hanyalah berarti beriman atau percaya kepada Allah. Namun jika dikaji lebih mendalam dan teliti kitab suci al-Quran, ternyata hasil itu tidaklah sepenuhnya demikian (Madjid, 1992 : 74). Percaya kepada Allah tidaklah dengan sendirinya berarti Tauhid, sebab percaya kepada Allah itu masih mengandung kemungkinan percaya kepada yang lain-lain sebagai peserta Allah dalam keilahian. Hal ini digambarkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ  
مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ  
أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya : Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah.” Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain

Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku.” Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri. (QS. Az-Zumar/39 : 38)

Dalam ayat lain juga disebutkan :

وَلِيْن سَأَلْتَهُمْ مِّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ  
 الْأَرْضَ مِّن بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ



Artinya : Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?” Tentu mereka akan menjawab: “Allah”, Katakanlah: “Segala puji bagi Allah”, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami(nya). (QS. Al-Ankabuut/29 : 63)

Kedua ayat di atas menggambarkan bahwa orang-orang Arab sebelum Islam sudah percaya kepada Allah. Mereka juga percaya bahwa Allah-lah yang menciptakan alam raya (seluruh langit dan bumi), serta menurunkan hujan. Namun mereka tidak “mempercayai” Allah. Mereka lebih mempercayai berhala-berhala mereka, sehingga kepada berhala-

berhala mereka minta perlindungan, pertolongan, keselamatan dan seterusnya. Inilah yang disebut syirik, sikap “mempercayai” sesuatu selain Tuhan sendiri sebagai bersifat ketuhanan (ilahi), kemudian memperlakukan sesuatu selain Tuhan itu sama dengan perlakuan kepada Tuhan yang sebenarnya (Madjid, 1995 : 4).

Inilah yang menjadi problema manusia, yaitu bahwa manusia umumnya memang percaya kepada Allah atau Tuhan, namun tidak murni, karena bagi mereka Tuhan mempunyai “syirk” (sekutu). Hal ini digambarkan dalam firman Allah sebagai berikut :

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا

وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

﴿١٠٤﴾

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya :Sebagian besar manusia itu, betapapun kau (Muhammad) inginkan, tidaklah beriman. Padahal engkau tidak meminta upah sedikit pun. Ini tidak lain adalah peringatan untuk seluruh alam. Dan betapa banyaknya ayat di seluruh langit dan bumi yang lewat pada mereka, namun mereka berpaling. Dan

tidaklah mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka juga adalah orang-orang musyrik (QS. Yusuf/12: 103 – 106)

Di antara manusia memang ada yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan, yaitu kaum atheis. Tetapi mereka adalah minoritas dalam masyarakat manapun, termasuk dalam masyarakat negeri-negeri komunis yang secara resminya berideologi ateis. Karena itu ateis bukanlah problema utama umat manusia. Sebaliknya, problema utama manusia ialah justru politeisme atau syirik (Madjid, 1992 : 78, dan 1995 : 37) yaitu kepercayaan yang sekalipun berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa (Allah), namun masih membuka peluang bagi adanya kepercayaan kepada wujud-wujud lain yang dianggap bersifat ketuhanan atau ilahi, meski lebih rendah dari Allah sendiri.

Dengan demikian, atheis pun sesungguhnya adalah bentuk lain dari politeisme, karena walaupun mereka menolak adanya Tuhan seperti pada konsep agama-agama, akan tetapi dalam prakteknya mereka bertuhan juga, karena memutlakkan sesuatu seperti para pemimpin dan pikiran-pikiran mereka. Justru dalam ilmu sosial, banyak yang memandang komunisme atau atheisme sebagai padanan agama (Madjid, 1992 : 79).

Karena problema utama manusia ialah politeisme, maka program pokok al-Quran ialah membebaskan manusia dari belenggu paham Tuhan banyak dengan mencanangkan dasar kepercayaan yang diungkapkan dengan kalimat ”negasi-konfirmasi” yaitu kalimat ”Tidak ada Tuhan selain Allah (Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa)”. Dengan negasi ini dimulai proses pembebasan, yaitu pembebasan dari belenggu kepercayaan kepada hal-hal yang palsu. Demi kesempurnaan kebebasan

ini manusia harus mempunyai kepercayaan kepada sesuatu yang benar, sebab hidup tanpa kepercayaan sama sekali adalah suatu hal yang mustahil. Kebebasan hanya akan terwujud bila disertai dengan ketundukan tertentu, yaitu ketundukan kepada yang secara intrinsik benar, yaitu benar pada dirinya sendiri, tidak pada faktor luar secara tidak sejati (Madjid, 1992 : 79 – 80).

Oleh karenanya, proses pembebasan itu tidak lain ialah dengan pemurnian kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Pertama, dengan melepaskan diri dari kepercayaan kepada yang palsu, dan kedua, dengan pemusatan kepercayaan hanya kepada yang benar. Dua hal ini dirangkum dalam dua surat pendek al-Quran, yaitu surat al-Kafirun/109 dan surat al-Ikhlash/112. Yang pertama oleh Ibnu Taimiyah (dalam Madjid, 1992 : 80) dikatakan mengandung Tauhid Uluhiyyah (penegasan bahwa yang boleh disembah hanyalah Allah), dan yang kedua dikatakannya mengandung Tauhid Rububiyah (penegasan bahwa Allah adalah Tuhan Maha Esa, yang Satu secara Mutlak dan transendental).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesungguhnya tauhid sudah cukup bagi kegiatan hidup dan kehidupan umat manusia, karena dalam pandangan Islam, tauhid adalah nilai yang paling esensial dan sentral, sehingga seluruh gerak hidup manusia muslim tertuju ke sana. Begitu pula dengan pendidikan Islam, dengan tauhid, seluruh kegiatan pendidikan Islam dijiwai dengan norma-norma fundamental sekaligus dimotivasi dan diberi nilai tambah oleh kepentingan ubudiyah.

## **2. Pendidikan Islam sebagai Praksis Pendidikan Pembebasan**

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan proses

transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga tercipta manusia yang beradab (Naquib al-Attas, dalam Abdul Mukti : 2000 : 213). Dalam perspektif ini, salah satu aspek dalam tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya masyarakat egalitarian.<sup>19</sup> Bagaimana implementasi metodologis dari cita-ideal tersebut dalam praktek pendidikan Islam? Salah satu alternatif metodologis dalam praktek pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Abdul Mukti (2000 : 213) adalah model KADER : Kontekstualisasi tauhid, Demistifikasi guru dan *Reciprocal teaching*.

#### a. Kontekstualisasi Tauhid

Langkah utama dalam pendidikan Islam adalah penanaman tauhid yang kokoh. Tauhid harus diinternalisasikan dalam diri setiap peserta didik sedini mungkin, karena ia adalah pondasi utama Islam dan ruh pendidikan (Basheer El Tom, 1981 : 29). Tauhid adalah akar yang menumbuhkan sikap egalitarian di mana manusia mengakui hanya Allah Dzat yang Tertinggi, sedangkan semua manusia adalah sama dan karena itu mereka harus dihormati sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah.

Tetapi dalam perkembangannya, manusia bisa mencapai kedudukan yang sangat terhormat apabila mereka bertaqwa kepada Allah. Prinsip ini secara tegas disebutkan dalam surat al-Hujurat/49 ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan

dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat/49 : 13)

Surat al-Hujurat ayat 13 di atas menegaskan dua prinsip utama yaitu kesatuan dan persamaan antarmanusia, dan tuntunan bahwa taqwa bukanlah martabat yang *given*, tapi *ikhtiari* (Abdul Mukti, 2000 : 210). Berkaitan dengan ayat tersebut, Muhammad As’ad (1984 : 794) menulis :

*“...men’s evolution into ‘nations and tribes’ is meant to foster rather than diminish their mutual desire to understand and appreciate the essential human oneness underlying their outward differentiation; and, correspondingly, all racial, national, or tribal prejudice (asabiyyah) is condemned-implicitly in the Qur’an...”*

Setiap manusia mampu meraih derajat dan kepribadian taqwa apabila mereka konsisten dengan ajaran Allah. Dalam konteks ini Islam mendorong manusia untuk berprestasi, bukan hanya mengandalkan *prestige* (kebanggaan atau gengsi)

Karena itu, dalam pandangan Islam manusia tidak boleh membanggakan keturunan. Bahkan menurut Ibnu Taimiyyah (dalam Nurcholish Madjid, 1995 : 142), sikap membanggakan keturunan merupakan sikap jahiliyah yang sangat bertentangan dengan Islam. Pertimbangan dalam jahiliyah berdasarkan atas keturunan, sedangkan pertimbangan dalam Islam berdasarkan atas amal perbuatan. Elan berprestasi dan berlomba-lomba dalam kebajikan adalah yang sangat ditekankan oleh Islam.

Selanjutnya, tauhid dan pluralisme<sup>20</sup> menganjurkan manusia untuk bersikap toleran, lapang dada dan terbuka. Islam melarang manusia untuk memutlakkan kebenaran pendapat pribadi, takabbur, dan menganggap dirinya lebih baik dari manusia lainnya. Sikap tersebut cenderung membuat manusia menjadi sosok yang otoriter, eksploitatif feodal dan represif.

Dengan demikian, kontekstualisasi tauhid berarti membumikan prinsip dan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan nyata. Karenanya diperlukan re-interpretasi pemahaman, sosialisasi dan yang tak kalah penting adalah personifikasi nilai-nilai tauhid. Ini berarti bahwa keyakinan kepada Allah harus membumi, dan termanifestasi dalam perbuatan (Abdul Mukti, 2000 : 215)

### **b. Demistifikasi Guru**

Langkah kedua dalam model KADER adalah demistifikasi guru. Dalam tradisi masyarakat muslim, figur guru sering tampil sebagai sosok mistik. Guru adalah figur yang identik dengan “ilmu”, dalam pengertian memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan mistisisme (seperti kesaktian dan ilmu laduni). Di lingkungan pendidikan tradisional, seorang guru selain mengajar di lembaga pendidikan, biasanya juga bisa mengobati penyakit, menjadi tempat konsultasi untuk memecahkan problema kehidupan dan lain-lain.

Karena itulah maka syarat untuk menjadi guru sungguh sangat berat. Penghormatan terhadap guru sangat menentukan keberhasilan hidup. Hal ini menurut Abdul Mukti (2000 : 217) adalah karena guru dianggap sebagai sosok yang mampu mendatangkan “barakah” dan sekaligus “laknat”. Figur guru direpresentasikan

sebagai sosok yang *infallible* (tidak pernah salah) dan *most-knowledgeable* (paling mengerti). Guru yang dalam tradisi Jawa merupakan akronim digugu dan ditiru menunjukkan betapa mulianya kedudukan guru. Apa yang diajarkan dan dilaksanakan oleh guru merupakan hal yang *un-questionable* (tidak boleh disangsikan) dan *acceptable* (harus diterima). Dengan pemahaman yang demikian, guru tidak hanya tampil sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai sumber ilmu, dan karena pengetahuannya itulah mereka tidak boleh dibantah, dikecewakan, apalagi dihina.

Penghormatan dan penghargaan terhadap guru sebagaimana masyarakat tradisional di atas, bukanlah merupakan hal yang salah. Akan tetapi dalam perkembangan pendidikan kontemporer sekarang ini, hal yang demikian itu sangat sulit untuk dipertahankan. Beberapa alasan yang mungkin bisa diberikan antara lain adalah :

- 1) Guru, terutama dalam pendidikan sekolah, tidak hanya terbatas kepada mereka yang mengajar agama, tetapi juga disiplin ilmu “non-agama”.
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat menuntut para guru untuk terus belajar. Terbatasnya *income* dan kesejahteraan material para guru sering membuat mereka tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Bahkan, karena kemampuan ekonomi orang tua yang lebih baik dibandingkan dengan guru, akan membuat siswa tertentu –terutama di kota besar- mampu mengakses buku dan sumber informasi jauh lebih baik dari gurunya. Karena itu, menempatkan

guru sebagai satu-satunya sumber belajar tidak lagi relevan.

- 3) Menempatkan guru sebagai sosok yang *infalliable* (tidak pernah salah), mungkin justru akan membuat para guru berada dalam posisi *falsifiable* (serba salah) dan diperlakukan tidak “manusiawi”. Hal ini dikarenakan, secara manusiawi setiap manusia bisa saja berbuat salah.

Karena itulah menurut Mukti (2000 : 218) diperlukan transformasi pendidikan di mana guru ditempatkan sebagai “manusia” dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dalam proses pembelajaran, guru tetap menjadi *agent of knowledge* (orang yang memiliki kedalaman ilmu), tetapi bukan *source of knowledge* (sumber ilmu). Guru harus *commit to morality* (orang yang bermoral) tetapi bukan *the source of morality* (sumber moral).

Visi tersebut menempatkan guru dalam posisi ganda : Mentor (Barbara Field, 1994) dan manager (John Eggleston, 1992). Jika dengan perannya sebagai mentor, masih memungkinkan bagi guru untuk menjadi sosok mistik, maka dalam perannya sebagai manager, guru tampil sebagai sosok yang egalitarian. Guru tetap dekat dengan peserta didik dan menempatkan diri sebagai bagian dari kelas. Di samping itu, guru tetap mampu memberikan teladan dengan cara menghormati dan menghargai sesama, membagi perhatian secara proporsional, tidak condong kepada salah seorang (*favouritism*) dan mengabaikan serta mengejek yang lain (*victimization*). Dalam beberapa hal, baik yang menyangkut materi pelajaran maupun pengambilan keputusan, guru bisa melakukan *sharing ideas*, tukar pendapat dengan peserta didik.

### c. Reciprocal Teaching

Langkah ketiga dalam model KADER adalah *reciprocal teaching* (pengajaran timbal balik). *Reciprocal teaching* ini menurut penulis hampir sama dengan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa<sup>21</sup>. Pernyataan ini mengandung makna bahwa pendidikan seyogianya memperhatikan tahap-tahap perkembangan siswa, irama perkembangan dan bioritme (ritme kehidupan secara utuh). Pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa seyogianya diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik, berpegang pada prinsip-prinsip *individualized instruction*, sekalipun dilaksanakan secara klasikal. Pendidikan yang berorientasi pada siswa seyogianya mengutamakan belajar cara-cara belajar (learning how to learn), dan bukan sekedar mempelajari materi ajar. Menyiapkan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan siswa mengandung makna menyiapkan siswa untuk menjadi pelajar yang mampu belajar secara sempurna.

Dengan *reciprocal teaching* peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan belajar yang berbeda<sup>22</sup>. Visi ini menempatkan siswa sebagai satu kesatuan yang saling membantu. Dengan *reciprocal teaching*, peserta didik yang lebih mampu diberi kesempatan untuk membantu yang lain. Di sini, prestasi seseorang tetap mendapatkan penghargaan.

*Reciprocal teaching* didasari oleh prinsip bahwa mengajar merupakan proses *communication of experience* (John Milton Gregory, 1986 : 16). Pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh guru dan peserta didik merupakan “pengalaman” yang satu sama lain saling melengkapi.

Dengan *reciprocal teaching*, bisa diciptakan kondisi dimana “perbedaan” diwadahi dan disatukan melalui partisipasi aktif dari guru dan peserta didik. Pusat belajar tidak terkonsentrasi pada guru saja, tetapi juga pada seluruh peserta didik dan komponen pembelajaran lainnya.

Pendekatan *reciprocal teaching* bisa diterapkan dengan berbagai metode seperti diskusi, kerja kelompok dan *peer lesson*. Metode-metode tersebut memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk saling berinteraksi. Intensitas interaksi mampu mendekatkan hubungan personal dan membiasakan saling bekerjasama. Dengan cara ini peserta didik dilatih untuk mampu bersikap toleran, lapang dada dan menghormati perbedaan pendapat serta menganggap perbedaan sebagai hal yang lumrah. Dan tentu saja semua itu sangat sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan persatuan, persamaan dan kebersamaan atas dasar kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukti, Masyarakat Egalitarian: Profil dan Perwujudannya Melalui Pendidikan Islam, dalam Ismail SM (ed.), 2000, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Raghib al-Ishfahani, tt, Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran, Beirut : Dar al-Fikr.
- Amin Rais, 1987, Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan.
- Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology, diterjemahkan Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000).
- Basheer El Tom (1981), "Education and Society", dalam Mohammad Wasiullah Khan (ed.), Education And Society in The Muslim World, Jeddah: Hodder and Stoughton.
- Dimjati dan Roqib, 2000, Pendidikan Pembebasan, Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia.
- Everett Reimer, 2000, Matinya Sekolah, Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Hery Noer Aly, 1999, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- John Milton Gregory, 1986, The Seven Laws of Teaching, revised edition, cetakan 28, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House.

- Mansour Fakih, 2001, Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin dan Abd. Mujib, 1993, Pemikiran Pendidikan Islam, Bandung: Trigenda Karya.
- Muhammad As'ad, 1984, The Message of the Qur'an, Gibraltar : Dar al-Andalus.
- Muhammad Fazlurrahman Anshari, 1994, The Qur'anic Foundation and Structure of Muslim Society, Volume I, Karachi, Pakistan: Darul-Ishaat.
- Nurcholish Madjid, 1992, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina.
- , 1995, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Bandung: Mizan.
- Paulo Freire, 1999, Menggugat Pendidikan, Fundamentalisme Konservatif Liberal Anarkis, disunting dan dialihbahasakan oleh Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2001, Pendidikan yang Membebaskan, Jakarta: MELIBAS (Media Lintas Batas).
- PA van der Weij, 1991, Filusuf-filusuf Besar tentang Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Retno Sriningsih Satmoko, 1999, Landasan Kependidikan, Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan Pancasila, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Yayah Khisbiyah, Mencari Pendidikan yang Menghargai Pluralisme, dalam Sindhunata (ed.), 2000, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Yogyakarta: Kanisius.

## Catatan

- 1 Makalah ini dipresentasikan dalam kegiatan diskusi intern dosen Prodi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 11 April 2013.
- 2 Penulis adalah Dosen Mata Kuliah Ilmu Pendidikan Islam di Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Pontianak.
- 3 Paling tidak ada empat dimensi yang melekat pada manusia, yaitu : a. dimensi individual, b. dimensi sosial, c. dimensi susila, dan d. dimensi religius (agama). Untuk penjelasan lebih lanjut tentang dimensi manusia berikut cara pengembangannya, baca Retno Sriningsih Satmoko, Landasan Kependidikan, Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan Pancasila, Semarang: IKIP Semarang Press, 1999.
- 4 Istilah pendidikan yang memanusiakan adalah istilah yang dipopulerkan oleh Paulo Freire lewat tulisannya yang berjudul **“Pendidikan yang Membebaskan, Pendidikan yang Memanusiakan”** (lihat Paulo Freire, Menggugat Pendidikan, Fundamentalisme Konservatif Liberal Anarkis, disunting dan diilustrasikan oleh Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm 434), lihat juga Paulo Freire, Pendidikan yang Membebaskan, Jakarta: MELIBAS (Media Lintas Batas), 2001, hlm. viii, dan lihat pula dalam Mansour Fakhri, Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. xi). Selanjutnya juga dipakai istilah **“Pendidikan untuk Pembebasan”** (lihat Everett Reimer, Matinya Sekolah, Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2000, hlm. 69, lihat pula Dimijati dan Roqib, Pendidikan Pembebasan, Yogyakarta: Yayasan Aksara Indonesia, 2000).
- 5 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. Adz-Dzariyat : 56)
- 6 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah : 30)
- 7 Kata fitrah menunjuk kepada “macam”; berakar pada kata al-fathru yang berarti mengadakan dan menciptakan. Fitrah Allah pada manusia berarti pengadaan dan penciptaan yang dilakukan Allah terhadap manusia dalam suatu jenis ciptaan tertentu yang memungkinkannya untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Lihat al-Raghib al-Ishfahani, Mu’jam Mufradat Alfazh al-Quran, Beirut : Dar al-Fikr, tt, hlm. 396. Ada beberapa pemaknaan terhadap kata “Fitrah” sebagaimana diidentifikasi oleh para pakar, yaitu : (1) Fitrah berarti suci dari dosa waris, (2) Fitrah berarti Dienul Islam, (3) Fitrah berarti pengakuan akan keesaan Allah (tauhid), (4) Fitrah berarti murni (ikhlas), (5) Fitrah berarti kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran, (6) Fitrah sebagai potensi dasar

manusia untuk mengabdikan dan mengenal Allah, (7) Fitrah berarti ketetapan dan kejadian asal manusia mengenai kebahagiaan dan kesesatan, (8) Fitrah berarti tabiat alami dari manusia, dan (9) Fitrah berarti Gharizah (insting) dan Mumazalah (wahyu dari Allah). Lihat dalam Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993, hlm. 13-21.

- 8 Alienasi adalah istilah khas Eksistensialisme yang digunakan untuk menggambarkan keprihatinan kaum eksistensialis atas kebebasan manusia dalam memilih dan bertindak. Bentuk dari keprihatinan tersebut adalah ajakan untuk menghilangkan mitos-mitos yang menyangkut tujuan, nilai-nilai, dan bentuk-bentuk pembeleguan baik yang bersifat profane maupun transendental. Tokoh-tokoh Eksistensialis di antaranya adalah Sartre, Albert Camus, dan Gabriel Marcel. Lihat PA van der Weij, *Filosuf-filosuf Besar tentang Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- 9 Ahmad Amin, seorang sarjana Islam Mesir, memberikan penafsiran terhadap kalimat *Laa Ilaaha illa Allah* sebagai berikut : “orang yang berkeinginan memperbudak sesamanya berarti ingin menjadi Tuhan, padahal tiada Tuhan selain Allah; orang yang berkeinginan menjadi tiran, berarti ingin menjadi Tuhan, padahal tiada Tuhan selain Allah; penguasa yang berkeinginan merendahkan rakyatnya berarti ingin menjadi Tuhan, padahal tiada Tuhan selain Allah. Kita menghargai setiap manusia apa pun keadaannya, dan darimana pun asalnya, asal bisa menjadi saudara bagi sesamanya... Demokrasi, sosialisme dan keadilan social dalam makna yang sesungguhnya akan dan semakin berjaya karena mengajarkan persaudaraan, dan ini merupakan salah satu konsekuensi dari kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah”. (Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology*, diterjemahkan Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000).
- 10 Tauhid Rububiyah adalah pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai zat yang maha pencipta, pemelihara dan memiliki sifat kesempurnaan.
- 11 Tauhid Mulkiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah Raja dari Alam Semesta. Dia bebas melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya.
- 12 Tauhid Ilahiyah adalah komitmen manusia kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang dipuja dan disembah, serta satu-satunya sumber nilai.
- 13 Dalam alam pikiran Barat, persoalan ini termasuk dalam topic bahasan tentang factor keturunan (heredity) dan factor lingkungan, yang melahirkan tiga aliran sebagai berikut : Pertama, Empirisme, dipelopori oleh John Locke (1632 – 1704), mengatakan bahwa perkembangan pribadi ditentukan oleh factor lingkungan, terutama pendidikan. Teori ini dikenal dengan teori tabularasa dimana tiap individu lahir sebagai kertas putih, dan lingkunganlah yang “menulisi” kertas itu. Pandangan ini didasarkan atas keyakinan akan kemampuan manusia untuk dapat mengatur dan menguasai lingkungan. Kedua, Nativisme, dipelopori oleh Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) mengatakan bahwa perkembangan pribadi ditentukan oleh pembawaan yang bersifat kodrati dari kelahiran, tidak dapat diubah oleh pengaruh alam sekitar (pendidikan). Tanpa memiliki potensi warisan yang baik, seseorang tidak mungkin mencapai tingkat kebajikan yang dikehendaki, walau bagaimanapun pendidikan diusahakan. Ketiga,

- Konvergensi, dipelopori oleh William Stern (1871 – 1938) mengatakan bahwa perkembangan pribadi sesungguhnya adalah hasil proses kerja sama dua factor : warisan dan lingkungan. Potensi warisan yang baik saja tanpa pengaruh lingkungan pendidikan yang baik tidak akan dapat membina kepribadian yang ideal. Sebaliknya, meskipun lingkungan pendidikan itu baik, tanpa potensi warisan yang baik, tidak akan menghasilkan kepribadian yang ideal. Dengan kata lain, tiap pribadi merupakan hasil konvergensi dua factor tersebut. Lihat Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- 14 *Bayar* adalah makhluk yang sekedar berada (*being*), tidak akan mengalami perubahan, dan selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia seperti makan, minum, tidur, meneruskan keturunan, dan lain-lain.
  - 15 *Insan* adalah makhluk yang menjadi (*becoming*), selalu bergerak maju ke arah kesempurnaan. Kata *insan* selanjutnya dihubungkan dengan keistimewaan manusia sebagai khalifah (pemikul amanat) di muka bumi. Dalam konteks ini, kata *insan* menunjuk pada sifat-sifat psikologis atau spiritual manusia.
  - 16 Kata *An-nas* mengacu pada hakekat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ada dua konsep esensial yang membentuk hakekat manusia sehingga berbeda dengan binatang, yaitu potensi untuk mengembangkan iman, dan potensi untuk mengembangkan ilmu. Usaha untuk mengembangkan keduanya disebut amal shaleh. Iman dan ilmu inilah yang menjadi dasar hakekat kemanusiaan dan keduanya harus dikembangkan secara seimbang.
  - 17 Paling tidak ada lima atribut bagi manusia tauhid, yaitu : (a) Memiliki komitmen utuh kepada Tuhannya, (b) Menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah, (c) bersikap progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas kehidupannya, (d) tujuan hidupnya amat jelas, dan (e) memiliki visi yang jelas tentang kehidupan yang harus dibangunnya dengan manusia lain (Lihat Amin Rais, Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan, 1987, hlm. 19 – 20)
  - 18 Islam menjadikan tauhid sebagai pusat dari semua orientasi nilai, sementara pada saat yang sama melihat manusia sebagai tujuan dari transformasi nilai. Dalam konteks inilah Islam disebut sebagai *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi seluruh alam, termasuk manusia di dalamnya. Islam yang seperti ini disebut *humanisme teosentrik*, yaitu sebuah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap Tuhan, tapi mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia. Prinsip humanisme teosentrik inilah yang kemudian akan ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat.
  - 19 Masyarakat egalitarian memiliki tiga ciri pokok, yaitu : 1) pengakuan akan persatuan kemanusiaan, di mana manusia memandang setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, 2) pluralisme dan toleransi, dan 3) martabat dan harga diri seseorang sangat ditentukan oleh prestasi dan kerja keras, bukan atas dasar etnis dan geneologis (keturunan).
  - 20 Menurut Yayah Kishbiyah (2000 : 159), beberapa gagasan dasar yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan untuk menyusun metode pendidikan yang

menyantuni pluralisme adalah sebagai berikut : Pertama, menjadikan Apresiasi Multikultural/Pluralitas sebagai kebijakan nasional oleh Depdiknas, untuk kemudian diterjemahkan dan dijabarkan melalui prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi pendidikan oleh daerah sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan komunitas lokal di daerahnya masing-masing. Kedua, mengembangkan proses dan metode pembelajaran yang memanfaatkan sebanyak mungkin potensi sosial yang ada pada komunitas lokal setempat, untuk menumbuhkembangkan *social competence* anak didik (secara individu) dan *social capital* (scara kolektif), dengan tujuan menciptakan dan memelihara harmoni dalam relasi sosial. Ketiga, menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten dalam menerjemahkan muatan etika relasi sosial, dan berfungsi sebagai *role model* yang nyata (*living model*) dalam menanamkan sikap tepa selira (*empathy*) dan toleransi yang inklusif pada anak didik. Keempat, memodifikasi kurikulum agar lebih banyak berisi muatan apresiasi dan toleransi terhadap budaya dan kelompok lain. Salah satu caranya adalah dengan menyisipkan muatan tersebut dalam mata pelajaran Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dasar pemikirannya adalah karena toleransi dan apresiasi terhadap kemajemukan dan perbedaan adalah bagian integral dari sikap keberagaman yang inklusif dan sikap sebagai warga negara yang santun – beradab, sehingga mata pelajaran Agama dan PKn tidak dapat menanggalkan pendidikan toleransi. Kelima, mempopulerkan program-program pertukaran budaya (*cross-cultural exchange program*) yang memfasilitasi kontak, komunikasi, interaksi dan kerjasama di antara anak didik yang berasal dari kelompok etnis dan agama yang berbeda-beda.

- 21 Anak adalah manusia yang khas dan unik, mereka harus berkembang sesuai dengan kekhasan dan keunikannya masing-masing. Penyamarataan dalam menyampaikan pendidikan adalah kesalahan yang paling besar terhadap anak. Sayangnya, hal itulah yang sering dilakukan dalam pendidikan. Bila pendidikan tidak lagi memberi kesempatan bagi berkembangnya kekhasan dan keunikan mereka, sama saja dengan pendidikan itu yang menghancurkan mereka sejak dini. Untuk itu mungkin ada baiknya penulis kutip dongeng Kak Seto (2000 : 85) berikut ini:

Tersebutlah sebuah kisah di hutan belantara yang lebat. Di sana akan diselenggarakan sebuah sekolah untuk para hewan yang ada di hutan. Adapun mata pelajaran pokok yang akan diajarkan adalah berlari, memanjat, terbang dan berenang. Dengan demikian, semua murid yang berprestasi diharapkan akan mampu menguasai keempat mata pelajaran pokok di atas. Namun, bagaimana kenyataannya di lapangan? Mari kita lihat.

Si Kucing Hutan ternyata amat pandai dalam hal mata pelajaran berlari dan memanjat. Dengan cepat ia dapat mengejar mangsanya, bahkan sampai ke bagian atas pohon yang cukup tinggi. Namun sayangnya, ia mengalami kesulitan dalam hal mata pelajaran berenang karena ia memang sangat takut pada air. Apalagi dalam pelajaran terbang. Berkali-kali ia memanjat pohon yang cukup tinggi, kemudian mencoba melompat ke bawah bagaikan seekor burung yang hendak terbang. Tetapi, bagaimana akibatnya? Berkali-kali pula si Kucing Hitam jatuh terguling-guling di tanah dengan kesakitan karena kakinya terkilir.

- Akibatnya, ia malah tidak mampu berlari dan memanjat sama sekali, keterampilan yang semula amat dikuasainya dengan baik.
- Lain halnya dengan si Bebek. Ia cukup mahir dalam hal mata pelajaran berenang. Terbang pun untuk jarak yang tidak terlampau jauh ia mampu. Namun untuk berlari dengan cepat, ia mengalami kesulitan. Apalagi untuk memanjat pohon. Bahkan berkali-kali ia mencoba untuk memanjat pohon, sampai akhirnya kakinya lecet-lecet dan berdarah. Usahnya sia-sia. Malah, karena luka-luka yang dialaminya, ia jadi terhambat untuk berenang dan terbang dengan lancar, yang semula amat dikuasainya dengan baik. Sayang sekali, bukan?
- Pesan yang ingin disampaikan Kak Seto lewat dongeng tersebut adalah bahwa setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal inilah yang sering disebut sebagai keunikan individu. Bila keunikan ini dihargai, diterima kekurangannya sekaligus juga dihargai kelebihan-kelebihannya, maka individu itu pun akan dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bila sebaliknya, keunikan itu diabaikan, maka sebaliknya pulalah yang akan terjadi pada setiap individu.
- Contoh dongeng di atas sering pula merupakan cerminan sikap orang dewasa terhadap anak-anak. Orang tua dan guru sering kurang mau memahami anak-anak sebagai individu yang unik. Kemampuan anak-anak itu lalu disamaratakan, diseragamkan dan dikolektifkan, dengan menuntut mereka agar mampu berprestasi dalam beberapa bidang sekaligus. Akibatnya, mereka sering menemui kegagalan dan akhirnya justru mengalami frustrasi. Sebaliknya, andaikata anak-anak diperlakukan dengan sikap yang seimbang, dalam arti masing-masing dihargai kelebihannya, maka mereka pun akan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Selanjutnya, mereka akan termotivasi untuk mempelajari hal-hal yang baru sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.
- 22 Keberhasilan suatu pendidikan sering dikaitkan dengan kemampuan para orang tua dan guru dalam hal memahami anak sebagai individu yang unik, di mana setiap anak dipandang sebagai individu yang memiliki potensi-potensi yang berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi dan berharga. Mungkin dapat diibaratkan sebagai sebuah taman yang indah dengan aneka bunga yang berwarna warni, mereka akan tumbuh dan berkembang dengan keelokannya masing-masing.